

Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah Triwulan I Tahun 2010

Buku Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Tengah dipublikasikan secara triwulanan oleh Kantor Bank Indonesia Semarang, untuk menganalisis perkembangan ekonomi Jawa Tengah secara komprehensif. Isi kajian dalam buku ini mencakup perkembangan ekonomi makro, inflasi, moneter, perbankan, sistem pembayaran, keuangan daerah, dan prospek ekonomi Jawa Tengah. Penerbitan buku ini bertujuan untuk: (1) melaporkan kondisi perkembangan ekonomi dan keuangan di Jawa Tengah kepada Kantor Pusat Bank Indonesia sebagai masukan pengambilan kebijakan, dan (2) menyampaikan informasi kepada *external stakeholders* di daerah mengenai perkembangan ekonomi dan keuangan terkini.

Kantor Bank Indonesia Semarang

<i>M. Zaeni Aboe Amin</i>	<i>Pemimpin</i>
<i>Mahdi Mahmudy</i>	<i>Deputi Pemimpin Bidang Ekonomi Moneter</i>
<i>H. Yunnokusumo</i>	<i>Deputi Pemimpin Bidang Perbankan</i>
<i>Mohamad M. Toha</i>	<i>Deputi Pemimpin Bidang Manajemen Intern dan Sistem Pembayaran</i>
<i>Herdiana A.W.</i>	<i>Analisis Madya Senior</i>
<i>Imam Fauzy</i>	<i>Pengawas Bank Madya Senior</i>
<i>I Ketut Suena</i>	<i>Pengawas Bank Madya Senior</i>
<i>Imam Mustiantoko</i>	<i>Kepala Bidang Manajemen Intern</i>
<i>Tatung M. Toufik</i>	<i>Kepala Bidang Sistem Pembayaran</i>

*Softcopy buku ini dapat di-download dari
DIBI (Data dan Informasi Bisnis Indonesia) di website **Bank Indonesia** dengan alamat
<http://www.bi.go.id>*

Halaman ini sengaja dikosongkan

Kata Pengantar

Secara umum perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I-2010 dalam kondisi yang cukup baik. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih berada dalam tren peningkatan pertumbuhan dan diperkirakan tumbuh sebesar 4,75%–5,25% (yoy) pada triwulan ini, sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,6% (yoy). Namun angka pertumbuhan tersebut masih berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan mencapai 5,7% (yoy), karena adanya kontraksi pada sektor pertanian akibat pengaruh musiman.

Sementara itu laju inflasi Jawa Tengah pada triwulan I-2010 tercatat sebesar 3,46% (yoy), sedikit meningkat jika dibandingkan triwulan IV-2009 sebesar 3,32%. Laju inflasi Jawa Tengah tersebut juga tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan laju inflasi nasional triwulan I-2010 sebesar 3,43% (yoy). Walaupun relatif tidak terlalu tinggi, namun perkembangan ini memberi sinyal bahwa pengendalian inflasi di Jawa Tengah perlu menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah, Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi peran dan fungsi Tim Pemantauan dan Pengendalian Harga (TPPH) Provinsi Jawa Tengah yang telah terbentuk, agar lebih memperhatikan stabilitas harga barang dan jasa pada tahun 2010.

Sedangkan kinerja perbankan (Bank Umum dan BPR) di Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I-2010 (Data Posisi Februari 2010) mengalami pertumbuhan yang relatif cukup baik. Indikator-indikator utama kinerja perbankan yaitu total aset, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun, dan kredit yang diberikan, serta *Loan to Deposits Ratio* (LDR) pada triwulan ini tumbuh positif. Sementara itu, kualitas kredit yang disalurkan semakin membaik, yang tercermin dari menurunnya *Non Performing Loans-Gross (NPLs)*.

Kajian yang dihasilkan oleh Kantor Bank Indonesia Semarang ini merupakan salah satu komitmen Kantor Bank Indonesia Semarang untuk senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan perekonomian Jawa Tengah. Diharapkan sumbangsih kecil ini dapat menjadi masukan bagi Kantor Pusat Bank Indonesia dalam pengambilan kebijakan moneter dan perbankan secara nasional, dan diharapkan juga menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan *external stakeholders* lainnya di Jawa Tengah.

Akhir kata, kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini khususnya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, kalangan perbankan, akademisi, Dinas/Instansi dan institusi lain yang telah bersedia menjadi narasumber data dan informasi kami, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebut satu persatu, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, April 2010
KANTOR BANK INDONESIA SEMARANG

Ttd

M. Zaeni Aboe Amin
Pemimpin

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	halaman iii
Ringkasan Eksekutif	halaman 1
BAB 1. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO	halaman 7
Sisi Permintaan	halaman 8
Sisi Penawaran	halaman 14
BOKS I: PEMETAAN DAN ANALISIS KOMODITAS MEBEL DAN BAGIAN-BAGIANNYA DI JAWA TENGAH DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA 2010 : "Kondisi Saat ini serta Peluang dan Ancamannya ke Depan"	halaman 22
BAB 2. PERKEMBANGAN INFLASI	halaman 27
BOKS II: TIM PENGENDALIAN INFLASI: UPAYA MEMPERKUAT KOMITMEN DALAM MENGENDALIKAN INFLASI	halaman 40
BAB 3. PERKEMBANGAN PERBANKAN	halaman
Intermediasi Bank Umum	halaman 444
Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	halaman 54
Perkembangan Perbankan Syariah	halaman 58
Stabilitas Sistem Keuangan di Jawa Tengah	halaman 60
BOKS III: <i>LESSON LEARNT</i> IMPLEMENTASI <i>DIAMOND CLUSTER</i> DALAM PENGEMBANGAN KLASTER BORDIR DAN KONVEKSI DI PADURENAN KUDUS	halaman 62
BAB 4. KEUANGAN DAERAH	halaman 67
Realisasi Pendapatan Daerah	halaman 67
Realisasi Belanja Daerah	halaman 66
BAB 5. PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN	halaman 69
Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai	halaman 69
Transaksi Keuangan secara Non Tunai	halaman 74
BAB 6. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	halaman 75
Ketenagakerjaan	halaman 75
Nilai Tukar Petani	halaman 76
BAB 7. PROSPEK PEREKONOMIAN	halaman 79
Pertumbuhan Ekonomi	halaman 79
Inflasi	halaman 82
Daftar Istilah	halaman 87
LAMPIRAN	
Indikator Perekonomian dan Perbankan Jawa Tengah	halaman 89

Ringkasan Eksekutif

Perekonomian Jawa Tengah pada Triwulan ini mengalami peningkatan pertumbuhan dibandingkan triwulan sebelumnya.

A. GAMBARAN UMUM

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan I-2010 diperkirakan meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV-2009. Peningkatan ini diperkirakan disebabkan oleh membaiknya iklim usaha yang mendorong peningkatan sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan sektor perdagangan hotel dan restoran (PHR).

Secara umum, tekanan terhadap harga-harga di Jawa Tengah pada triwulan I-2010 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan IV-2009, baik secara tahunan (*year on year-yoy*) maupun secara kuartalan (*quarter to quarter-qtq*). Sumber tekanan inflasi pada triwulan laporan terutama berasal dari kelompok makanan jadi dan kelompok bahan makanan.

Kinerja tahunan (*yoy*) perbankan (Bank Umum dan BPR) di Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I-2010 (Data Posisi Februari 2010) mengalami pertumbuhan yang cukup baik walaupun sedikit melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan I-2009. Indikator-indikator utama kinerja perbankan yaitu total aset, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun, dan kredit yang diberikan, serta *Loan to Deposits Ratio* (LDR) pada triwulan ini tumbuh positif. Sementara itu, kualitas kredit yang disalurkan semakin membaik, yang tercermin dari menurunnya *Non Performing Loans-Gross* (NPLs).

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II-2010 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I-2009, yaitu dalam kisaran 5,55%-6,25% (*yoy*). Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah triwulan I-2010 diperkirakan akan didorong oleh sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Di sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tetap didorong oleh konsumsi rumah tangga (RT).

B. PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Perekonomian Jawa Tengah triwulan I-2010 diperkirakan tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya.

Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I-2010 diperkirakan tumbuh sebesar 4,75%–5,25% (*yoy*), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,6% (*yoy*). Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong

pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan ini. Hal ini terutama disebabkan oleh masih tingginya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini serta adanya persiapan pelaksanaan Pemilukada di beberapa daerah di Jawa Tengah.

Optimisme masyarakat menjadi salah satu pemicu pertumbuhan Konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2010

Beberapa *prompt indicator* yang menunjukkan perkembangan positif konsumsi rumah tangga adalah (1) penjualan listrik PLN segmen Rumah Tangga yang mengindikasikan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan konsumsi energi, (2) penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang menggambarkan konsumsi bahan bakar masyarakat serta (3) kredit konsumsi perbankan Jawa Tengah yang mengalami peningkatan.

Konsumsi pemerintah pada triwulan I-2010 diperkirakan masih tetap tumbuh meskipun sedikit melambat dibandingkan angka pertumbuhan pada triwulan IV-2009. Hal tersebut disebabkan pada triwulan IV-2009 merupakan akhir masa tahun anggaran, sehingga realisasi pengeluaran pemerintah yang terjadi relatif cukup besar. Sementara pada triwulan ini, belanja rutin seperti belanja gaji pegawai diperkirakan hanya mengalami sedikit peningkatan, sedangkan belanja barang dan jasa diperkirakan masih belum optimal.

Investasi yang tercermin dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada triwulan I-2010 diperkirakan stabil dan cenderung sedikit melambat bila dibandingkan dengan angka pertumbuhan investasi pada triwulan IV-2009 yang tumbuh sangat signifikan. Walaupun demikian, angka pertumbuhan investasi pada triwulan ini diperkirakan masih cukup tinggi di kisaran 6,3%-6,8% (yoy). Proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol Semarang–Solo diperkirakan turut menjadi penyumbang pertumbuhan investasi pada triwulan ini.

Perkembangan ekspor-impor dan perdagangan antar pulau di wilayah Jawa Tengah pada triwulan I-2010 diperkirakan tetap menunjukkan tren peningkatan. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan perdagangan luar negeri akibat pulihnya permintaan luar negeri dan perdagangan antar daerah/pulau.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan pada triwulan ini terutama didorong oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), serta sektor jasa. Sektor pertanian diperkirakan masih mengalami kontraksi pertumbuhan pada triwulan, walaupun sudah menunjukkan perbaikan karena mulai terjadinya panen tanaman bahan makanan (tabama) di beberapa daerah pada akhir triwulan ini.

Inflasi (qtq) dan Inflasi (yoy) pada triwulan ini mengalami peningkatan dibandingkan triwulan IV-2009. Kelompok makanan jadi dan kelompok bahan makanan menjadi sumber tekanan inflasi pada triwulan I-2010

C. PERKEMBANGAN INFLASI

Secara umum, tekanan terhadap harga-harga di Jawa Tengah pada triwulan I-2010 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan IV-2009, baik secara tahunan (yoy) maupun secara kuartalan (qtq).

Inflasi tahunan pada triwulan laporan tercatat sebesar 3,46% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 3,32%. Berdasar kuartalan (qtq), inflasi di Jawa Tengah pada triwulan I-2010 sebesar 0,91% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,39%. Sumber tekanan inflasi secara tahunan maupun kuartalan pada triwulan laporan terutama berasal dari kelompok makanan jadi dan kelompok bahan makanan.

Perkembangan laju inflasi tahun 2009 dan triwulan I-2010 yang cenderung lebih tinggi dari inflasi nasional memberi sinyal bahwa pengendalian inflasi di Jawa Tengah perlu menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah, Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melalui optimalisasi peran dan fungsi Tim Pemantauan dan Pengendalian Harga (TPPH) Provinsi Jawa Tengah yang telah terbentuk, agar lebih memperhatikan stabilitas harga barang dan jasa pada tahun 2010. Dengan menjaga laju inflasi dalam level yang rendah dan stabil, diharapkan dapat memberikan kenyamanan berusaha dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

D. PERKEMBANGAN PERBANKAN DAN SISTEM PEMBAYARAN

Kinerja perbankan Jawa Tengah menunjukkan perkembangan positif walaupun mengalami perlambatan

Secara tahunan, aset perbankan di Jawa Tengah (bank umum dan BPR) pada triwulan I-2010 dibandingkan dengan triwulan I-2009 tumbuh sebesar 12,20%. Di sisi lain DPK yang dihimpun tumbuh sebesar 7,68% (yoy) sehingga menjadi Rp97,06 triliun. Penurunan pertumbuhan yang cukup signifikan ini diindikasikan karena masyarakat lebih memilih menyimpan dananya pada instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi seperti saham, obligasi, dan emas. Sementara itu kredit tetap tumbuh walaupun mengalami perlambatan, yaitu sebesar 13,64% dari Rp79,83 triliun pada triwulan I-2009 menjadi Rp90,72 triliun pada triwulan I-2010. Perlambatan penyaluran kredit ini diindikasikan karena semakin banyaknya alternatif pembiayaan selain bank, dan sebagian pelaku usaha masih belum merealisasikan investasinya di awal tahun. Selain itu, sebagian pelaku usaha masih melakukan ekspansi usaha dengan mengandalkan keuangan sendiri (*self financing*) dari arus kas (*cash flow*) yang dimilikinya. Sementara itu, LDR perbankan Jawa Tengah mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu dari

88,57% pada triwulan I-2009 menjadi 93,46% pada triwulan I-2010. (pertumbuhan kredit < DPK)

Secara triwulanan (qtq), aset dan kredit pada triwulan I-2010 tumbuh masing-masing sebesar 0,99% dan 0,56%. DPK mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -0,61%, lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV-2009 yang sebesar 4,06%. Pada triwulan I-2010, kinerja perbankan Jawa Tengah relatif menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya siklus tahunan perbankan, dimana biasanya pada awal tahun kinerja beberapa indikator utama perbankan mengalami perlambatan pertumbuhan. Namun demikian, pada triwulan ini terjadi perbaikan terhadap kualitas kredit yang disalurkan. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan rasio NPLs dari 2,90% pada triwulan IV-2009 menjadi sebesar 2,79%. Membaiknya kualitas kredit pada triwulan I-2010 dibanding triwulan sebelumnya di antaranya diduga karena pada awal tahun terjadi pelunasan kredit yang telah jatuh tempo oleh sebagian debitur, dan ditengarai penurunan NPLs ini merupakan dampak dari pengendalian NPLs dan prinsip kehati-hatian yang dilakukan perbankan Jawa Tengah dalam mengantisipasi dampak krisis finansial global pada tahun 2009 yang lalu.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Jawa Tengah Triwulan I-2010, diketahui bahwa jumlah LKBB di Jawa Tengah cukup banyak, sangat beragam jenisnya, dan tersebar di berbagai lokasi di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil *tracking* perkembangan LKBB di wilayah Jawa Tengah yang dilakukan oleh Bank Indonesia Semarang, ditemukan bahwa porsi pembiayaan LKBB mencapai Rp14,03 triliun atau sekitar 15,48% dari total pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan Jawa Tengah. Dari data tersebut terlihat bahwa LKBB mempunyai peranan yang cukup besar dalam sistem keuangan di wilayah Jawa Tengah, dan tentunya juga mempunyai peran signifikan dalam mempengaruhi stabilitas sistem keuangan regional.

Perkembangan sistem pembayaran secara umum masih tetap dapat memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi di Jawa Tengah meskipun mengalami penurunan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yang disebabkan oleh faktor *seasonal* (musiman). Baik jumlah aliran uang masuk (*inflow*) ke KBI di wilayah Jawa Tengah, maupun aliran keluar (*outflow*), menunjukkan penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Sementara itu, nilai dan volume transaksi pembayaran non tunai melalui Bank Indonesia, yaitu Kliring dan *Real Time Gross Settlement* (RTGS), untuk wilayah Jawa Tengah pada triwulan I-2010 ini juga mengalami penurunan.

Perekonomian pada triwulan II-2010 diperkirakan tumbuh cukup baik

E. PROSPEK PEREKONOMIAN

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II-2010 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I-2010, yaitu dalam kisaran 5,55%-6,25% (yoy). Kondisi ekonomi yang cukup kondusif, seperti nilai tukar rupiah yang stabil, inflasi yang rendah serta suku bunga pinjaman yang mulai menurun nampaknya merupakan faktor positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2010.

Dari sisi sektoral, pertumbuhan tersebut didorong oleh perkembangan pada sektor pertanian, sektor industri, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Sektor pertanian diperkirakan tumbuh cukup signifikan seiring dengan mulai masuknya masa panen raya pada April dan Mei. Sementara itu, pertumbuhan sektor industri didorong oleh adanya tren peningkatan barang modal dan informasi peningkatan kapasitas produksi seiring dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi nasional maupun internasional.

Di sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga (RT) diperkirakan masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II-2010. Konsumsi RT diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,5%-6% (yoy) di triwulan II-2010, relatif sama dibandingkan triwulan I-2010. Optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian diperkirakan akan tetap mendorong pertumbuhan konsumsi RT. Optimisme tersebut didukung oleh kondisi makro ekonomi dalam negeri yang cukup positif, serta proyeksi dari berbagai lembaga yang mempunyai ekspektasi positif terhadap kondisi perekonomian ke depan.

Tekanan inflasi triwulan II-2010 diperkirakan meningkat. Faktor musiman dan permintaan diperkirakan menjadi pemicu peningkatan inflasi

Tekanan inflasi Jawa Tengah triwulan II-2010 diperkirakan akan mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya, dan laju inflasi diproyeksikan akan berada dalam kisaran 3,75%-4,25% (yoy). Tekanan inflasi triwulan II-2010 diperkirakan akan sedikit meningkat sejalan dengan naiknya tekanan dari sisi permintaan pada masa liburan pada Juni-Juli, kenaikan harga pupuk yang mulai berdampak karena mulai masuknya masa tanam pada bulan Juni, dan adanya tekanan harga dari beberapa komoditas internasional (*imported inflation*).

Faktor potensial yang diperkirakan dapat menjadi pemicu tekanan inflasi triwulan II-2010 adalah berkurangnya pasokan bahan kebutuhan pokok karena faktor musiman, seperti gula pasir, bawang merah, cabe merah dan sayuran. Di samping itu, tekanan inflasi dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) berupa masa liburan pada bulan Juni-Juli 2009 diperkirakan juga dapat memberikan tekanan harga pada beberapa komoditas. Selain itu,

kecenderungan harga minyak dunia yang diperkirakan masih cenderung meningkat pada triwulan II-2010, dikhawatirkan dapat berdampak pada kenaikan harga beberapa komoditas.

Beberapa faktor positif yang diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap inflasi pada triwulan mendatang antara lain berupa: (a) ketersediaan stok barang kebutuhan pokok yang masih mencukupi, setelah adanya masa panen pada Maret-Mei, (b) kurs rupiah yang stabil, dan (c) ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan harga yang cukup positif hingga enam bulan ke depan.



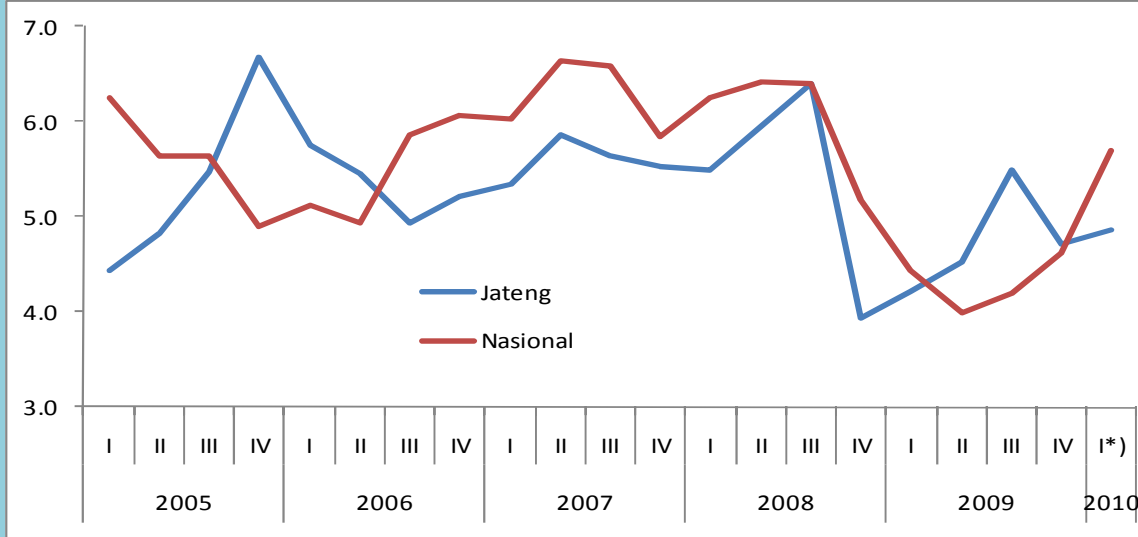
BAB 1

Perkembangan Ekonomi Makro

Perekonomian Jawa Tengah pada triwulan I-2010 diperkirakan tumbuh sebesar 4,75%–5,25% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 4,6% (yoy). Peningkatan ini diperkirakan disebabkan oleh membaiknya iklim usaha yang mendorong peningkatan sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan sektor perdagangan hotel dan restoran (PHR). **Dari sisi permintaan**, konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan ini. Hal ini terutama disebabkan oleh masih tingginya optimisme masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini serta adanya persiapan pelaksanaan Pemilukada di enam Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. **Dari sisi penawaran**, pertumbuhan pada triwulan ini terutama didorong oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) dan sektor jasa. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh KBI Semarang, optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian nasional menjadi kunci terhadap pertumbuhan ketiga sektor tersebut. Di sisi lain, sektor pertanian diperkirakan masih mengalami kontraksi¹ pertumbuhan pada triwulan ini namun sudah meningkat signifikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan mulai terjadinya panen tanaman bahan makanan (tabama) di beberapa daerah pada akhir triwulan ini, akibat kemunduran masa tanam pada triwulan sebelumnya. Sedangkan puncak masa panen raya diperkirakan terjadi pada awal triwulan berikutnya.

Secara umum, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah masih relatif cukup baik, dan masih berada dalam *tren* peningkatan pertumbuhan setelah mengalami perlambatan pada akhir tahun 2008 hingga awal tahun lalu. Namun apabila dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional, perekonomian Jawa Tengah diperkirakan tumbuh di bawah angka nasional. Hal ini disebabkan adanya sektor ekonomi yang mengalami kontraksi karena faktor siklus produksi yaitu sektor pertanian. Pada triwulan I-2010, perekonomian nasional diperkirakan mencatat angka pertumbuhan sebesar 5,7% (yoy). (**Grafik 1.1**)

¹ Kontraksi pertumbuhan adalah kondisi dimana pertumbuhan output/PDRB bernilai negatif



Sumber : BPS dan BI, diolah

Keterangan : angka pertumbuhan Tw I-10 merupakan angka proyeksi

GRAFIK 1.1.

PERKEMBANGAN PERTUMBUHAN EKONOMI

1.1. Analisis PDRB Jawa Tengah dari Sisi Permintaan

Dari sisi permintaan, semua komponen permintaan agregat diperkirakan menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan ini. Konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen terbesar PDRB diperkirakan meningkat tipis dibandingkan triwulan sebelumnya.

TABEL 1.1
PERTUMBUHAN PDRB JAWA TENGAH
MENURUT JENIS PENGGUNAAN (YOY, PERSEN)

No	Penggunaan	2008		2009			2010
		IV	I	II	III	IV*)	I**)
Pertumbuhan Year on Year							
1	Kons. Rumah Tangga	4.95	4.92	5.25	5.84	5.65	5.5 - 6.0
2	Kons. LNP	10.27	11.89	10.53	6.28	1.61	7.7 - 8.2
3	Kons. Pemerintah	8.23	7.86	8.95	11.26	15.64	12.5 - 13.0
4	P M T B	7.24	5.34	5.00	5.20	6.88	6.3 - 6.8
5	Ekspor	2.31	-10.17	-0.70	-12.13	18.43	18.7 - 19.2
6	Impor	13.03	-12.90	6.47	7.31	19.70	15.0 - 15.5
PDRB		3.94	4.21	4.53	5.49	4.57	4.75 - 5.25

Sumber : KBI Semarang dan BPS Provinsi Jawa Tengah (data PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000)

Keterangan : *) angka sementara

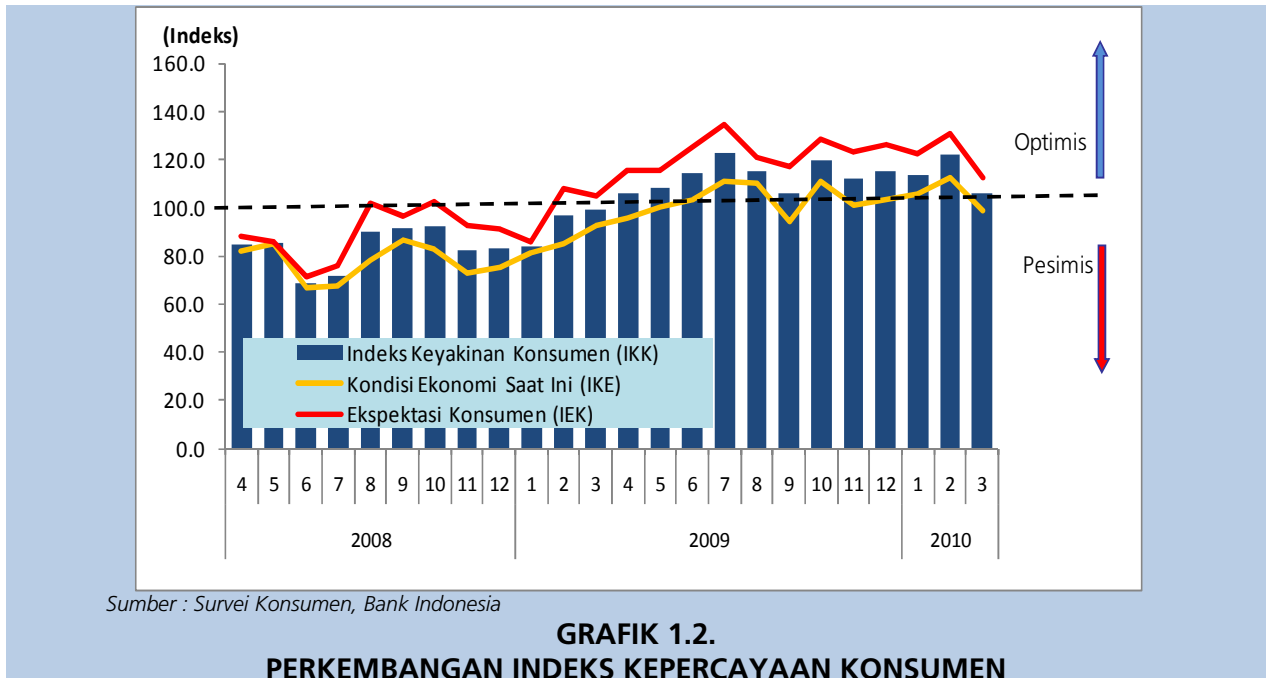
** *) angka sangat sementara (proyeksi KBI Semarang)

1.1.1. Konsumsi

Konsumsi rumah tangga pada triwulan I-2010 diperkirakan tumbuh sebesar 5,5%–6,0%, sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2009 sebesar 5,65% (yoy). Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya optimisme konsumen serta adanya persiapan pelaksanaan Pemilukada pada enam kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Kondisi perekonomian dunia saat ini cukup kondusif. Hal ini ditandai dengan membaiknya

perekonomian di negara-negara maju. Demikian pula dengan kondisi perkembangan ekonomi di tingkat nasional dan regional yang cukup positif pula. Kondisi tersebut telah menciptakan optimisme dan ekspektasi positif masyarakat terhadap kondisi perekonomian, sehingga secara tidak langsung dapat pula mendorong peningkatan konsumsi.



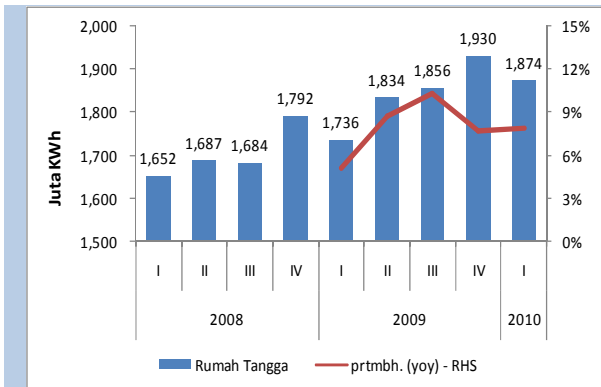
GRAFIK 1.2.
PERKEMBANGAN INDEKS KEPERCAYAAN KONSUMEN

Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut tergambar pula dari hasil Survei Konsumen yang diselenggarakan oleh Kantor Bank Indonesia Semarang sampai dengan triwulan I-2010. Dari grafik 1.2 di atas, terlihat bahwa indeks keyakinan konsumen (IKK) berada pada level yang cukup optimis². Meskipun mengalami penurunan dibandingkan triwulan IV-2009, indeks hasil survei konsumen triwulan ini tetap menunjukkan keyakinan yang positif. Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh cukup stabilnya perekonomian di level nasional, yang ditunjukkan oleh tingkat inflasi yang cukup terkendali, indeks harga saham yang meningkat, kurs Rupiah yang cukup stabil serta berbagai informasi positif lainnya.

Prompt indicator lainnya yang menunjukkan perkembangan positif konsumsi rumah tangga adalah penjualan listrik PLN segmen Rumah Tangga. (Grafik 1.3.) Konsumsi listrik rumah tangga pada triwulan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi listrik triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi tersebut juga terlihat sedikit lebih tinggi dibanding pertumbuhan triwulan sebelumnya. Hal ini dapat menjadi indikasi adanya peningkatan daya beli masyarakat terhadap kebutuhan konsumsi energi. Selain itu, **realisasi penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah**, khususnya untuk Premium dan Pertamina juga dapat menjadi *prompt indicator* untuk menggambarkan konsumsi bahan bakar masyarakat. Realisasi penerimaan pajak dari penjualan Premium dan Pertamina pada triwulan ini menunjukkan peningkatan dibanding triwulan I-2009.

² Dikatakan optimis jika angka indeks berada di atas 100 dan pesimis jika di bawah 100

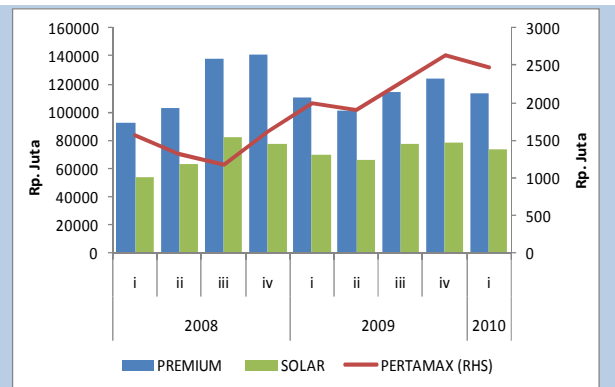
Khusus Pertamina terus memperlihatkan tren peningkatan.



Sumber : PT. PLN Distribusi Wil. Jateng&DIY

GRAFIK 1.3.

**PERKEMBANGAN PENJUALAN LISTRIK PLN
SEGMENT RUMAH TANGGA DI JAWA TENGAH**

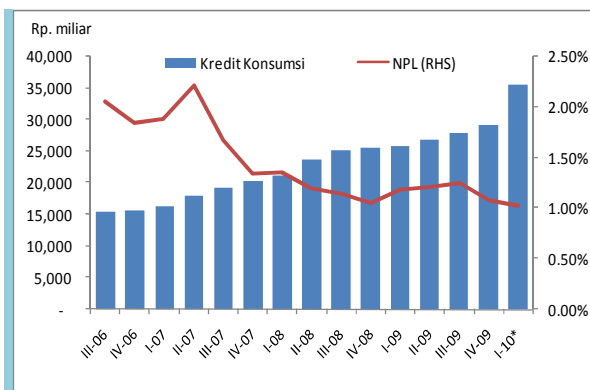


Sumber : Dinas PPAD Prov. Jateng

GRAFIK 1.4.

**PENERIMAAN PBBKB PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH**

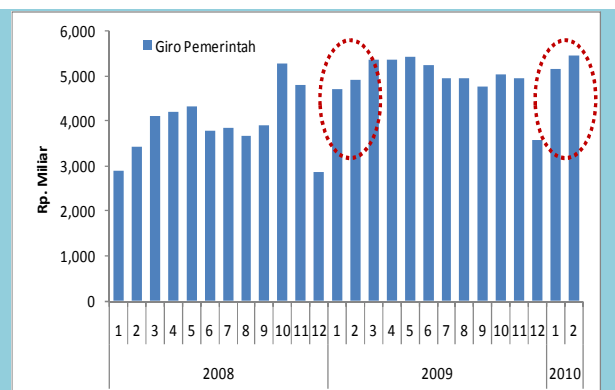
Dari sisi pembiayaan, peningkatan konsumsi rumah tangga antara lain tercermin dari pertumbuhan kredit secara triwulanan untuk jenis kredit konsumsi bank umum di Jawa Tengah (Grafik 1.5). Dari grafik tersebut terlihat bahwa kredit konsumsi yang disalurkan oleh perbankan di Jawa Tengah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Demikian pula dari sisi kualitas kredit, juga mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh menurunnya *NPLs* (kredit non lancar) kredit konsumsi di Jawa Tengah.



Sumber : Bank Indonesia

GRAFIK 1.5.

**PERKEMBANGAN KREDIT KONSUMSI
DI WILAYAH JAWA TENGAH**



Sumber : Bank Indonesia

GRAFIK 1.6.

**PERKEMBANGAN POSISI GIRO PEMERINTAH
DI WILAYAH JAWA TENGAH**

Konsumsi pemerintah pada triwulan I-2010 diperkirakan tumbuh sebesar 12,5%–13,0% (yoy), melambat dibandingkan angka pertumbuhan pada triwulan IV-2009 sebesar 15,6% (yoy). Hal tersebut disebabkan pada triwulan IV-2009 merupakan akhir masa tahun anggaran, sehingga realisasi pengeluaran pemerintah yang terjadi relatif cukup besar. Belanja rutin seperti belanja gaji pegawai diperkirakan hanya mengalami sedikit peningkatan realisasinya pada triwulan ini sedangkan belanja barang dan jasa diperkirakan masih belum optimal. Pertumbuhan positif pada triwulan ini rata-rata disebabkan oleh adanya kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah di Jawa Tengah. Selain itu pertumbuhan konsumsi

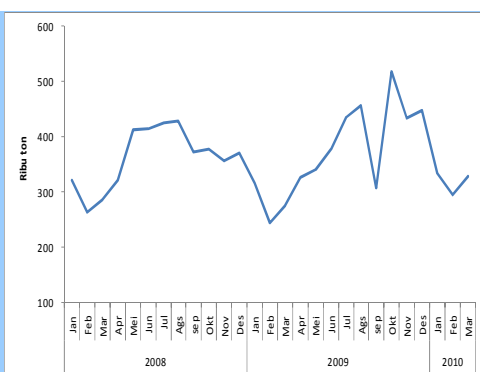
pemerintah diperkirakan juga terdorong oleh konsumsi untuk persiapan pelaksanaan Pemilukada di enam Kab/ Kota di Jawa Tengah yang berlangsung di bulan April 2010.

Pada triwulan I-2010, realisasi belanja APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah baru mencapai 8,44% dari total anggaran belanja 2010. Walaupun kondisi ini terjadi pula di wilayah lain dan berulang-ulang setiap tahunnya, namun pemerintah daerah tentunya harus memiliki perencanaan yang cermat dan matang agar target belanja yang telah ditetapkan dapat terealisasi secara tepat waktu. (**lihat bab keuangan daerah**).

Salah satu indikator yang dapat dipergunakan untuk melihat perkembangan konsumsi pemerintah adalah posisi giro milik pemerintah yang disimpan pada perbankan di Jawa Tengah. Pada **grafik 1.5** terlihat bahwa posisi giro milik pemerintah pada triwulan I-2010 menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan tersebut merupakan indikasi bahwa realisasi belanja pemerintah pada triwulan laporan jauh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Namun bila dibandingkan dengan posisi triwulan yang sama tahun sebelumnya terlihat bahwa giro milik pemerintah tahun ini mengalami peningkatan yang mengindikasikan peningkatan anggaran pemerintah.

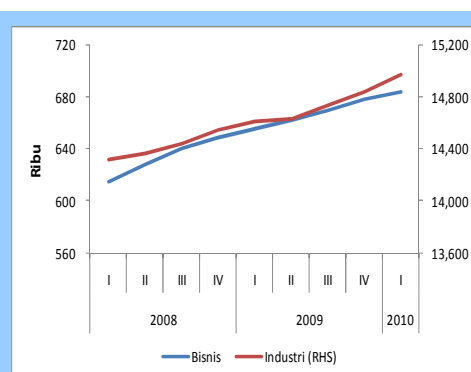
1.1.2. Investasi

Investasi yang tercermin dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada triwulan I-2010 diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 6,3%–6,8% (yoy), namun sedikit melambat bila dibandingkan dengan angka pertumbuhan investasi pada triwulan IV-2009 sebesar 6,88% (yoy). Pertumbuhan ini terutama dipengaruhi oleh membaiknya kondisi ekonomi, yang turut mendorong berbagai ekspansi usaha. Sementara itu, proyek infrastruktur besar seperti pembangunan jalan tol Semarang–Solo masih berjalan sesuai target yang ditetapkan dan diperkirakan turut menjadi penyumbang pertumbuhan investasi pada triwulan ini.



Sumber : Asosiasi Semen Indonesia

GRAFIK 1.7.
PENJUALAN SEMEN DI JAWA TENGAH

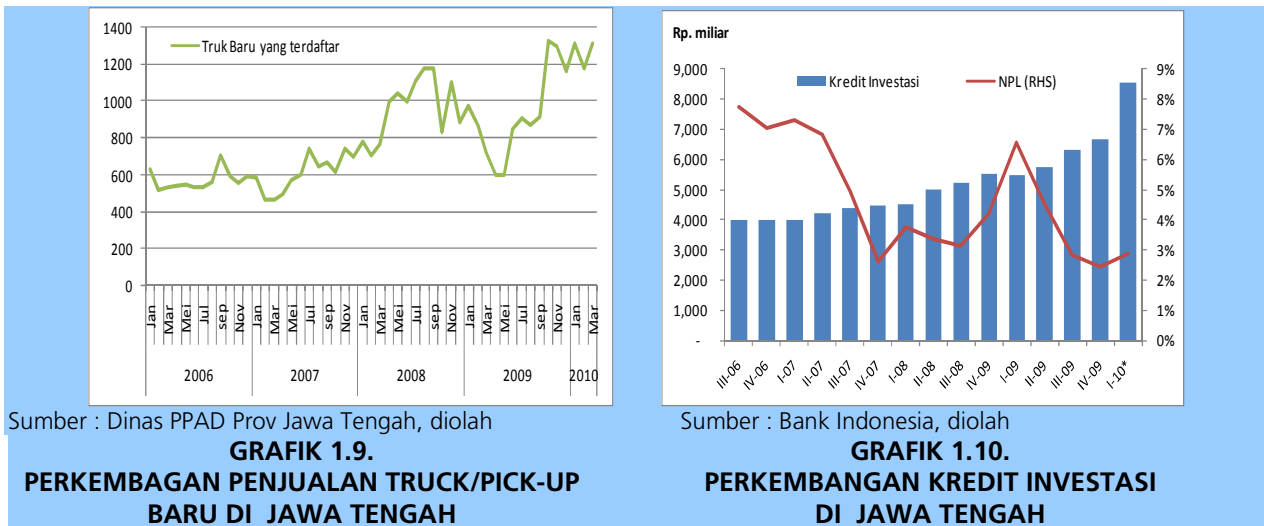


Sumber: PT. PLN Distribusi Wil. Jateng&DIY

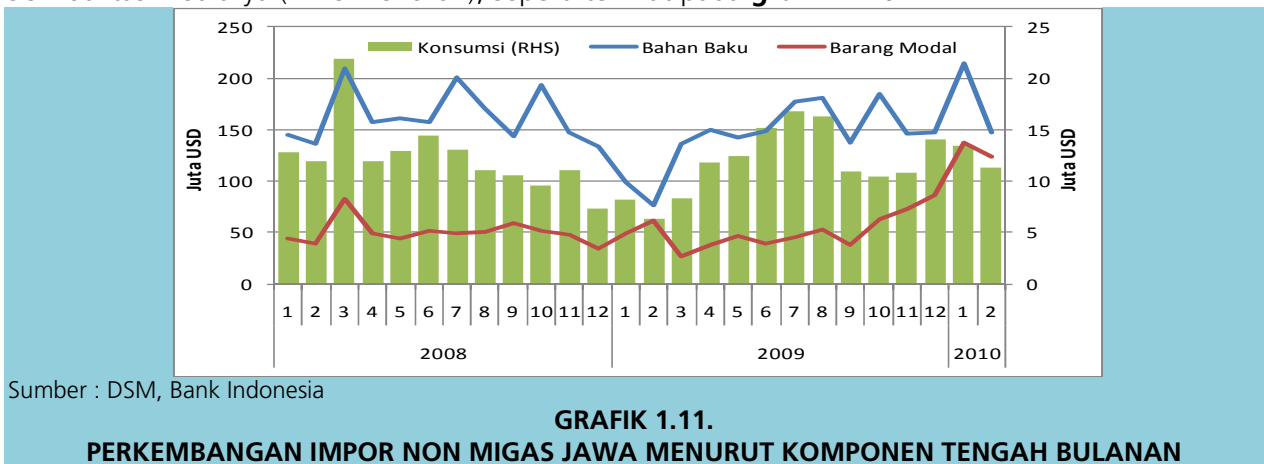
GRAFIK 1.8.
PERKEMBANGAN JUMLAH PELANGGAN PLN SEGMENT BISNIS DAN INDUSTRI DI JAWA TENGAH

Salah satu informasi yang dapat menjadi indikator pertumbuhan investasi di antaranya adalah pertumbuhan konsumsi semen di Jawa Tengah, yang menunjukkan adanya peningkatan penjualan semen pada triwulan I-2010 dibandingkan dengan triwulan yang

sama tahun sebelumnya. Pada **grafik 1.7** terlihat bahwa penjualan semen di Jawa Tengah pada triwulan I-2010 lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan semen pada triwulan I-2009. Peningkatan penjualan ini dapat menjadi indikator adanya pembangunan atau investasi baru yang lebih tinggi di tahun ini. **Prompt indicator perkembangan investasi lainnya juga dapat dilihat dari pertambahan jumlah pelanggan PLN dari sektor industri maupun bisnis**, serta sektor pemerintah yang digunakan untuk penerangan jalan umum, yang menunjukkan tren yang terus meningkat dan pertumbuhan yang positif. (**Grafik 1.8.**)



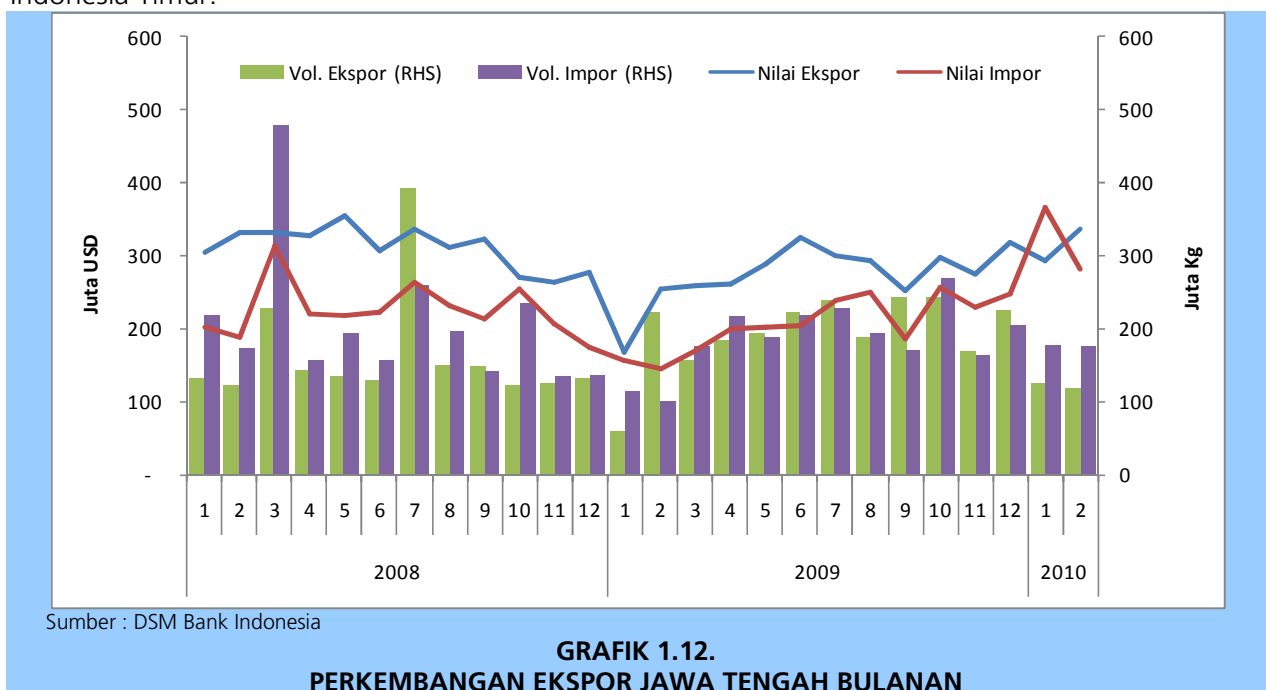
Indikator lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan perkembangan investasi adalah pembelian kendaraan angkut barang seperti truk/pick up baru. Grafik 1.9 menunjukkan perkembangan jumlah pengadaan truk baru di Jawa Tengah pada triwulan ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya serta terus menunjukkan tren peningkatan. Pembelian truk biasanya dipergunakan untuk keperluan bisnis/usaha, sehingga perkembangan penjualan truk ini dapat menjadi *proxy* peningkatan investasi. **Dari sisi pembiayaan juga terlihat bahwa posisi kredit investasi yang disalurkan oleh perbankan di Jawa tengah mengalami peningkatan dari sisi nominal**, dan mengalami perbaikan pula dari sisi kualitas kreditnya (NPLs menurun), seperti terlihat pada **grafik 1.10.**



Selain itu, data impor non migas Jawa Tengah untuk barang-barang modal³ (*Capital*) memperlihatkan tren kenaikan yang signifikan pada triwulan ini bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama tahun 2009. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang signifikan pada triwulan ini.

1.1.3. Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri (ekspor-impor dan perdagangan antar pulau) di wilayah Jawa Tengah pada triwulan I-2010 diperkirakan masih menunjukkan tren peningkatan. Perkembangan ekspor⁴ pada PDRB Jawa Tengah triwulan I-2010 diperkirakan tumbuh sebesar 18,7%-19,2% (yoy), meningkat dibandingkan angka pertumbuhan pada triwulan IV-2009 yang tumbuh sebesar 18,43% (yoy). Sementara itu impor juga tumbuh sebesar 15,0%-15,5% relatif melambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 19,70% (yoy). Pertumbuhan ekspor Jawa Tengah ini didorong oleh peningkatan perdagangan luar negeri akibat pulihnya permintaan luar negeri dan perdagangan antar daerah/pulau. Wilayah Jawa Tengah merupakan salah satu pemasok berbagai komoditas khususnya hasil pertanian ke berbagai wilayah lain di Indonesia seperti Kalimantan dan Indonesia Timur.



³ Barang-barang impor berdasarkan klasifikasi BEC dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

1. Barang modal (*Capital*) adalah barang-barang yang digunakan untuk keperluan investasi
2. Bahan baku (*Raw Material*) adalah barang-barang mentah atau setengah jadi yang akan diproses kembali oleh sektor industri
3. Konsumsi (*Consumption*) adalah kategori barang-barang jadi yang digunakan langsung untuk konsumsi baik habis pakai maupun tidak.

BEC merupakan pengklasifikasian kode barang dengan 3 digit angka, yang dikelompokkan berdasarkan kegunaan utama barang berdasarkan daya angkut komoditi tersebut.

⁴ Pengertian ekspor dan impor dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi

Sementara itu berdasarkan data ekspor dan impor yang diolah dari Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter (DSM) Bank Indonesia, kinerja ekspor non migas Jawa Tengah sampai dengan triwulan I-2010 (data sampai dengan posisi Februari 2010) tetap menunjukkan adanya tren peningkatan nilai. Sementara dari sisi volume ekspor mengalami sedikit penurunan dibanding triwulan sebelumnya.

Berdasarkan komoditasnya, ekspor unggulan Jawa Tengah masih berupa pakaian jadi, perabot furniture dan penerangan rumah, kayu dan barang dari kayu serta serat stafel. Komoditas-komoditas tersebut selama beberapa periode terakhir selalu menempati urutan teratas dari nilai ekspor Jawa Tengah. Sementara itu berdasarkan klasifikasi *Harmonized System* (HS), komoditi impor non migas terbesar di Jawa Tengah adalah kapas, mesin-mesin, mekanik dan ketel uap, serta gandum.

Sampai dengan akhir triwulan I-2010, dampak negatif diterapkannya ACFTA masih belum signifikan. Impor barang non migas yang masuk ke Jawa Tengah masih berada dalam tren peningkatan yang normal, belum terjadi lonjakan secara drastis hingga posisi Februari 2010 (**selengkapnya lihat boks 1**). Sementara itu ekspor non migas justru terus menunjukkan tren peningkatan seperti yang terlihat dalam **grafik 1.12**.

1.2. Analisis PDRB Sisi Penawaran

Dilihat dari sisi sektoral, peningkatan pertumbuhan yang terjadi pada triwulan I-2010 terjadi pada hampir seluruh sektor ekonomi. Sektor-sektor tersebut diperkirakan mengalami pertumbuhan positif, salah satu sektor ekonomi yang mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) adalah sektor pertanian, walaupun menunjukkan tren perbaikan pada triwulan ini. Berdasarkan kontribusi terhadap PDRB, sektor yang memiliki sumbangan terbesar terhadap PDRB Jawa Tengah tetap didominasi oleh tiga sektor utama dalam perekonomian Jawa Tengah, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan hotel dan restoran (PHR), dan sektor pertanian, walaupun sektor pertanian memberikan kontribusi negatif pada triwulan ini. Ketiga sektor tersebut memiliki pangsa sekitar 70% dari total PDRB Jawa Tengah, sehingga perubahan pada ketiga sektor tersebut menimbulkan pengaruh yang cukup signifikan pada arah PDRB Jawa Tengah secara keseluruhan.

TABEL 1.2.
PERTUMBUHAN PDRB JAWA TENGAH MENURUT LAPANGAN USAHA (YOY, PERSEN)

No	Lapangan Usaha	2008		2009			2010
		IV	I	II	III	IV*)	I**)
Pertumbuhan Year on Year							
1	Pertanian	13.36	9.74	4.74	7.38	-6.00	(-2.2) - (-1.7)
2	Pertambangan & Penggalian	5.70	4.96	5.40	3.93	7.65	7.0 - 7.5
3	Industri Pengolahan	-2.37	-2.38	1.09	1.73	7.02	7.0 - 7.5
4	Listrik, Gas & Air Bersih	4.04	2.60	6.39	6.53	6.57	7.0 - 7.5
5	Konstruksi & Bangunan	8.44	7.61	6.58	6.66	6.30	6.3 - 6.8
6	Perdagangan, Hotel & Restaurant	4.26	4.57	5.82	7.39	6.22	5.5 - 6.0
7	Pengangkutan & Komunikasi	6.67	7.11	7.35	6.41	6.99	5.8 - 6.3
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perush.	4.96	10.01	8.80	7.62	4.80	6.8 - 7.3
9	Jasa-Jasa	4.46	7.47	7.72	7.74	8.42	7.75 - 8.25
Total PDRB		3.94	4.21	4.53	5.49	4.57	4.75 - 5.25

Sumber : BI Semarang dan BPS Provinsi Jawa Tengah (data PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2000)

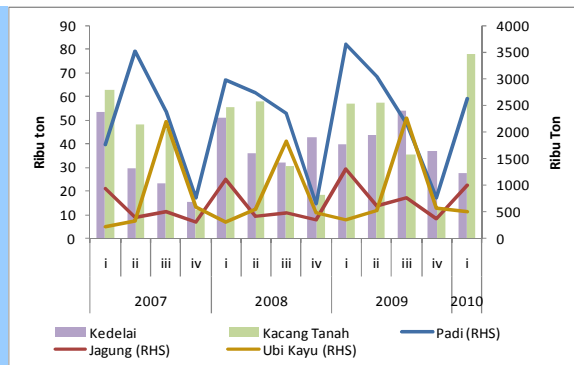
Keterangan : *) angka sementara **) angka sangat sementara (proyeksi BI Semarang)

1.2.1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian pada triwulan I-2010 diperkirakan mengalami kontraksi sebesar -2,2% s.d. -1,7% (yoy), mengalami perbaikan dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV-2009 yang tercatat kontraksi sebesar -6.0% (yoy). Kontraksi pada sektor pertanian ini disebabkan oleh kontraksi pada sub sektor tanaman bahan makanan khususnya padi, yang disebabkan pengaruh cuaca. Pola cuaca yang cukup ekstrim, yaitu musim kemarau yang terjadi relatif lebih panjang dibandingkan periode sebelumnya atau periode yang sama tahun lalu, serta adanya curah hujan ekstrim di beberapa wilayah di Jawa Tengah. Kondisi tersebut telah menyebabkan kemunduran masa tanam yang berakibat pada kemunduran masa panen pada triwulan ini. Meskipun demikian, di sebagian daerah Jawa Tengah telah mengalami panen pada akhir triwulan ini yang menyebabkan adanya peningkatan produksi pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya, sehingga kontraksi pertumbuhan mengalami koreksi yang cukup berarti. Puncak masa panen raya diperkirakan terjadi pada bulan April-Mei 2010.

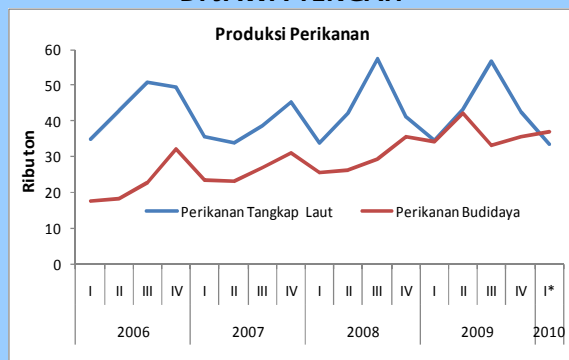
Gangguan cuaca tersebut juga menimbulkan gangguan pada subsektor perikanan, khususnya perikanan tangkap laut karena adanya ancaman angin kencang dan gelombang ombak tinggi yang menyebabkan nelayan tidak berani melaut sehingga produksi perikanan tangkap laut menurun (**Grafik 1.15**). Sebagai akibatnya, secara keseluruhan produksi sektor pertanian pada triwulan ini diperkirakan tetap mengalami kontraksi, walaupun beberapa subsektor seperti peternakan, perkebunan dan kehutanan yang mempunyai porsi relatif kecil terhadap sektor ini diperkirakan masih mengalami pertumbuhan positif (**Grafik 1.16**).

Salah satu *prompt indicator* produksi sektor pertanian, khususnya tanaman bahan makanan (tabama), dapat terlihat dari perkiraan produksi pertanian dan pertumbuhan produksi padi. Dari **grafik 1.13.** dan **grafik 1.14.** terlihat bahwa produksi komoditas sektor pertanian, terutama padi mengalami peningkatan produksi dibanding triwulan sebelumnya, namun secara tahunan (yoy) masih mengalami pertumbuhan yang negatif pada triwulan ini. Padi merupakan komoditas tabama yang memiliki bobot paling besar, sehingga produksi padi akan berpengaruh cukup signifikan terhadap produksi sub sektor tabama dan sektor pertanian secara keseluruhan.



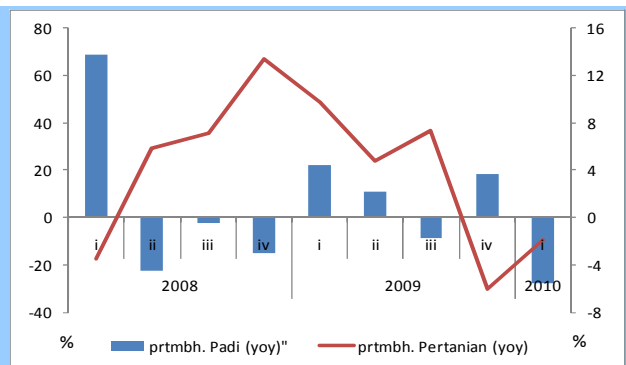
Sumber : Dinperten TPH Prov. Jateng

GRAFIK 1.13.
PERKEMBANGAN PRODUKSI TABAMA
DI JAWA TENGAH



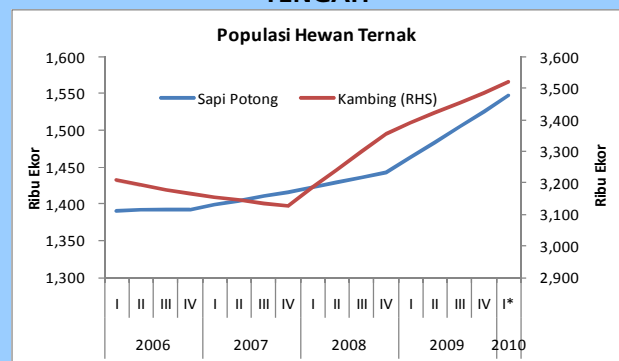
Sumber : Din. Perikanan & Kelautan Prov. Jateng, diolah
*Ket: Proyeksi Dinas Perikanan & Kelautan Prov. Jateng

GRAFIK 1.15.
PERKEMBANGAN PRODUKSI PERIKANAN
DI JAWA TENGAH



Sumber : Dinperten TPH Prov. Jateng dan BPS, diolah

GRAFIK 1.14.
PERTUMBUHAN PRODUKSI PADI DAN
PERTUMBUHAN PDRB PERTANIAN JAWA
TENGAH



Sumber : Dinnakkeswan Prov. Jateng, diolah
*Ket: Proyeksi Dinnakkeswan Prov. Jateng

GRAFIK 1.16.
POPULASI HEWAN TERNAK TERPILIH
DI JAWA TENGAH

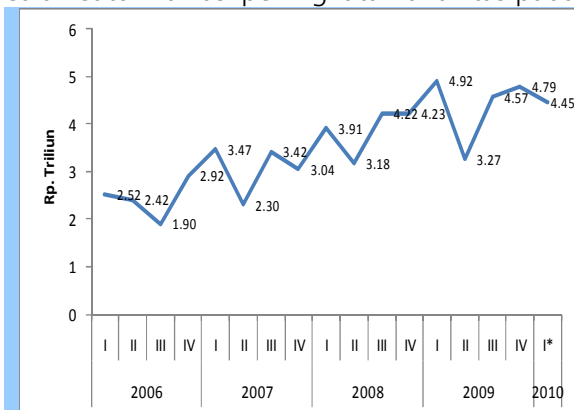
Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang strategis bagi perekonomian Jawa Tengah. Selain memiliki pangsa yang cukup besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah, sektor pertanian juga menyerap jumlah tenaga kerja yang terbesar. Jawa Tengah bersama dengan Jawa Barat dan Jawa Timur selama ini juga dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Namun demikian, sektor ini cenderung tumbuh relatif stagnan dari waktu ke waktu dan penyerapan tenaga kerjanya semakin menurun. Beberapa hambatan dalam pengembangan sektor ini di antaranya adalah sarana dan prasarana pendukung pertanian yang kurang terpelihara, menurunnya minat masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian, dan adanya persepsi bahwa sektor ini merupakan sektor yang memiliki risiko yang tinggi. Diperlukan langkah-langkah yang komprehensif antara pemerintah daerah dan berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengembangkan sektor ini.

1.2.2. Sektor Industri Pengolahan

Sektor Industri pengolahan pada triwulan I-2010 diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 7,0%-7,5% (yoy). Pertumbuhan ini disebabkan oleh tren perbaikan kondisi ekonomi makro global dan permintaan luar negeri serta peningkatan yang cukup signifikan pada permintaan domestik. Selain itu, tingginya angka pertumbuhan di sektor ini juga disebabkan oleh *base effect*⁵, karena pertumbuhan pada triwulan I-2009 mengalami kontraksi sebesar -2,38% (yoy), sehingga angka pertumbuhan triwulan ini menjadi tinggi.

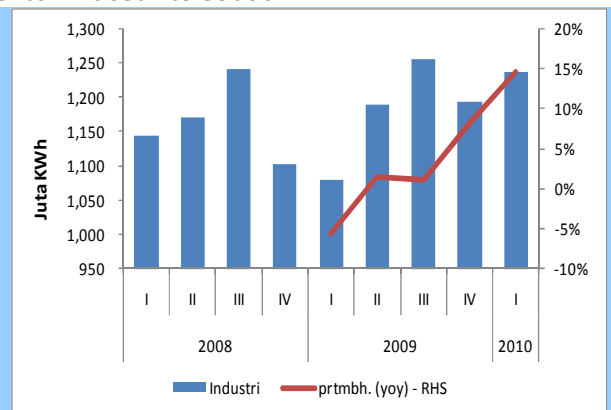
Hasil *liaison* KBI Semarang pada sektor industri pengolahan menyatakan beberapa fakta bahwa kapasitas produksi secara umum mengalami peningkatan, terutama pada subsektor industri makanan, minuman dan tembakau, subsektor industri barang kayu dan hasil hutan, dan subsektor industri lainnya. Sementara itu beberapa *contact-liaison* dalam sektor industri, khususnya alat angkut, mesin dan peralatan serta subsektor industri TPT, kulit dan alas kaki mengalami sedikit perlambatan, khususnya industri-industri UMKM yang berorientasi pasar domestik.

Salah satu *prompt indicator* dari perkembangan sektor industri pengolahan adalah perkembangan produksi subsektor industri makanan minuman dan tembakau (Grafik 1.17). Tren peningkatan penerimaan cukai rokok Jawa Tengah pada triwulan I-2010 dapat menjadi salah satu indikasi peningkatan aktivitas pada subsektor industri tersebut.



Sumber : Kanwil Dit. Jend Bea Cukai Jateng&DIY, diolah
*Ket: Data Maret 2010 masih bersifat sementara

GRAFIK 1.17
PENERIMAAN CUKAI DI JAWA TENGAH



sumber :PT. PLN Kantor Distribusi Wil. Jateng&DIY

GRAFIK 1.18
PENJUALAN LISTRIK PLN UNTUK SEGMENT INDUSTRI DI JAWA TENGAH

Prompt indicator lain dari perkembangan sektor industri pengolahan adalah perkiraan penjualan listrik di Jawa Tengah terhadap sektor industri. Data penjualan listrik PLN Jawa Tengah untuk segmen industri menunjukkan adanya peningkatan pada triwulan ini. Listrik merupakan salah satu input utama yang dipergunakan oleh sebagian besar industri di Jawa Tengah. Sehingga peningkatan penjualan listrik terhadap sektor industri tersebut merupakan indikasi pula adanya perkembangan positif pada sektor industri (Grafik 1.18). Data impor bahan baku⁶ (*raw material*) juga menunjukkan tren peningkatan pada triwulan ini yang

⁵ *Base effect* adalah efek kenaikan/penurunan nilai pertumbuhan yang cukup tinggi sebagai akibat dari nilai level variabel yang dijadikan dasar perhitungan/perbandingan mempunyai nilai yang cukup rendah/tinggi.

⁶ Lihat catatan kaki No. 3.

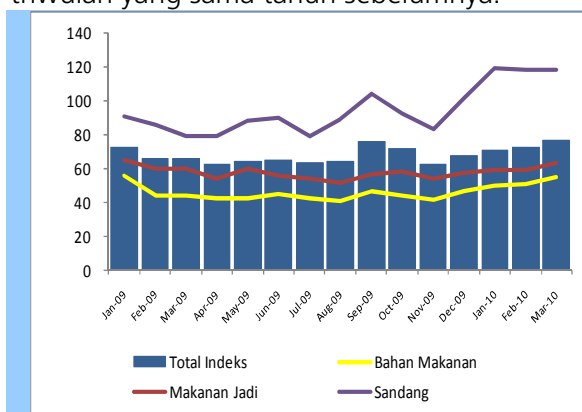
mengindikasikan adanya gairah dunia industri untuk memproduksi barang lebih banyak, atau dapat pula menunjukkan peningkatan kapasitas produksi disektor industri (**Grafik 1.11**).

Sektor industri merupakan sektor terpenting dalam perekonomian Jawa Tengah, karena selain memiliki pangsa terbesar dalam PDRB Jawa Tengah, sektor industri juga memiliki peran yang cukup signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu sebesar 17% (Sakernas BPS, 2009). Sehingga perhatian khusus perlu diberikan pada sektor ini jika ingin memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi regional.

1.2.3. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran (PHR)

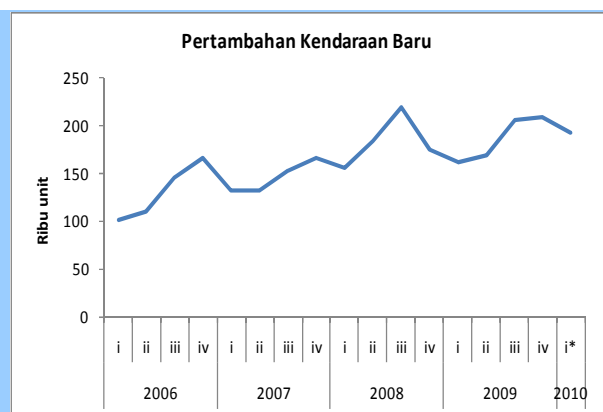
Pada triwulan I-2010 sektor PHR diperkirakan tumbuh sebesar 5,5% - 6,0% (yoy), sedikit melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV-2009 yang tercatat sebesar 6,22% (yoy). Walaupun mengalami sedikit perlambatan, pertumbuhan sektor PHR pada triwulan ini relatif cukup baik, yang didorong oleh adanya kegiatan besar khusus, yaitu pelaksanaan Pemilukada pada sejumlah Kab./Kota di Jawa Tengah.

Prompt indicator dari perkembangan sektor ini dapat dilihat dari hasil Survei Perdagangan Eceran (SPE) yang dilakukan Bank Indonesia dan jumlah kendaraan baru yang terdaftar di wilayah Jawa Tengah pada triwulan I-2009 (**Grafik 1.19. dan 1.20.**). Indeks Perdagangan Eceran hasil Survei Perdagangan Eceran (SPE) yang dilakukan di beberapa pusat perbelanjaan di Semarang menunjukkan bahwa perkembangan indeks perdagangan eceran menunjukkan tren peningkatan. Sementara jumlah kendaraan baru yang terdaftar di Jawa Tengah yang ditunjukkan oleh realisasi obyek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru (PBBNKB I) juga menunjukkan tren peningkatan pada triwulan ini. Walaupun sedikit menurun dibanding triwulan sebelumnya, obyek pajak ini berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan posisi triwulan yang sama tahun sebelumnya.



Sumber : SPE Bank Indonesia Semarang

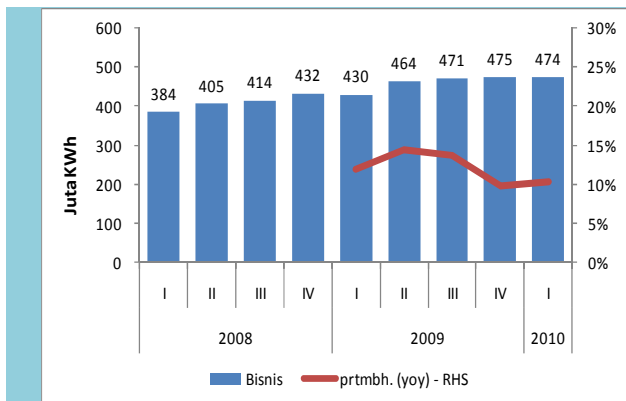
GRAFIK 1.19.
PERKEMBANGAN INDEKS RIIL
PENJUALAN ECERAN



Sumber : Dinas PPAD Prov Jawa Tengah

GRAFIK 1.20.
PENAMBAHAN JUMLAH KENDARAAN BARU
YANG TERDAFTAR DI JAWA TENGAH

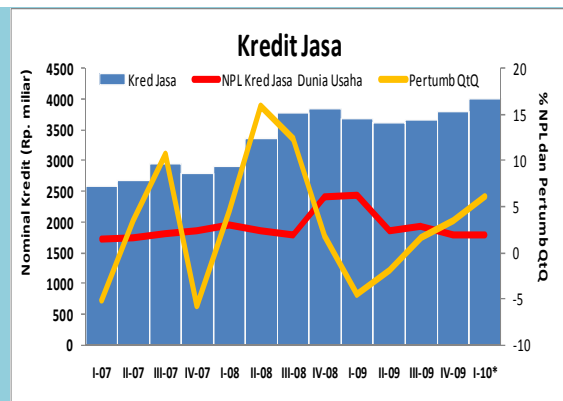
Selain *prompt indicator* di atas, data penjualan listrik pada sektor bisnis yang mencakup usaha pertokoan, hotel dan restoran menunjukkan bahwa penjualan listrik untuk segmen bisnis masih mencatatkan angka pertumbuhan yang positif pada triwulan ini (**Grafik 1.21**). Kondisi tersebut menunjukkan indikasi bahwa terdapat perkembangan yang positif pada sektor ini.



Sumber : PT. PLN Kantor Distribusi Wil. Jateng&DIY

GRAFIK 1.21.

PENJUALAN LISTRIK PLN SEGMENT BISNIS DI JAWA TENGAH



Sumber: LBU, Bank Indonesia

GRAFIK 1.22.

PERKEMBANGAN KREDIT SEKTOR JASA DI JAWA TENGAH

1.2.4. Sektor Jasa

Sektor jasa-jasa pada triwulan ini diperkirakan tumbuh sebesar **7,75% - 8,25% (yoy)**, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan IV-2009 yang tercatat sebesar **8,42% (yoy)**. Perlambatan ini diperkirakan karena perkembangan sub sektor jasa pemerintahan terutama belanja pemerintah daerah yang masih relatif minim realisasinya. Sementara itu untuk sub sektor jasa swasta diperkirakan tumbuh relatif stabil sehingga pertumbuhan sektor ini relatif tetap tinggi.

Salah satu *prompt indicator* pertumbuhan sektor ini dapat dilihat dari perkembangan kredit sektor jasa oleh perbankan di Jawa Tengah. Dari grafik 1.22 di atas terlihat bahwa penyaluran kredit jasa mengalami peningkatan dari sisi nominal dan dari sisi kualitas yang terlihat dari rasio NPLs menunjukkan level yang relatif stabil.

1.2.5. Sektor Lainnya

Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan pada triwulan I-2010 diperkirakan tumbuh sebesar **6,8%–7,3% (yoy)**. Meningkat bila dibandingkan dengan angka pertumbuhan pada triwulan IV-2009 yang tercatat sebesar 4,80% (yoy).

Pertumbuhan kredit perbankan pada triwulan I-2010 tercatat sebesar 13,64% (yoy), meningkat tipis dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya yg tercatat sebesar 13,59%. Pertumbuhan kredit yang positif pada triwulan ini juga banyak dipengaruhi perlambatan kredit akibat krisis global yang terjadi pada awal tahun silam yang menyebabkan ekspansi kredit banyak tertekan. Sehingga walaupun masih berada di awal tahun, perkembangan kredit triwulan ini masih tumbuh relatif cukup baik.

TABEL 1.3
PERKEMBANGAN KEGIATAN BANK (RP MILIAR)

INDIKATOR	I-09	II-09	III-09	IV-09	I-10*	GROWTH I-10	
						yoy	qtq
Total Asset - Total	113,259	116,051	121,918	125,830	127,072	12.20%	0.99%
DPK - Total	90,139	92,260	93,852	97,661	97,066	7.68%	-0.61%
Kredit - Total	79,835	82,670	85,961	90,214	90,722	13.64%	0.56%
LDR - Perbankan (%)	88.57	89.61	91.59	92.37	93.46		
NPL -Perbankan (%)	4.17	3.87	3.40	2.90	2.79		

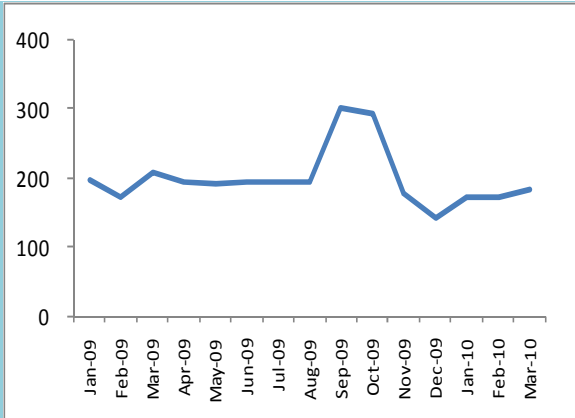
Sumber : LBU dan LBPR, Bank Indonesia

* Keterangan: Data posisi Februari 2010, masih bersifat sementara

Secara umum kinerja sub sektor perbankan masih tumbuh cukup baik dan stabil. Beberapa indikator kinerja perbankan, seperti dana pihak ketiga, *outstanding* kredit, LDR (*loan to deposit ratio*) serta kualitas kredit yang tercermin dari rasio NPL (*non performing loans*) masih relatif cukup baik (Tabel 1.3).

Pada periode triwulan I-2010, sektor Konstruksi dan bangunan diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar 6,3%-6,8% (yoy), relatif stabil bila dibandingkan angka pertumbuhan triwulan IV-2009 sebesar 6,30% (yoy). Perkembangan sektor ini sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, pemeliharaan jalan dan beberapa bangunan sarana publik lainnya. Proyek jalan tol Semarang-Solo diperkirakan masih menjadi pendorong sektor ini. Sampai saat ini, pengerjaan ruas jalan tol Semarang-Ungaran masih sesuai jadwal dari yang ditargetkan selesai pada bulan Juli 2010. Sedangkan ruas berikutnya yaitu Ungaran-Bawen masih dalam proses pembebasan tanah. **Prompt indikator perkembangan sektor ini dapat dilihat pada Grafik 1.7** yang memperlihatkan bahwa konsumsi semen pada triwulan ini relatif lebih tinggi dibanding konsumsi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya.

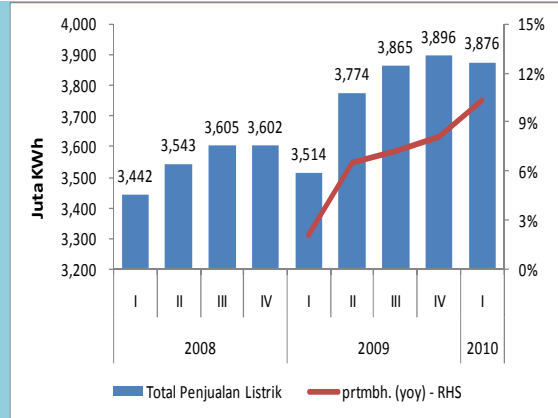
Sektor pengangkutan dan komunikasi pada triwulan I-2010 diperkirakan tumbuh sebesar 5,8%-6,3% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan IV-2009 yang sebesar 6,99% (yoy). Peningkatan ini terutama disumbang oleh kegiatan subsektor telekomunikasi terkait dengan peningkatan kegiatan operator selular. Data yang dapat menjadi indikator perkembangan sektor ini adalah hasil indeks survei penjualan eceran sektor transportasi dan komunikasi, dimana indeks penjualan eceran riil di sektor tersebut terlihat stabil pada triwulan I-2010 (**Grafik 1.23**). **Sedangkan salah satu prompt indikator yang menunjukkan peningkatan subsektor pengangkutan adalah realisasi penerimaan PBBKB pemerintah daerah khususnya untuk BBM jenis Solar**, yang memperlihatkan adanya kenaikan di triwulan ini bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya (**Grafik 1.4**). Peningkatan penjualan Solar dapat menjadi indikasi peningkatan kegiatan di subsektor pengangkutan darat, karena mayoritas kegiatan pengangkutan darat menggunakan bahan bakar Solar.



Sumber : SPE, Kantor Bank Indonesia Semarang

GRAFIK 1.23.

PERKEMBANGAN INDEKS RIIL PENJUALAN ECERAN SEKTOR TRANSPORTASI DAN KOMUNIKASI



Sumber : PT. PLN Distribusi Wil. Jateng&DIY, diolah

GRAFIK 1.24.

PENJUALAN LISTRIK PLN JAWA TENGAH

Sektor listrik, gas dan air (LGA) diperkirakan mengalami pertumbuhan sebesar **7,0%-7,5% (yoy)**, meningkat dibanding pertumbuhan triwulan IV-2009 sebesar **6,57% (yoy)**. Peningkatan kegiatan industri diperkirakan menjadi salah satu pendorong peningkatan sektor ini, terutama sub sektor listrik. Sementara itu sub sektor air bersih diperkirakan masih tumbuh stabil dibandingkan triwulan sebelumnya. **Prompt indicator** dari perkembangan sektor ini di antaranya adalah perkiraan penjualan listrik oleh PLN, sebagaimana terlihat dari grafik 1.24 yang menunjukkan adanya tren peningkatan yang cukup signifikan.



BOKS I

PEMETAAN DAN ANALISIS KOMODITAS MEBEL DAN BAGIAN-BAGIANNYA DI JAWA TENGAH DALAM MENGHADAPI PERDAGANGAN BEBAS ASEAN-CHINA 2010 : "Kondisi Saat ini serta Peluang dan Ancamannya ke Depan"

1. LATAR BELAKANG

Kerjasama Perdagangan Internasional saat ini telah menjadi bagian dari tata kehidupan dan kelola ekonomi negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Berbagai bentuk kerjasama dalam tingkatan bilateral, regional dan multilateral telah terlaksana. Dalam perkembangannya, implementasi perdagangan bebas yang tertuang dalam *Free Trade Agreement* (FTA) dalam kerangka kerjasama regional dan bilateral menjadi lebih mudah terlaksana dibandingkan dengan liberalisasi perdagangan multilateral. Pada tahun 2002, para kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dengan China menandatangani kesepakatan kerjasama perdagangan antara ASEAN dengan China dalam bentuk *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China*. Kesepakatan tersebut menandai dimulainya kerjasama FTA antara ASEAN dengan China yaitu ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) yang secara umum pelaksanaannya mulai efektif diberlakukannya penurunan tariff hingga 0% untuk produk dengan muatan ASEAN-China sebesar 40% pada tahun 2010.

Jawa Tengah secara otomatis akan terpengaruh dengan kebijakan perdagangan internasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut akan mempengaruhi perekonomian Jawa Tengah secara keseluruhan. Secara umum daya saing produk yang rendah menjadi tantangan terberat yang harus di selesaikan sehingga dapat menikmati manfaat yang lebih besar dari penerapan FTA semacam ini. Sisi positif dari penurunan hambatan perdagangan adalah penciptaan tekanan kompetitif dan transfer teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jika dapat memanfaatkan potensi keunggulan komparatif yang dimiliki. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab peluang dan tantangan Jawa Tengah terhadap penerapan FTA semacam ini.

2. TUJUAN

Tujuan dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan (*mapping*) atau identifikasi yang ditinjau dari berbagai aspek terhadap kondisi industri/bisnis komoditas mebel dan bagian-bagiannya di Jawa Tengah saat ini.
2. Memperoleh informasi mengenai faktor penghambat (permasalahan) yang dihadapi dalam pengembangan ekspor komoditas mebel dan bagian-bagiannya di Jawa Tengah pada saat ini.
3. Melakukan analisis dampak (peluang atau ancaman) terhadap komoditas mebel dan bagian-bagiannya di Jawa Tengah dengan adanya ACFTA.
4. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam

upaya mengembangkan industri produk unggulan Indonesia dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode *Quick survey*, menggunakan kuesioner baku yang disebarakan kepada sejumlah responden tertentu yang mewakili populasi industri komoditas mebel dan bagian-bagiannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan *quick research* kepada 60 pengusaha mebel di Jateng, serta *liaison* dan diskusi kepada perusahaan mebel serta Asosiasi Mebel Indonesia (Asmindo) Jawa Tengah dan Komisariat Daerah (Komda) Jepara, diperoleh beberapa informasi sbb.:

- ASPEK PASAR
 - Rata-rata volume dan nilai penjualan dari responden adalah sebanyak 2 – 3 kontainer per bulan, dengan nilai penjualan berkisar antara Rp10 juta Rupiah sampai Rp 1 miliar Rupiah per bulan.
 - Rata-rata volume dan nilai ekspor perusahaan mebel di Jawa Tengah hampir sama dengan nilai dan volume penjualan, karena sebagian besar responden berorientasi ke pasar ekspor.
 - Pangsa ekspor rata-rata 60% dan pangsa pasar domestik 40%.
 - Negara tujuan utama ekspor yaitu Amerika, Eropa (Belanda, Italy, Perancis, dan Jerman) dan Australia
 - Negara pesaing utama adalah Cina, Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
- ASPEK PRODUKSI
 - Produksi mebel Jawa Tengah tidak pernah dalam kondisi *full capacity*. Hal ini terjadi karena sebagian besar produk adalah *meet to order* sehingga sangat tergantung dengan siklus permintaan.
 - Produsen mebel di Jawa Tengah jarang menimbun stok produksi, karena cepatnya perubahan *design* produk dan spesifikasi dari pada pemesan yang sebagian besar untuk di ekspor.
 - Rata-rata usia mesin produksi sudah cukup lama yaitu sekitar 5 – 10 tahun, namun masih dalam kondisi yang bagus dan mampu memproduksi sesuai kapasitasnya.
 - Produksi mebel Jawa Tengah mempunyai keunikan tersendiri dalam desain produknya, yaitu penuh dengan ukir-ukiran dan sangat ditopang oleh keahlian manusia (*hand made*) sehingga relatif mampu bersaing dengan produksi dengan skala ekonomi besar (*mass production*) yang tidak terkesan eksklusif. Keunikan tersebut yang menjadi salah satu nilai tambah dalam produk mebel Jawa Tengah.
 - Sebagian besar perusahaan mebel di Jawa Tengah bersifat padat karya, sehingga biaya tenaga kerja menjadi komponen yang cukup besar dalam struktur pembentukan biaya, yaitu 20%-30%. Biaya bahan baku mempunyai porsi terbesar dari pembentukan struktur biaya, yaitu sebesar 50%.
- ASPEK INPUT
 - Sebagian responden menyatakan bahwa bahan baku produksi diperoleh dari dalam

negeri. Menurut sebagian besar responden, penggunaan bahan baku impor mempunyai pangsa sebesar 0% - 25%, dan didatangkan dari benua Asia dan Australia.

- Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan mebel di Jawa Tengah antara lain kayu (jati, mahoni, rotan, dan oak), busa dan kain, besi/kuningan, bahan finishing (lem, pelitur, cat, dll).
- ASPEK PERMODALAN DAN PEMBIAYAAN
 - Sebagian besar responden (94,92%) menggunakan permodalan dari dalam negeri (PMDN).
 - Sebagian besar responden masih menggunakan pembiayaan dari kredit perbankan dengan pangsa 0% – 50% dari keseluruhan pembiayaan.

Secara singkat, dapat dilakukan analisis dengan metode *Strength, Weakness, Opportunity, Threat* (SWOT) sbb:

Kekuatan	Kelemahan
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya keunikan dalam produk furniture Indonesia, terutama <i>hand made furniture</i> - Tersedianya jumlah tenaga kerja yang memadai - Tersedianya sumber bahan baku alternatif - Ditetapkannya industri furniture sebagai salah satu industri prioritas dalam pengembangan industri nasional - Tingginya kemampuan industri furniture dalam penyerapan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya tingkat efisiensi dan produktivitas industri furniture nasional - Belum adanya Standar Pengerjaan Produk Furniture secara nasional yang menunjang konsistensi produk - Masih kurang optimalnya dukungan <i>Research and Development</i> - Lemahnya kemampuan finishing produk - Masih adanya kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku - Terbatasnya kemampuan <i>market intelligent</i> dan promosi - Pada umumnya, industri furniture tidak memiliki sumber bahan baku sendiri - Kurang tersedianya <i>database</i>, informasi potensi dan penyebaran bahan baku
Peluang	Ancaman
<ul style="list-style-type: none"> - Adanya peluang pasar yang cukup besar, baik di dalam negeri maupun di dunia internasional - Tersedianya tenaga terampil yang belum dimanfaatkan secara optimal - Adanya potensi bahan baku kayu dan non kayu (alternatif) yang belum termanfaatkan secara optimal - Masih tingginya apresiasi pasar terhadap produk Indonesia terutama untuk kelas <i>medium</i> dan <i>high-end</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya boikot terhadap kayu tropis dan tuntutan ecolabel dari lembaga pencinta lingkungan yang mempengaruhi pembeli besar (<i>big buyer</i>) di negara importir - Munculnya pesaing baru yang potensial seperti China, Malaysia, Vietnam dan Thailand. - Pembajakan tenaga kerja trampil - Kurang tersedianya skema kredit bagi industri furniture - Masih adanya regulasi yang kontra produktif terhadap pengembangan industri furniture

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil survei yang dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum industri mebel di Jawa Tengah hingga saat ini belum merasakan dampak yang signifikan dari implementasi ACFTA. Namun demikian, para pelaku usaha tersebut menekankan perlunya mewaspadai dampak ACFTA di masa mendatang supaya dapat melakukan langkah antisipasi untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul. Oleh karena itu, beberapa langkah yang dapat diambil untuk menghadapi ACFTA, khususnya bagi industri mebel adalah:

1. Pemerintah hendaknya membuat regulasi dan peraturan yang memihak pengusaha mebel lokal. Dalam hal ini antara lain mempermudah syarat ekspor & memfasilitasi promosi, meninjau ulang regulasi pajak, dan menurunkan suku bunga kredit.
2. Tersedianya energi listrik yang cukup dan berkelanjutan harus segera diwujudkan
3. Pemerintah dapat lebih memfasilitasi dalam penyediaan bahan baku yang berkualitas dan menekan harga bahan baku
4. Penurunan suku bunga kredit



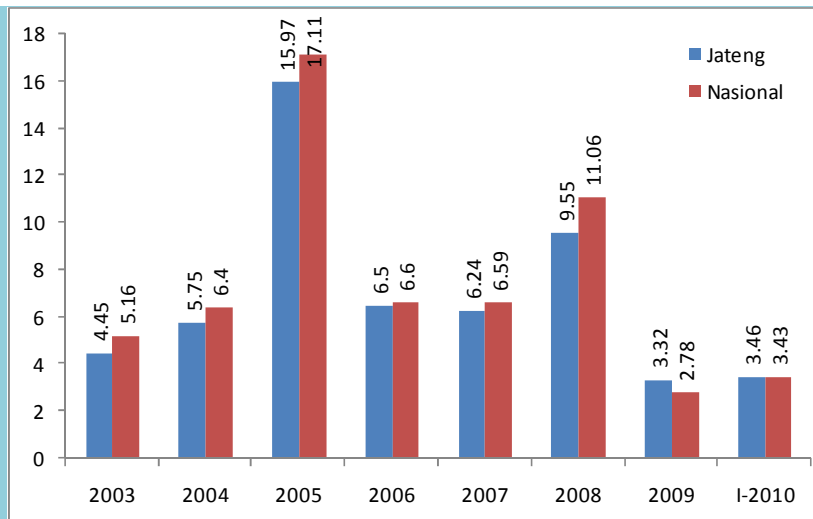
Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 2

Perkembangan Inflasi

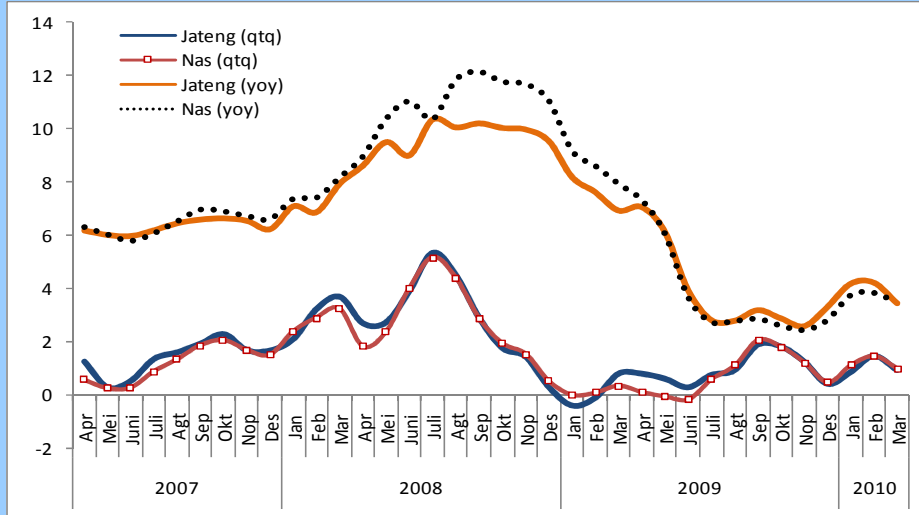
Tekanan terhadap harga-harga di Jawa Tengah pada triwulan I-2010 mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan IV-2009, baik secara tahunan (yoy) maupun secara kuartalan (qtq). Inflasi tahunan pada triwulan laporan tercatat sebesar 3,46% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya sebesar 3,32%. Sementara itu, apabila dihitung secara kuartalan (qtq), inflasi di Jawa Tengah pada triwulan I-2010 adalah sebesar 0,91% (qtq), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,39%. Sumber tekanan inflasi secara tahunan maupun kuartalan terutama berasal dari kelompok makanan jadi dan kelompok bahan makanan.

Secara umum, inflasi Jawa Tengah pada triwulan I-2010 mengalami peningkatan, namun masih relatif rendah dan terkendali. Dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi tahunan (yoy) Jawa Tengah triwulan I-2010 tercatat sedikit lebih tinggi dari angka inflasi nasional yang sebesar 3,43% (yoy). Apabila dilihat secara kuartalan (qtq), inflasi Jawa Tengah tercatat lebih rendah dari inflasi kuartalan nasional yang tercatat sebesar 0,99% (qtq). Sebagai perbandingan, laju inflasi Jateng dalam lima tahun terakhir (2003-2008) selalu berada di bawah inflasi nasional, sedangkan inflasi pada tahun 2009 dan triwulan I-2010 cenderung lebih tinggi dari inflasi nasional (lihat Grafik 2.1. dan Grafik 2.2.).



Sumber: BPS

GRAFIK 2.1
INFLASI JAWA TENGAH DIBANDINGKAN NASIONAL



Sumber: BPS, diolah

GRAFIK 2.2.
PERKEMBANGAN INFLASI TAHUNAN (YOY) DAN KUARTALAN (QTQ)
JAWA TENGAH DAN NASIONAL

Melihat perkembangan inflasi tahunan Jawa Tengah yang lebih tinggi dari inflasi nasional tersebut, maka pengendalian inflasi di Jawa Tengah perlu menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah, Bank Indonesia dan instansi terkait lainnya. Hal ini juga sejalan dengan salah satu butir instruksi Presiden pada acara Raker Presiden dengan para Menteri dan Gubernur Se-Indonesia di Tampak Siring, Bali, dimana dalam butir instruksi kelimanya yaitu Stabilitas Ekonomi Tetap Terjaga, Presiden menekankan pentingnya menjaga agar tingkat inflasi stabil salah satunya dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah di 28 kota (dari target 66 kota, sudah terbentuk di 38 kota) serta supaya berkoordinasi dengan produsen dan pedagang. Selain itu, ditekankan pula pentingnya koordinasi Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah. Oleh karena itu, peran TPPH Jawa Tengah perlu dioptimalkan dalam memantau dan mengendalikan stabilitas harga barang dan jasa pada tahun 2010. Dengan menjaga laju inflasi dalam level yang rendah dan stabil, diharapkan dapat memberikan kenyamanan berusaha dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah.

2.1. Inflasi Berdasarkan Kelompok

Inflasi berdasarkan kelompok barang pada triwulan I-2010 menunjukkan bahwa komoditas *volatile foods* dalam kelompok makanan jadi dan kelompok bahan makanan menjadi penyumbang inflasi terbesar di antara semua kelompok komoditas.

2.1.1. Inflasi Kuartalan (qtq)

Secara kuartalan, semua kelompok barang dan jasa memberikan andil inflasi di triwulan I-2010. Kelompok barang dan jasa yang mengalami kenaikan harga tertinggi pada triwulan ini terjadi pada kelompok makanan jadi (2,06%), diikuti oleh kelompok bahan makanan dan kelompok perumahan masing-masing sebesar 1,16% dan 0,54% (lihat Tabel 2.1.).

TABEL 2.1.
INFLASI JAWA TENGAH KUARTALAN
BERDASARKAN KELOMPOK BARANG DAN JASA (PERSEN; QTQ)

NO	KELOMPOK	Des-08	Mar-09	Des-09	Mar-10
	UMUM / TOTAL	0.28	0.77	0.39	0.91
1	BAHAN MAKANAN	0.07	1.73	-0.77	1.16
2	MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	0.92	1.80	1.18	2.06
3	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BHN BAKAR	1.77	1.83	0.99	0.54
4	SANDANG	1.76	3.34	1.53	0.25
5	KESEHATAN	2.56	1.90	0.65	0.22
6	PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA	0.84	0.12	0.01	0.14
7	TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	-3.92	-4.56	-0.31	0.47

Sumber : BPS, diolah

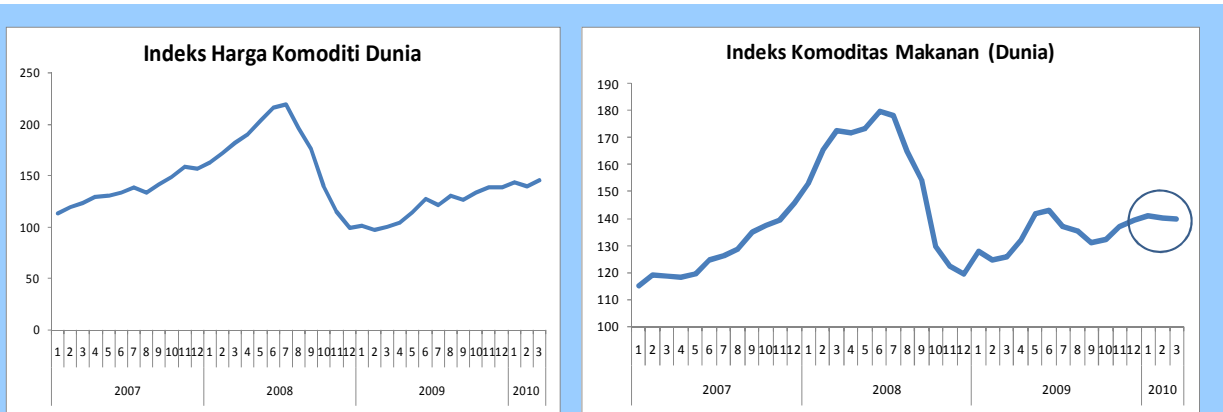
Berikut ini adalah uraian perkembangan lima kelompok barang dan jasa yang memberikan sumbangan inflasi terbesar, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, kelompok sandang, kelompok perumahan, dan kelompok transpor.

a. Kelompok Bahan Makanan

Kelompok bahan makanan mengalami perubahan IHK yang meningkat pada triwulan ini dibandingkan triwulan sebelumnya. Peningkatan IHK kelompok bahan makanan terutama disebabkan oleh peningkatan IHK subkelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya (5,93%), subkelompok lemak dan minyak (5,26%), dan subkelompok sayur-sayuran (1,04%). Sementara itu, subkelompok yang mengalami penurunan IHK antara lain subkelompok bumbu-bumbuan (-6,02%), subkelompok ikan segar (-1,90%), subkelompok buah-buahan (-0,87%), serta subkelompok daging dan hasilnya (-0,57%). Beberapa komoditas yang memberikan sumbangan inflasi dalam kelompok bahan makanan antara lain beras, minyak goreng, tomat sayur, bawang merah, danangka muda. Sedangkan komoditas yang memberikan sumbangan deflasi dalam triwulan ini antara lain adalah telur ayam ras, bawang putih, cabe merah dan cabe hijau.

Naiknya tekanan harga bahan makanan dalam triwulan I-2010 antara lain disebabkan oleh belum masuknya masa panen sehingga berpengaruh pada pasokan bahan makanan, khususnya beras dan sayuran. Kondisi ini juga berpengaruh pada stok beras di Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Jawa Tengah, yang biasanya mampu untuk memenuhi konsumsi masyarakat kelas bawah selama 10 bulan ke depan, sehingga kemampuan stok beras pada triwulan I-2010 menjadi sekitar enam bulan ke depan.

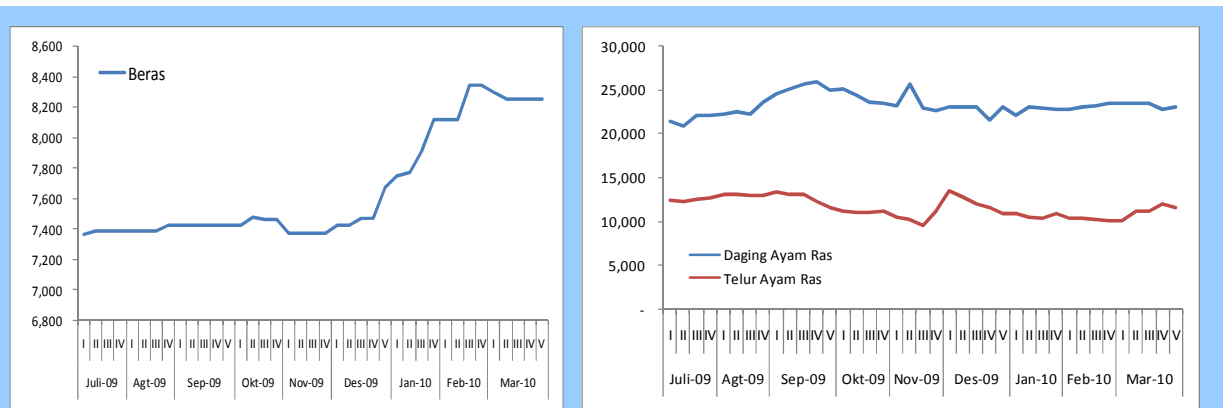
Kenaikan indeks harga bahan makanan ini lebih dipengaruhi oleh faktor domestik (musiman), sedangkan pengaruh harga komoditas pangan dunia relatif minim. Hal itu terlihat dari stabilnya indeks harga komoditas dunia secara umum maupun indeks komoditas makanan di dunia pada triwulan I-2010 (lihat Grafik 2.3.). Berdasarkan Survei Pemantauan Harga (SPH) KBI Semarang, harga komoditas beras pada triwulan I-2010 cenderung mengalami peningkatan meskipun kembali menurun pada akhir triwulan I-2010, karena beberapa daerah sudah memasuki masa panen (Grafik 2.4.). Namun, komoditas beras masih menjadi salah satu penyebab naiknya IHK kelompok bahan makanan pada triwulan I-2010.



Sumber: IMF

Sumber: IMF

GRAFIK 2.3.
PERKEMBANGAN INDEKS HARGA KOMODITI DUNIA



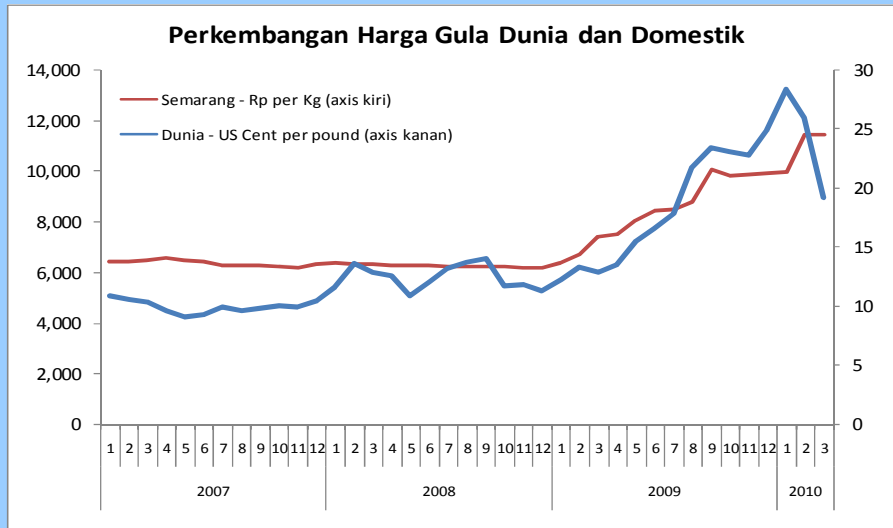
Sumber: SPH KBI Semarang

Sumber: SPH KBI Semarang

GRAFIK 2.4.
PERKEMBANGAN HARGA BEBERAPA KOMODITI BAHAN MAKANAN
HASIL SURVEI PEMANTAUAN HARGA (SPH) KBI SEMARANG

b. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Pada kelompok makanan jadi, kenaikan IHK tertinggi terjadi pada subkelompok minuman yang tidak beralkohol (3,30%) serta subkelompok tembakau dan minuman beralkohol (2,27%). Kenaikan ini lebih dipicu oleh tingginya kenaikan harga komoditas gula pasir, rokok kretek, rokok kretek filter, nasi, soto dan ayam goreng. Kenaikan harga gula pasir lebih banyak dipengaruhi oleh faktor domestik berupa stok yang menurun karena belum masuknya masa giling, yang diperkirakan baru akan terjadi pada Mei 2010. Adapun pengaruh harga gula pasir dunia (*imported inflation*) cenderung tidak ada, karena harga gula pasir dunia justru mengalami penurunan pada triwulan I-2010 (lihat Grafik 2.5.). Oleh karena itu, untuk melakukan stabilisasi harga gula, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperoleh alokasi impor gula dari pemerintah pusat sebesar 79.000 ton yang dilakukan sejak Maret 2010.

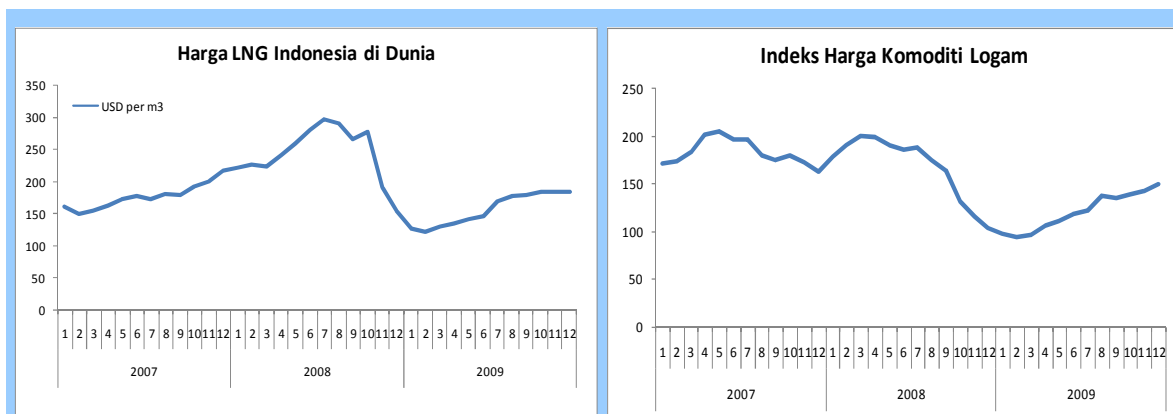


Sumber: IMF dan SPH KBI Semarang

GRAFIK 2.5.
PERKEMBANGAN HARGA GULA PASIR DI DUNIA DAN
HASIL SURVEI PEMANTAUAN HARGA (SPH) KBI SEMARANG

c. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

Pada kelompok ini, kenaikan IHK tertinggi terjadi pada subkelompok biaya tempat tinggal (0,90%) dan subkelompok perlengkapan rumah tangga (0,20%) Kenaikan ini lebih dipicu oleh tingginya kenaikan sewa rumah, kompor gas dan bahan bangunan (pasir, batu bata, cat tembok, besi baja). *Imported inflation* ikut berpengaruh juga terhadap kelompok ini, khususnya harga bahan bangunan terutama logam (Grafik 2.6.).



Sumber: IMF

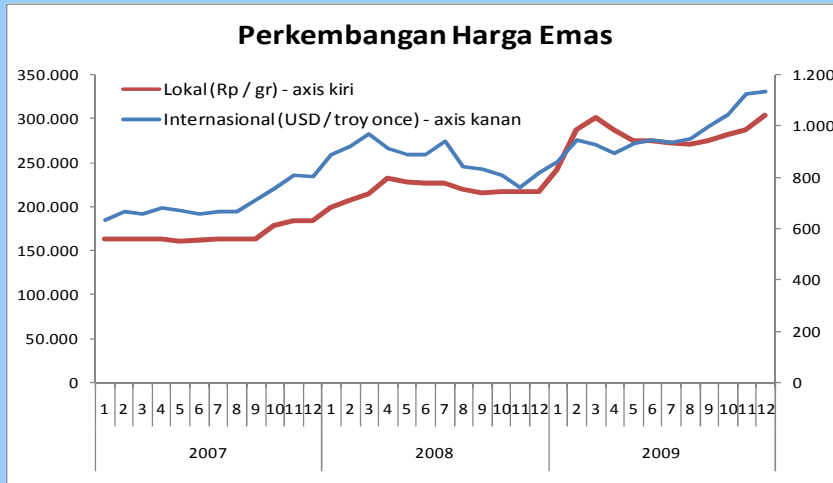
Sumber: IMF

GRAFIK 2.6.
PERKEMBANGAN INDEKS HARGA LNG INDONESIA DAN KOMODITI LOGAM DI DUNIA

d. Kelompok Sandang

Kenaikan IHK kelompok sandang pada triwulan ini disebabkan oleh peningkatan IHK subkelompok sandang anak-anak (0,52%) dan subkelompok sandang wanita (0,39%). Adapun komoditas emas perhiasan yang selama tahun 2009 menjadi penyumbang inflasi terbesar dalam kelompok ini, pada triwulan ini harga emas hanya mengalami sedikit kenaikan. Berdasarkan SPH KBI Semarang, harga emas perhiasan pada akhir triwulan I-2010 mencapai sekitar Rp295 ribu per gram, naik 4,68% dari akhir triwulan IV-2009 dalam kisaran Rp281 ribu. Hal ini dipengaruhi oleh

perkembangan harga emas dunia yang juga relatif stabil pada triwulan I-2010. Bahkan, apabila dibandingkan dengan akhir triwulan IV-2009 mengalami penurunan 1,84% dari USD1.134,72 per *troy ounce* menjadi USD1.113,84 per *troy ounce* pada akhir triwulan I-2010 (Grafik 2.7.).

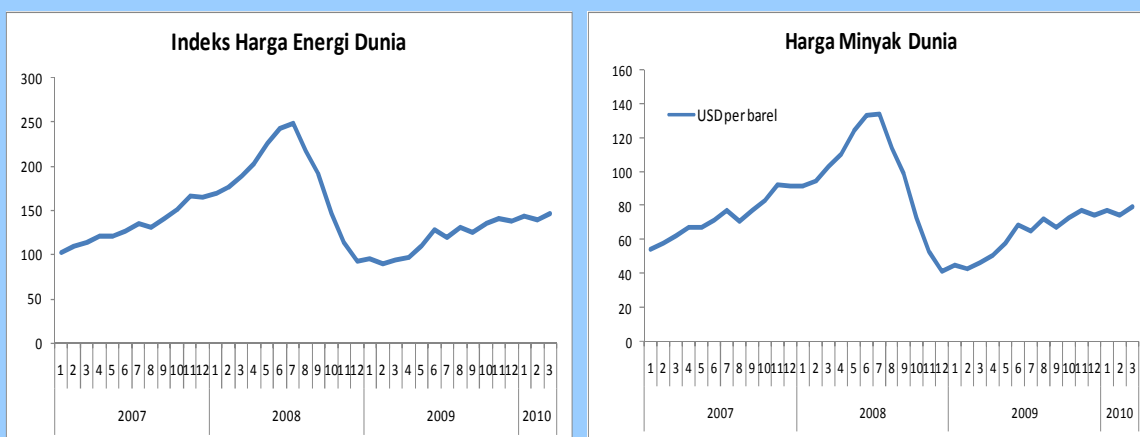


Sumber: USAGold dan SPH KBI Semarang

GRAFIK 2.7.
PERKEMBANGAN HARGA EMAS DUNIA DAN LOKAL

e. Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan pada triwulan ini mengalami kenaikan IHK dari triwulan sebelumnya sebesar 0,47% (qtq). Kenaikan IHK tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan IHK subkelompok transpor sebesar 0,71%. Adapun subkelompok yang mengalami penurunan IHK adalah subkelompok komunikasi dan pengiriman, yang turun 0,03%. Komoditas penyumbang inflasi terbesar dalam kelompok ini adalah bensin pertamax dan pertamax plus yang mengikuti harga minyak dunia. Harga minyak dunia pada akhir triwulan I-2010 tercatat USD 79,3 per barel, naik 6,20% dari akhir triwulan IV-2009 sebesar USD 74,7 per barel (Grafik 2.8.).



Sumber: IMF

GRAFIK 2.8.
PERKEMBANGAN INDEKS HARGA ENERGI DUNIA

Melihat perkembangan harga berbagai komoditas dunia sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh harga komoditas dunia memberikan pengaruh terhadap inflasi Jateng (*imported inflation*), namun pengaruhnya mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Beberapa komoditas yang masih dipengaruhi harga komoditas dunia antara lain minyak goreng, besi baja (logam), emas, dan bensin.

Sementara itu, berdasarkan informasi dari Survei Pemantauan Harga (SPH) KBI Semarang yang dilakukan setiap minggu, dapat diperoleh informasi terkait dengan kondisi harga beberapa komoditas penting pada triwulan I-2010. Secara umum, harga beberapa komoditas penting (khususnya yang termasuk komoditas *volatile foods*) mengalami kenaikan, karena persoalan pasokan yang berkurang. Kondisi harga beberapa komoditas tersebut yang dapat dilihat dalam Tabel 2.2.

TABEL 2.3.
KONDISI HARGA BEBERAPA KOMODITI PENTING

Komoditas	Kondisi Harga	Faktor Penyebab	Keterangan
Beras	Naik di Januari-Februari, kemudian turun pada Maret	- Stok beras berkurang, karena masa panen baru masuk pada Maret. Di beberapa daerah justru baru panen pada April-Mei	- Stok beras di gudang Bulog Jateng mampu memenuhi kebutuhan 6 bulan ke depan
Daging sapi	Relatif stabil	- Permintaan stabil	- Stok mencukupi
Daging ayam	Relatif stabil, tp cenderung naik	- Permintaan naik	- Stok berkurang
Telur ayam ras	Cenderung naik	- Permintaan naik	- Stok berkurang
Minyak goreng	Cenderung turun	- Stok memadai - Permintaan stabil - Pengaruh harga CPO internasional	-
Bawang merah	Cenderung naik	- Pasokan berkurang - Permintaan stabil	-
Gula pasir	Cenderung naik	- Pasokan kurang memadai karena belum masa giling - Permintaan stabil	- Pengaruh harga internasional minimal
Emas perhiasan	Relatif stabil	- Pengaruh harga internasional	-

Sumber: SPH KBI Semarang

2.1.2. Inflasi Tahunan (yoy)

Secara tahunan, inflasi Jawa Tengah pada triwulan I-2010 tercatat sebesar 3,46% (yoy), sedikit meningkat dari triwulan sebelumnya sebesar 3,32% (yoy). Tekanan harga tertinggi terjadi pada kelompok makanan jadi (7,81%), diikuti oleh kelompok bahan makanan (3,16%), dan kelompok pendidikan (2,48%). Sementara itu, kelompok barang dan jasa yang mengalami kenaikan IHK terendah adalah kelompok transpor, yaitu sebesar 1,69% (lihat Tabel 2.3.). Pembahasan selanjutnya akan diuraikan tiga kelompok barang dan jasa yang mengalami inflasi tahunan tertinggi pada triwulan ini.

a. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

Kenaikan harga pada kelompok makanan jadi bersumber dari kenaikan harga pada subkelompok minuman yang tidak beralkohol (17,91%), serta subkelompok tembakau dan

minuman beralkohol (7,81%). Kenaikan pada kelompok ini disebabkan oleh naiknya harga beberapa komoditas seperti gula pasir, rokok kretek, rokok kretek filter, nasi, soto dan gulai.

b. Kelompok Bahan Makanan

Kenaikan IHK pada kelompok bahan makanan terutama disebabkan oleh kenaikan harga di subkelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya (11,74%) serta subkelompok bumbu-bumbuan (9,20%). Kenaikan IHK subkelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya disebabkan oleh kenaikan harga beras karena belum masuk masa panen. Sementara itu, kenaikan IHK subkelompok bumbu-bumbuan terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas seperti bawang merah, cabe merah dan cabe rawit.

c. Kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan

Kenaikan IHK pada kelompok ini terutama bersumber dari kenaikan harga di subkelompok transpor (2,49%), serta subkelompok sarana dan penunjang transpor sebesar 0,88%. Kenaikan IHK subkelompok transpor terutama disebabkan oleh kenaikan harga bensin pertamax dan pertamax plus sejalan dengan kenaikan harga minyak dunia. Sementara itu, kenaikan IHK subkelompok sarana dan penunjang transpor disebabkan oleh kenaikan harga sepeda motor dan mobil.

TABEL 2.3.
INFLASI JAWA TENGAH TAHUNAN
BERDASARKAN KELOMPOK BARANG DAN JASA (PERSEN; YOY)

NO	KELOMPOK	Des-08	Mar-09	Des-09	Mar-10
	UMUM / TOTAL	9.55	6.94	3.32	3.46
1	BAHAN MAKANAN	12.91	7.76	3.75	3.16
2	MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK & TEMBAKAU	12.90	9.22	7.53	7.81
3	PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS & BHN BAKAR	13.46	12.17	3.49	2.18
4	SANDANG	7.06	7.08	5.70	2.54
5	KESEHATAN	7.68	6.97	3.40	1.70
6	PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA	4.93	4.99	2.45	2.48
7	TRANSPOR, KOMUNIKASI & JASA KEUANGAN	7.14	1.92	-3.40	1.69

Sumber : BPS, diolah

Apabila dilihat komoditas penyebab inflasi setiap bulannya, BPS mencatat beberapa komoditas yang menjadi pemicu utama inflasi triwulan ini, terutama berasal dari kelompok makanan jadi dan kelompok bahan makanan. Beberapa komoditas penyebab inflasi Jawa Tengah pada triwulan I-2010 dapat dilihat dalam Tabel 2.4.

TABEL 2.4.
BEBERAPA KOMODITI PENYEBAB INFLASI TIAP BULAN
PADA TRIWULAN I-2010

No	Januari	Februari	Maret
1.	Kelompok Bahan Makanan		
	– beras – cabe merah – minyak goreng – udang basah – bandeng – kentang – tomat sayur	– beras – bawang merah – cabe rawit – kangkung –angka muda – sawi hijau	– telur ayam ras – minyak goreng – daging ayam ras – angka muda – tomat sayur – bawang merah
2.	Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan tembakau		
	– gula pasir – rokok kretek filter – rokok kretek – soto – nasi – gulai	– soto – nasi – bubur – gula pasir – rokok kretek filter	– ayam goreng – rokok kretek
3.	Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar		
	–	– sewa rumah	– kontrak rumah – sewa rumah – batu bata
4.	Kelompok Sandang		
	– celana panjang jins	–	– emas perhiasan
5.	Kelompok Kesehatan		
	–	–	–
6.	Kelompok Pendidikan, Rekreasi & Olahraga		
	– buku tulis bergaris	–	– tas sekolah – buku pelajaran SD
7.	Kelompok Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan		
	– mobil	– sepeda motor dan mobil	– bensin

Sumber : BPS, diolah

BPS juga mencatat beberapa komoditas yang mengalami penurunan harga atau memberikan andil deflasi pada triwulan ini. Beberapa komoditas tersebut antara lain telur ayam ras, daging ayam ras, udang basah, bawang merah, minyak goreng, dan emas perhiasan. Beberapa komoditas yang memberikan andil penurunan harga (deflasi) Jawa Tengah di setiap bulan selama triwulan I-2010 dapat dilihat dalam Tabel 2.5.

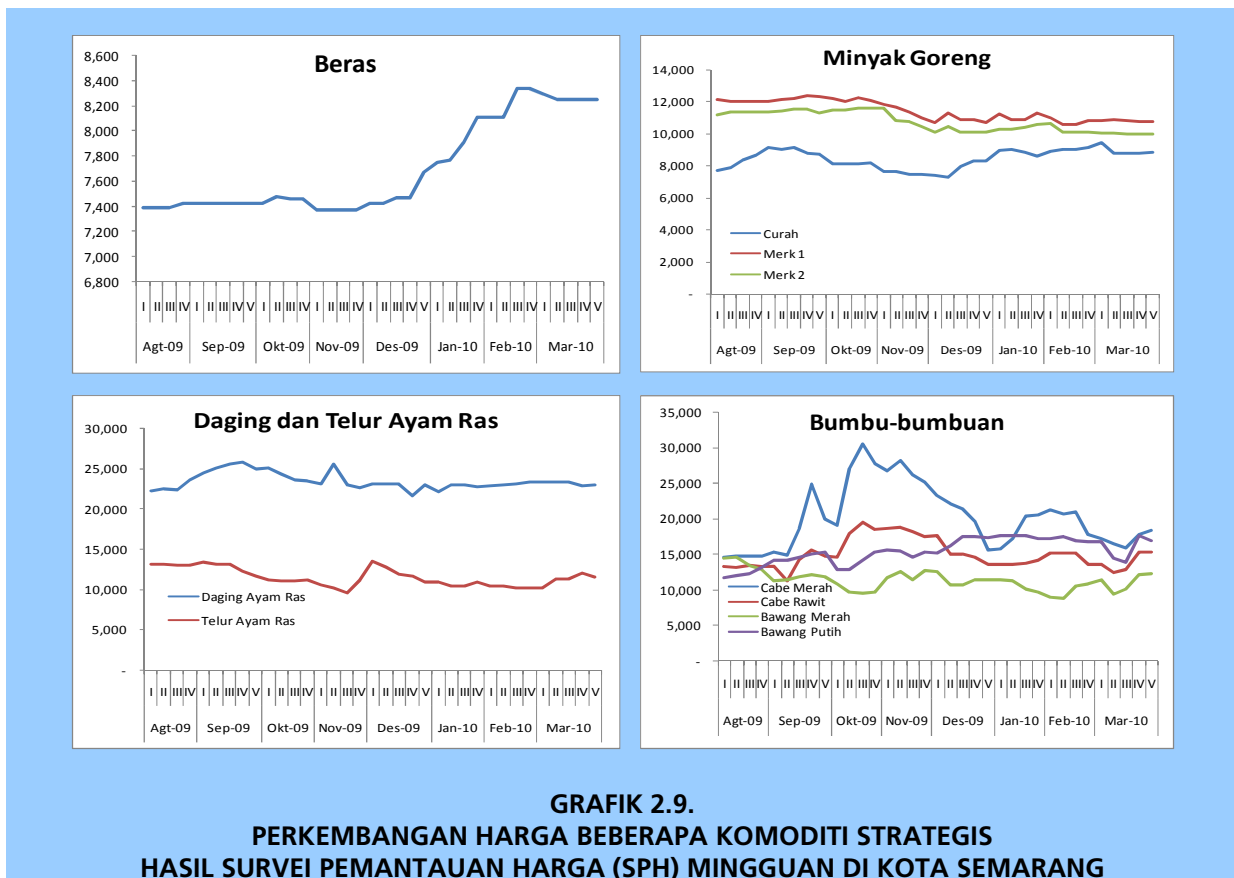
TABEL 2.5.
BEBERAPA KOMODITI YANG MENGALAMI PENURUNAN IHK (DEFLASI)
PADA TRIWULAN I-2010

Januari	Februari	Maret
– telur ayam ras – daging ayam ras – kacang panjang – bawang merah – jeruk – jagung manis – batu bata – besi beton	– bandeng – jeruk – cabe merah – telur ayam ras – kentang – minyak goreng – kelapa – bawang putih – alpukat – emas perhiasan	– beras – cabe merah – cabe rawit – udang basah – kacang panjang – bayam – cabe hijau – kentang – pisang – cumi-cumi

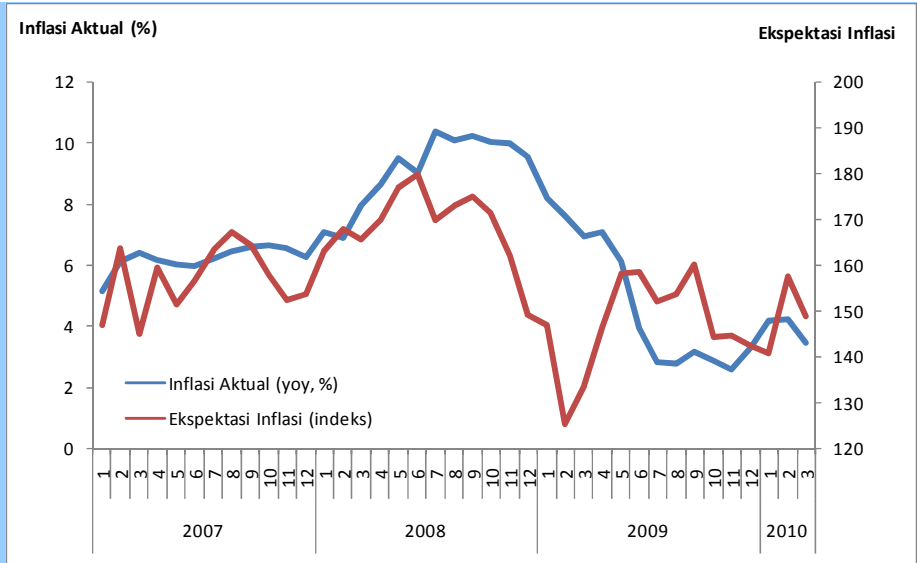
Sumber : BPS dan SPH KBI Semarang

Perkembangan harga beberapa komoditas tersebut sesuai dengan hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan KBI Semarang setiap minggu di beberapa pasar tradisional dan pasar modern di kota Semarang, yang secara umum menunjukkan peningkatan

harga selama triwulan I-2010. Perkembangan harga beberapa komoditas strategis hasil Survei Pemantauan Harga (SPH) yang dilakukan KBI Semarang setiap minggu di beberapa pasar tradisional dan pasar modern di kota Semarang dapat dilihat pada Grafik 2.9.



Berdasarkan Survei Konsumen, sebagian besar responden memperkirakan dalam triwulan ini akan terjadi inflasi tahunan yang sedikit meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Menurut responden, kenaikan harga diperkirakan akan terjadi pada semua kelompok barang, terutama kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, dan kelompok perumahan. Perkembangan ekspektasi inflasi hasil Survei Konsumen dibandingkan dengan inflasi tahunan Jawa Tengah aktual dapat dilihat pada Grafik 2.9.



Sumber: KBI Semarang dan BPS
 Keterangan: indeks = (%turun - % naik) + 100

GRAFIK 2.10.
PERKEMBANGAN EKSPEKTASI INFLASI HASIL SURVEI KONSUMEN
DAN INFLASI TAHUNAN AKTUAL DI JAWA TENGAH

2.2. Inflasi Empat Kota di Jawa Tengah

Inflasi kuartalan (qtq) di empat kota di Jawa Tengah (Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Tegal) pada triwulan ini mengalami kenaikan di semua kota. Sementara itu, laju inflasi tahunan (yoy) di empat kota tersebut pada triwulan ini mengalami kenaikan di dua kota (Semarang dan Purwokerto). Adapun inflasi tahunan dua kota lainnya, yaitu Surakarta dan Tegal, mengalami penurunan. Analisis mengenai inflasi kuartalan (qtq) dan tahunan (yoy) di empat kota tersebut akan diuraikan di bawah ini.

2.2.1. Inflasi Kuartalan (qtq)

Berdasarkan penghitungan BPS, laju inflasi kuartalan (qtq) empat kota di Jawa Tengah yaitu di kota Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Tegal pada triwulan I-2009 masing-masing sebesar 1,02%, 0,68%, 1,11% dan 0,62%. Dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, BPS mencatat bahwa laju inflasi kuartalan di empat kota tersebut mengalami kenaikan. Berdasarkan kelompok barang dan jasa, BPS mencatat bahwa kenaikan laju inflasi kuartalan pada triwulan I-2010 terutama dipicu oleh kenaikan IHK kelompok makanan jadi dan kelompok bahan makanan.

Komoditas kelompok makanan jadi yang memberikan sumbangan inflasi cukup nyata adalah yang termasuk pada subkelompok minuman tidak beralkohol serta subkelompok tembakau dan minuman beralkohol. Adapun komoditas dalam kelompok bahan makanan yang mengalami kenaikan harga cukup signifikan terutama yang termasuk dalam subkelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya, serta subkelompok bumbu-bumbuan. Perkembangan inflasi kuartalan empat kota di Jawa Tengah berdasarkan kelompok komoditas dapat dilihat pada Tabel 2.6.

TABEL 2.6.
INFLASI KUARTALAN EMPAT KOTA DI JAWA TENGAH
BERDASARKAN KELOMPOK BARANG DAN JASA (PERSEN; QTQ)

No	KELOMPOK	Dec-08	Mar-09	Jun-09	Jul-09	Agt-09	Sep-09	Des-09	Mar-10
SEMARANG									
	UMUM / TOTAL	0,18	0,72	0,06	0,69	0,93	1,96	0,41	1,02
1	BAHAN MAKANAN	0,36	1,34	-1,78	0,62	1,77	4,41	-1,03	1,40
2	MAKANAN JADI	0,98	1,76	1,38	0,98	1,20	2,27	1,25	2,45
3	PERUMAHAN	1,33	2,32	0,40	0,58	0,43	0,47	1,12	0,38
4	SANDANG	1,64	4,02	0,02	0,74	1,06	1,90	1,56	0,45
5	KESEHATAN	2,64	0,79	0,42	0,37	0,36	0,10	1,02	0,31
6	PENDIDIKAN	0,6	0,15	-0,08	1,08	1,05	1,84	-0,04	0,13
7	TRANSPOR	-4,07	-4,82	0,57	0,46	0,26	1,34	-0,05	0,51
SURAKARTA									
	UMUM / TOTAL	0,13	0,78	0,47	0,65	0,75	1,21	0,14	0,68
1	BAHAN MAKANAN	-0,85	3,35	0,92	1,67	1,34	2,05	-0,17	0,35
2	MAKANAN JADI	0,29	1,65	0,96	0,82	1,10	2,22	0,72	1,37
3	PERUMAHAN	3,34	0,76	0,03	0,03	0,24	0,30	0,28	0,97
4	SANDANG	0,93	0,67	-0,42	-0,42	-0,08	-0,17	0,55	0,45
5	KESEHATAN	3,95	0,01	1,07	0,53	0,03	0,16	0,29	0,16
6	PENDIDIKAN	0,03	-4,70	0,19	0,68	1,52	1,58	0,00	-0,02
7	TRANSPOR	-4,44	0,78	0,10	0,27	0,33	0,68	-0,37	0,47
PURWOKERTO									
	UMUM / TOTAL	1,16	0,78	0,11	0,34	0,63	1,17	0,73	1,11
1	BAHAN MAKANAN	2,42	0,97	-1,67	-0,36	0,14	2,12	-0,11	1,83
2	MAKANAN JADI	2,20	1,35	2,52	1,95	1,08	0,65	0,72	1,79
3	PERUMAHAN	1,69	-0,30	-0,01	0,00	0,54	0,64	2,48	0,64
4	SANDANG	1,26	5,88	-1,30	-0,28	0,08	-0,22	2,44	0,16
5	KESEHATAN	0,24	14,6	1,08	0,73	0,59	0,06	-0,15	0,28
6	PENDIDIKAN	2,86	0,14	0,14	0,13	3,08	3,32	0,27	0,19
7	TRANSPOR	-4,07	-4,33	0,14	-0,06	-0,07	1,02	-1,06	0,74
TEGAL									
	UMUM / TOTAL	0,45	1,05	1,05	0,71	0,97	1,20	0,47	0,62
1	BAHAN MAKANAN	-1,52	1,31	-1,06	1,25	3,55	3,18	-1,04	0,91
2	MAKANAN JADI	0,86	2,62	5,63	0,81	0,14	1,07	1,91	1,42
3	PERUMAHAN	1,16	1,06	0,35	0,63	0,07	0,01	0,54	0,53
4	SANDANG	4,56	2,61	-3,41	1,29	1,07	-0,24	2,57	-1,26
5	KESEHATAN	1,08	1,09	0,85	0,27	0,25	0,34	-0,05	-0,25
6	PENDIDIKAN	2,28	0,15	0,42	-0,10	1,40	4,33	0,10	0,47
7	TRANSPOR	-1,84	-2,99	0,05	0,01	0,11	0,31	-1,04	0,08

Sumber : BPS, diolah

2.2.2. Inflasi Tahunan (yoy)

Berdasarkan penghitungan BPS, laju inflasi tahunan (yoy) empat kota di Jawa Tengah yaitu di kota Semarang, Surakarta, Purwokerto, dan Tegal pada triwulan I-2010 masing-masing sebesar 3,49%, 2,53%, 3,16% dan 5,38%. Dibandingkan dengan triwulan IV-2009, BPS mencatat laju inflasi di empat kota tersebut mengalami peningkatan, kecuali kota Surakarta dan Tegal yang mengalami penurunan.

Berdasarkan kelompok barang dan jasa, BPS mencatat bahwa laju inflasi tahunan di Kota Semarang pada triwulan I-2010 terutama dipicu oleh kenaikan IHK kelompok makanan jadi, kelompok sandang, dan kelompok bahan makanan masing-masing sebesar 7,56%, 3,98% dan 2,92%. Di kota Surakarta, inflasi tahunan pada triwulan ini terutama dipicu oleh kenaikan IHK

kelompok makanan jadi (5,36%), diikuti oleh kelompok bahan makanan (3,16%) dan kelompok pendidikan (1,76%).

Inflasi tahunan kota Purwokerto dalam triwulan laporan terutama disebabkan oleh kenaikan IHK pada kelompok makanan jadi sebesar 5,80%, diikuti oleh kelompok pendidikan (3,93%) dan kelompok perumahan (3,79%). Sementara itu, kota Tegal dicatat oleh BPS sebagai kota yang memiliki inflasi tahunan tertinggi dibandingkan dengan tiga kota lainnya dalam triwulan ini, yaitu sebesar 5,38%. Dari tujuh kelompok komoditas, kelompok makanan jadi mengalami kenaikan IHK paling tinggi yaitu 15,08% (yoy), diikuti oleh kelompok pendidikan dan kelompok bahan makanan masing-masing sebesar 6,22% dan 5,34%. Perkembangan laju inflasi tahunan di empat kota di Jawa Tengah terlihat dalam Tabel 2.7.

TABEL 2.7.
LAJU INFLASI TAHUNAN EMPAT KOTA DI JAWA TENGAH
MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA (PERSEN, YOY)

No	KELOMPOK	Dec-08	Mar-09	Jun-09	Jul-09	Agt-09	Sep-09	Des-09	Mar-10
SEMARANG									
	UMUM / TOTAL	10,34	7,20	3,81	3,04	2,76	2,94	3,19	3,49
1	BAHAN MAKANAN	13,83	8,04	4,15	3,08	3,50	4,31	2,86	2,92
2	MAKANAN JADI	14,10	8,86	8,27	7,21	6,90	6,53	6,83	7,56
3	PERUMAHAN	13,58	12,01	6,38	5,14	5,07	4,59	4,37	2,39
4	SANDANG	8,89	9,00	8,61	8,05	7,54	7,75	7,67	3,98
5	KESEHATAN	8,60	5,52	4,63	4,43	4,18	3,99	2,34	1,86
6	PENDIDIKAN	6,09	6,24	4,26	4,66	1,69	2,51	1,87	1,86
7	TRANSPOR	6,69	1,38	-7,24	-7,44	-7,68	-6,95	-3,06	2,37
SURAKARTA									
	UMUM / TOTAL	6,96	5,53	3,15	1,76	2,15	2,61	2,63	2,53
1	BAHAN MAKANAN	9,34	7,04	5,54	3,16	4,50	5,52	6,25	3,16
2	MAKANAN JADI	4,30	3,29	3,88	3,12	4,00	5,20	5,65	5,36
3	PERUMAHAN	13,65	13,16	9,27	6,12	5,79	5,40	2,28	1,58
4	SANDANG	3,47	2,45	2,09	1,71	0,89	1,09	0,72	0,41
5	KESEHATAN	7,42	6,88	6,39	6,25	6,11	5,94	2,21	1,69
6	PENDIDIKAN	1,89	1,70	1,79	1,79	1,82	1,82	1,79	1,76
7	TRANSPOR	8,22	2,56	-9,04	-8,93	-8,74	-8,22	-4,30	0,89
PURWOKERTO									
	UMUM / TOTAL	12,06	9,48	5,67	3,02	3,33	3,26	2,83	3,16
1	BAHAN MAKANAN	20,01	9,48	2,51	1,74	1,81	3,84	1,27	2,14
2	MAKANAN JADI	12,40	10,83	11,28	7,30	7,66	6,88	5,34	5,80
3	PERUMAHAN	15,12	13,93	10,17	4,33	4,19	2,02	2,81	3,79
4	SANDANG	3,39	7,80	6,63	6,02	6,72	5,59	6,82	1,05
5	KESEHATAN	3,15	18,22	17,53	17,16	17,09	16,19	15,74	1,28
6	PENDIDIKAN	4,55	4,64	4,37	3,61	6,83	6,57	3,88	3,93
7	TRANSPOR	7,87	2,35	-7,38	-8,66	-8,52	-7,15	-4,24	0,83
TEGAL									
	UMUM / TOTAL	8,52	6,38	4,99	3,65	3,90	5,80	5,83	5,38
1	BAHAN MAKANAN	8,72	5,92	0,62	-1,09	0,21	5,23	5,75	5,34
2	MAKANAN JADI	23,67	22,58	27,41	11,37	12,83	15,24	16,44	15,08
3	PERUMAHAN	11,15	9,75	7,25	4,31	2,51	2,10	1,47	0,94
4	SANDANG	6,13	4,98	1,99	0,85	2,48	5,18	3,19	-0,70
5	KESEHATAN	6,87	6,58	4,57	3,44	3,40	3,63	2,48	1,12
6	PENDIDIKAN	4,00	4,08	3,71	8,60	8,02	8,19	5,89	6,22
7	TRANSPOR	6,92	3,29	-4,43	-4,48	-4,63	-3,63	-2,85	0,23

Sumber: BPS, diolah

BOKS II

TIM PENGENDALIAN INFLASI: UPAYA MEMPERKUAT KOMITMEN DALAM MENGENDALIKAN INFLASI

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara nasional mulai dirintis sejak tahun 2008. TPID merupakan tim yang pada umumnya beranggotakan instansi Pemerintah Daerah (Biro Perekonomian dan Dinas terkait), Bulog, BPS dan Kantor Bank Indonesia. Beberapa daerah juga menyertakan pihak kepolisian, Pertamina dan Pengelola Pasar milik Pemda (PD Pasar) sebagai anggota TPID. Pembentukan TPID tersebut melengkapi Tim Pengendalian Inflasi (TPI) Pusat yang telah terbentuk pada tahun 2005.

Pembentukan TPID tersebut didasari pemikiran bahwa upaya mewujudkan stabilitas harga membutuhkan sinergi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Bank Indonesia. Dalam hal ini, kegiatan TPI Pusat difokuskan pada upaya pengendalian inflasi dalam skala nasional, terutama dengan memfasilitasi koordinasi kebijakan yang mencakup kebijakan fiskal (subsidi, belanja infrastruktur, dll), kebijakan moneter (a.l. manajemen likuiditas untuk mengatur sisi permintaan, kebijakan stabilisasi nilai tukar) dan kebijakan sektoral. Sementara itu, kegiatan TPID difokuskan untuk memberikan rekomendasi dalam rangka menjaga kecukupan pasokan, mendukung kelancaran distribusi sekaligus meminimalkan gangguan-gangguan (*supply shocks*) yang dapat mengganggu pasokan dan distribusi. Disamping itu, kegiatan TPID juga diarahkan untuk meminimalkan dampak akibat kebijakan *administered prices* dan kebijakan lain yang berpotensi memicu inflasi seperti kebijakan konversi energi.

Dalam perjalanannya, beberapa kendala masih dihadapi TPID, yaitu antara lain belum adanya instansi dalam keanggotaan TPI Pusat yang mempunyai kewenangan secara vertikal kepada pemerintah daerah, sehingga hubungan kerja antara TPI dan TPID lebih banyak didasarkan pada hubungan yang bersifat tidak formal. Sebagai contoh, belum adanya Kementerian Dalam Negeri di dalam keanggotaan TPI Pusat, sehingga tidak ada instansi yang mewajibkan Pemda untuk menjadikan pengendalian inflasi sebagai salah satu tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) daerah.

Namun, dalam perkembangannya kemudian, TPI dan TPID mulai menunjukkan peran vitalnya dalam pengendalian inflasi. Hal ini ditunjukkan oleh mulai dimasukkannya program pembentukan TPID dalam rancangan Program Percepatan dan Peningkatan Ekonomi Nasional, yang disampaikan pada Raker Presiden RI dengan para Menteri dan Gubernur se- Indonesia pada April 2010. Salah satu strategi yang digunakan oleh pemerintah dalam mengendalikan inflasi adalah membentuk TPID di 28 kota dari 66 kota pembentuk inflasi nasional yang saat ini belum terbentuk. Saat ini, dari 66 kota pembentuk inflasi nasional sudah terbentuk TPID di 38 kota. TPID ini nantinya diharapkan dapat berkoordinasi secara baik dengan TPI Pusat, dan sekaligus berkoordinasi dengan para produsen dan pedagang.

TPPH Provinsi Jawa Tengah

Sebagaimana diketahui, Jawa Tengah memiliki TPID sejak akhir Desember 2008 yang disebut dengan nama Tim Pemantauan dan Pengendalian Harga (TPPH) Provinsi Jawa Tengah. Tim ini telah melakukan kegiatan rutin berupa rapat koordinasi setiap bulan sejak Februari 2009, yang hingga saat ini mengalami perkembangan yang cukup bagus. Keterlibatan berbagai instansi anggota TPPH maupun instansi lainnya dalam Rapat TPPH menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Selama ini, berbagai informasi perkembangan harga komoditas tiap bulan telah banyak dibahas oleh TPPH, sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur Jawa Tengah dan Dewan Gubernur Bank Indonesia. Beberapa rekomendasi juga memperoleh tindak lanjut yang positif. Sebagai contoh adalah hasil Rapat TPPH bulan Mei 2009 yang ditindaklanjuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan mengirimkan Surat No. 511.1/11411 tanggal 2 Juni 2009 kepada 35 Bupati/Walikota se-Jawa Tengah perihal Antisipasi Kenaikan Harga Kepokmas (Kebutuhan Pokok Masyarakat). Selain itu, menindaklanjuti hasil rapat TPPH bulan Maret 2010, Dinas Perhubungan, komunikasi dan Informatika Prov. Jateng pada tanggal 24 Maret 2010 mengeluarkan Nota Dinas No.57/III/DLK 2010 yang isinya meminta kepada Kepala Bidang Angkutan Jalan, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, ASDP dan KA untuk dapat memberikan kontribusi data pemantauan penetapan tarif angkutan jalan, tarif pesawat, tarif kapal laut dan tarif kereta api secara periodik setiap bulan untuk digunakan sebagai salah satu faktor dalam menentukan inflasi oleh BI dan BPS.

Sejak berdiri sampai dengan triwulan I-2010, TPPH Jawa Tengah telah melakukan rapat koordinasi sebanyak 14 kali, yaitu 11 kali pada tahun 2009 dan 3 kali pada tahun 2010. Di antara rapat tersebut, pernah dilakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi DIY, TPID Provinsi Jawa Barat, TPID Provinsi Jawa Timur, TPID Kota Surakarta dan TPID Kota Purwokerto. Koordinasi antar TPID ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami persoalan perkembangan harga yang terjadi di sekitar wilayah Jawa Tengah, karena diyakini bahwa harga komoditas di suatu wilayah juga dipengaruhi oleh harga komoditas atau persoalan lain yang terjadi di wilayah sekitarnya.

Sejak adanya TPPH Jawa Tengah, *awareness* dan *concern* dari instansi terkait terhadap upaya pengendalian harga di Jawa Tengah menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari kehadiran dan kontribusi instansi anggota TPPH maupun undangan lainnya dalam Rapat TPPH yang menunjukkan peningkatan. Selain itu, apabila Rapat TPPH pada tahun 2009 lebih banyak diselenggarakan di Kantor Bank Indonesia Semarang, maka pada tahun 2010 ini disepakati akan dilakukan secara bergantian di antara instansi anggota TPPH.



Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 3

Perkembangan Perbankan

Kinerja perbankan (Bank Umum dan BPR) di Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I-2010 (Data Posisi Februari 2010) secara umum cukup baik, walaupun sedikit melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV-2009 maupun triwulan I-2009. Indikator-indikator utama kinerja perbankan yaitu total aset, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun, kredit yang diberikan, serta Loan to Deposits Ratio (LDR) pada triwulan ini menunjukkan pertumbuhan positif. Sementara itu, kualitas kredit yang disalurkan semakin membaik, yang tercermin dari menurunnya Non Performing Loans-Gross (NPLs).

Secara tahunan, aset perbankan di Jawa Tengah (bank umum dan BPR) pada triwulan I-2010 dibandingkan dengan triwulan I-2009 tumbuh sebesar 12,20%. Di sisi lain DPK yang dihimpun tumbuh sebesar 7,68% (yoy) sehingga menjadi Rp97,06 triliun. Pertumbuhan DPK ini lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 20,53%. Penurunan pertumbuhan yang cukup signifikan ini diindikasikan karena masyarakat lebih memilih menyimpan dananya pada instrumen investasi yang menawarkan imbal hasil lebih tinggi seperti saham, obligasi, dan emas. Sementara itu kredit tetap tumbuh walaupun mengalami perlambatan, yaitu sebesar 13,64% dari Rp79,83 triliun pada triwulan I-2009 menjadi Rp90,72 triliun pada triwulan I-2010. Perlambatan penyaluran kredit ini diduga karena kredit perbankan harus bersaing dengan alternatif sumber pendanaan lain, seperti koperasi, pasar modal dan dana dari luar negeri. Selain itu, sebagian pelaku usaha masih melakukan ekspansi usaha dengan mengandalkan keuangan sendiri (*self financing*) dari arus kas (*cash flow*) yang dimilikinya, dan sebagian lagi mencari pembiayaan di luar perbankan seperti menerbitkan saham atau obligasi. Namun demikian, LDR perbankan Jawa Tengah mengalami peningkatan yang cukup tinggi yaitu dari 88,57% pada triwulan I-2009 menjadi 93,46% pada triwulan I-2010.

Secara triwulanan (qtq), aset dan kredit pada triwulan I-2010 tumbuh masing-masing sebesar 0,99% dan 0,56%. Pertumbuhan aset dan kredit pada triwulan ini lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV-2009 yang sebesar 3,21% dan 4,95%. DPK mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -0,61%, lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV-2009 yang sebesar 4,06%. Pada triwulan I-2010, kinerja perbankan Jawa Tengah menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya siklus tahunan perbankan, dimana pada awal tahun biasanya perbankan mengalami perlambatan pertumbuhan. pada awal tahun, masyarakat dan dunia usaha cenderung belum banyak yang merealisasikan proyek atau melakukan aktivitas bisnisnya. Namun demikian, pada triwulan ini terjadi perbaikan terhadap kualitas kredit yang disalurkan. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan

rasio NPLs dari 2,90% pada triwulan IV-2009 menjadi sebesar 2,79%. Membaiknya kualitas kredit pada triwulan I-2010 dibanding triwulan sebelumnya di antaranya disebabkan oleh adanya pelunasan kredit yang telah jatuh tempo oleh sebagian debitur. Dan penurunan NPLs ini merupakan hasil kerja perbankan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.

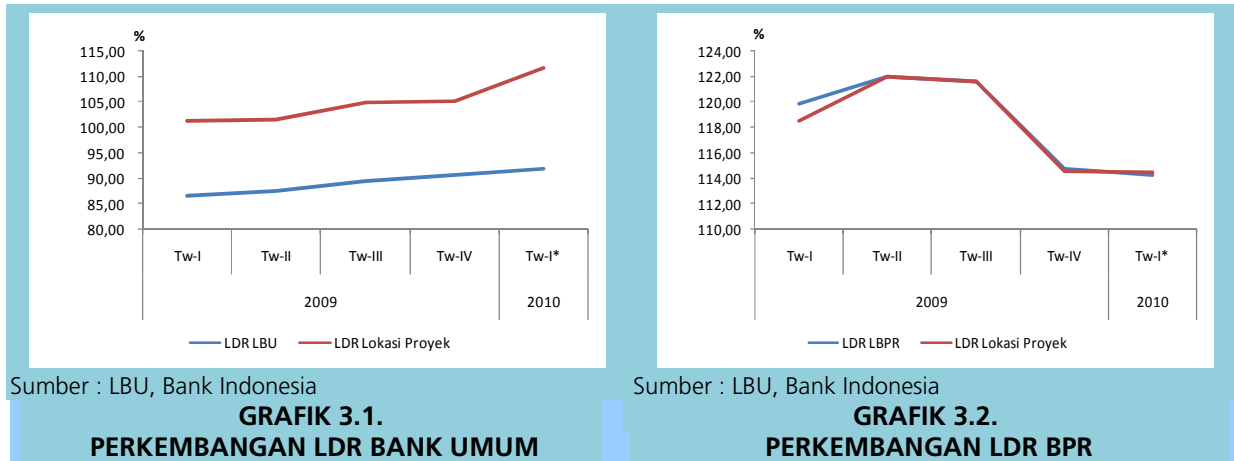
TABEL 3.1.
PERKEMBANGAN INDIKATOR PERBANKAN (BANK UMUM & BPR)
DI PROVINSI JAWA TENGAH (TRILIUN RP)

INDIKATOR	I-08	II-08	III-08	IV-08	I-09	II-09	III-09	IV-09	I-10*	GROWTH	
										yoy	qtq
Total Asset - Total	94.342	99.100	107.388	111.812	113.259	116.051	121.918	125.830	127.072	12,20%	0,99%
a. Total Asset - Bank Umum	87.417	91.822	99.993	103.922	105.161	107.844	113.088	116.642	117.935	12,15%	1,11%
b. Total Asset - BPR	6.925	7.278	7.395	7.889	8.097	8.207	8.830	9.188	9.137	12,84%	-0,56%
DPK - Total	74.783	78.761	81.183	86.140	90.139	92.260	93.852	97.661	97.066	7,68%	-0,61%
a. DPK - Bank Umum	69.886	73.706	76.113	80.681	84.453	86.474	87.657	91.213	90.570	7,24%	-0,70%
b. DPK - BPR	4.897	5.054	5.070	5.459	5.686	5.786	6.195	6.449	6.496	14,25%	0,74%
Kredit - Total	64.040	71.397	77.042	79.331	79.835	82.670	85.961	90.214	90.722	13,64%	0,56%
a. Kredit - Bank Umum	58.475	65.406	70.668	72.907	73.099	75.610	78.452	82.814	83.298	13,95%	0,58%
b. Kredit - BPR	5.565	5.991	6.374	6.424	6.736	7.060	7.508	7.400	7.424	10,21%	0,32%
LDR - Perbankan (%)	85,63	90,65	94,90	92,10	88,57	89,61	91,59	92,37	93,46		
a. LDR - Bank Umum (%)	83,67	88,74	92,85	90,37	86,56	87,44	89,50	90,79	91,97		
b. LDR - BPR (%)	113,64	118,52	125,71	117,66	118,46	122,01	121,20	114,74	114,27		
NPL -Perbankan (%)	4,13	2,80	3,23	2,94	4,17	3,87	3,40	2,90	2,79		
a. NPL - Bank Umum (%)	3,34	3,06	2,64	2,39	3,70	3,41	2,83	2,41	2,24		
b. NPL - BPR (%)	12,54	10,36	9,78	9,26	9,30	8,75	9,31	8,38	8,86		

Sumber: LBU dan LBPR, Bank Indonesia *) Data sementara, Februari 2010

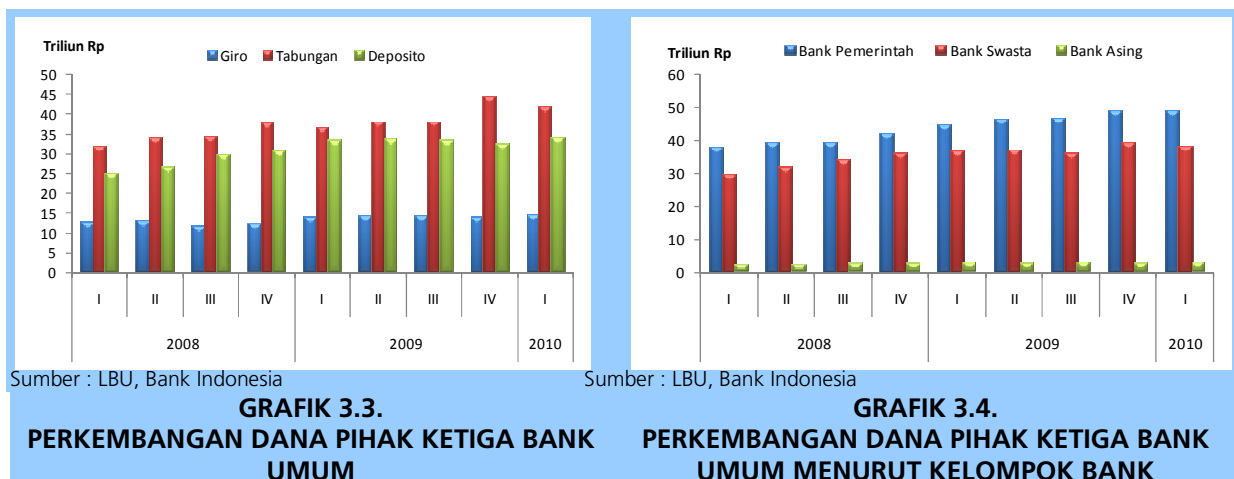
3.1 Intermediasi Bank Umum

Kegiatan intermediasi perbankan yang tercermin dari Loan to Deposit Ratio (LDR) berdasarkan lokasi proyek dan Bank terus mengalami peningkatan sejak triwulan I-2009, pasca krisis keuangan global. LDR Bank umum pada triwulan I-2010 sebesar 91,97%, meningkat dibandingkan dengan LDR pada triwulan IV-2009 sebesar 90,79%. Trend peningkatan LDR mulai terjadi sejak triwulan II-2009, setelah mengalami penurunan pada triwulan I-2009 (86,56%) akibat krisis keuangan global. Sebelumnya, pada triwulan IV-2008 LDRB bank umum mencapai 90,37%. Relatif tingginya LDR bank umum di Jawa Tengah ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan Jawa Tengah telah berjalan dengan baik. Hal yang perlu diperhatikan adalah menjaga kualitas kredit yang disalurkan agar tetap baik, sehingga mampu memberikan sumbangan pada pembangunan Jawa Tengah.

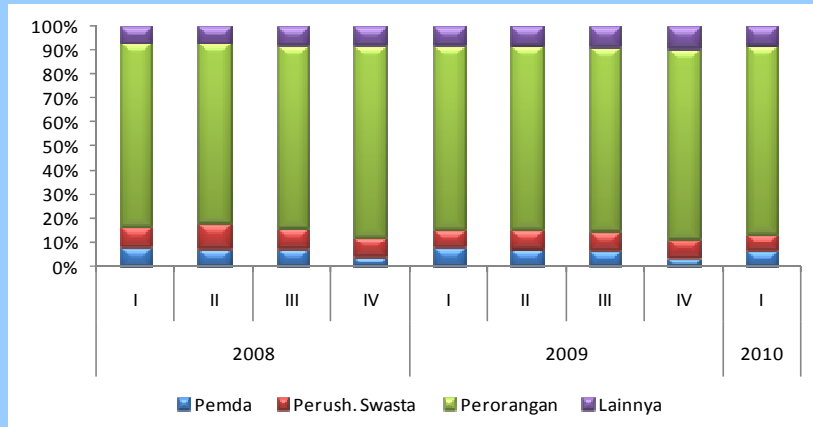


3.1.1. Penghimpunan Dana Masyarakat

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun bank umum di Jawa Tengah mengalami penurunan pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara tahunan, posisi DPK yang berhasil dihimpun bank umum di Jawa Tengah pada triwulan I-2010 mengalami pertumbuhan sebesar 7,24% (yoy) sehingga menjadi Rp90,57 triliun. Berdasarkan jenisnya tabungan tumbuh 13,65%, diikuti oleh giro dan deposito masing-masing sebesar 3,57% dan 1,77%. Secara triwulanan, DPK mengalami kontraksi⁷ sebesar 0,70%, setelah pada dua triwulan sebelumnya tumbuh sebesar 1,37% (qtq) dan 4,06% (qtq). Berdasarkan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan perbankan, penurunan pertumbuhan DPK pada triwulan I-2010 merupakan siklus awal tahun, dimana masyarakat cenderung menarik dananya dan digunakan untuk mencukupi berbagai kebutuhan dan aktivitas ekonomi. Selain itu, adanya Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) pada triwulan II-2010 di 11 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diperkirakan turut menyumbang berkurangnya simpanan masyarakat atau pemerintah daerah di perbankan.



⁷ Lihat catatan kaki No. 1



Sumber : LBU, Bank Indonesia

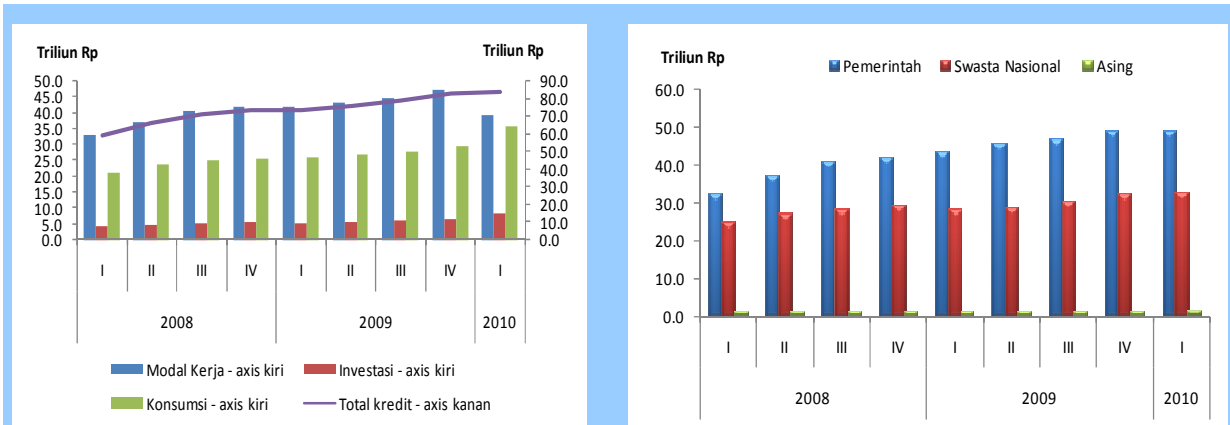
GRAFIK 3.5.
PERKEMBANGAN KOMPOSISI KEPEMILIKAN DANA PIHAK KETIGA BANK UMUM

Secara tahunan, berdasarkan jenis kepemilikannya, DPK yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, BUMN, BUMD, dan lain-lain mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 15,17% (yoy), diikuti oleh perorangan yang tumbuh sebesar 9,05% (yoy). Sementara itu, DPK milik Pemerintah Daerah dan Perusahaan Swasta mengalami kontraksi masing-masing sebesar -10,33% (yoy) dan -0,50% (yoy). Secara triwulanan, DPK milik Pemerintah Daerah mencatatkan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 68,48% (qtq). Pertumbuhan yang tinggi di awal tahun merupakan fenomena tahunan karena adanya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masuk ke rekening Pemerintah Daerah yang ditempatkan di perbankan.

3.1.2 Penyaluran Kredit

Kredit yang disalurkan bank umum di Jawa Tengah pada triwulan I-2010 tumbuh cukup baik. Secara tahunan, pertumbuhan kredit pada triwulan I-2010 mencapai 13,95% (yoy), meningkat jika dibandingkan dengan pertumbuhan kredit pada triwulan IV-2009 (13,59%), namun melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan I-2009 (25,01%). Pada tahun 2010 diharapkan ekspansi kredit perbankan dapat terus tumbuh seiring dengan pulihnya dunia usaha akibat hantaman krisis keuangan global yang terjadi pada akhir tahun 2008. Kredit diharapkan dapat terus tumbuh membaik sehingga dapat mencapai target pertumbuhan kredit yang ditetapkan pemerintah sebesar 15%-20% pada tahun 2010.

Secara triwulanan, kredit pada triwulan I-2010 tumbuh sebesar 0,58% (qtq). Pertumbuhan ini melambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV-2009 dan triwulan III-2009 yang masing-masing sebesar 5,56% (yoy) dan 3,76% (yoy). Dari hasil FGD Perbankan triwulan I-2010 yang diselenggarakan KBI Semarang, perlambatan pertumbuhan pada triwulan ini merupakan siklus rutin tahunan perbankan, dimana para pelaku usaha masih belum merealisasikan rencana bisnisnya, sehingga realisasi kredit masih rendah. Pertumbuhan kredit akan kembali tumbuh pada triwulan II hingga triwulan IV.



Sumber : LBU, Bank Indonesia

GRAFIK 3.6
PERKEMBANGAN KREDIT BANK UMUM
MENURUT JENIS

Sumber : LBU, Bank Indonesia

GRAFIK 3.7.
PERKEMBANGAN KREDIT BANK UMUM
MENURUT KELOMPOK BANK PEMERINTAH,
SWASTA DAN ASING

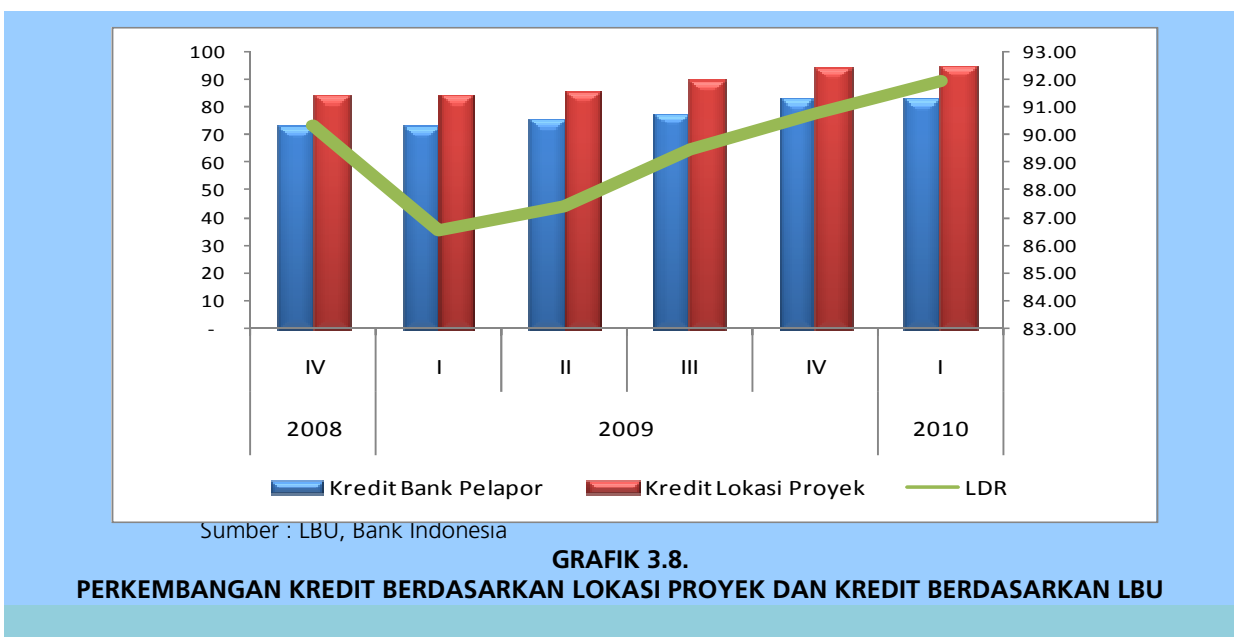
Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit investasi dan kredit konsumsi di Jawa Tengah tumbuh sangat signifikan. Pada triwulan I-2010, pertumbuhan kredit tertinggi berdasarkan jenis penggunaan adalah kredit investasi yang sebesar 56,06% (yoy), disusul kredit konsumsi yang sebesar 37,75% (yoy). Sementara itu, kredit modal kerja mengalami penurunan pertumbuhan sebesar -6,24% (yoy). Penurunan pertumbuhan kredit modal kerja diduga karena adanya pelunasan kredit modal kerja yang dilakukan pada awal tahun, sedangkan realisasi kredit baru belum terlalu signifikan.

Secara sektoral kredit yang disalurkan terkonsentrasi pada sektor lainnya (konsumtif), sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR), dan sektor industri pengolahan masing-masing dengan pangsa sebesar 47,83%, 24,56%, dan 19,03%. Secara tahunan, pertumbuhan kredit tertinggi dicapai oleh sektor Listrik, Gas, dan Air (LGA), sektor Lainnya (konsumtif), dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi masing-masing dengan pertumbuhan sebesar 262,32% (yoy), 50,95% (yoy), dan 17,02% (yoy). Namun demikian, pada triwulan ini kredit pada sektor Pertanian, sektor PHR, dan sektor Konstruksi mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam yaitu masing-masing sebesar -54,86% (yoy), -12,35% (yoy), dan -11,48% (yoy). Kontraksi pertumbuhan kredit ini salah satunya disebabkan oleh faktor musiman yaitu adanya pergeseran musim tanam dari komoditas pertanian, khususnya beras, yang pada tahun sebelumnya jatuh pada triwulan I namun pada tahun 2010 ini bergeser menjadi triwulan II. Pergeseran musim tanam ini mengakibatkan terjadinya kemunduran musim panen. Dengan mundurnya musim panen, maka kredit sektor PHR yang merupakan *forward linkage* dari sektor pertanian juga mengalami kontraksi.

3.1.3. Kredit Lokasi Proyek

Kredit berdasarkan lokasi proyek lebih melihat penyaluran kredit kepada debitur yang ada di wilayah Jawa Tengah, meskipun kreditnya berasal dari bank yang berlokasi di provinsi lain. Hal ini berbeda dengan perkembangan kredit perbankan yang telah diulas sebelumnya, yang datanya berasal dari Laporan Bank Umum (LBU) yang berkantor di Jawa Tengah. Kredit berdasarkan lokasi proyek mengindikasikan jumlah kredit yang masuk ke Jawa Tengah, dan merupakan *proxy* bagi geliat ekonomi dan pembangunan di provinsi Jawa Tengah.

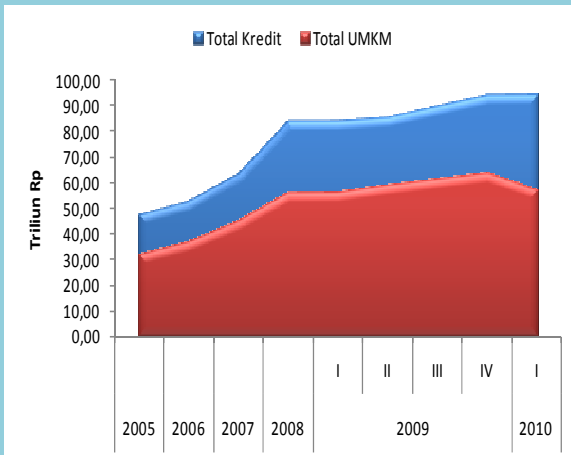
Secara umum, kredit berdasarkan lokasi proyek di Jawa Tengah memiliki saldo yang lebih besar dari kredit bank penyalur di Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah menerima kredit yang berasal dari bank-bank lain yang berlokasi di luar Jawa Tengah. Pada triwulan I-2010, kredit lokasi proyek di Jawa Tengah mencapai Rp94,59 triliun atau lebih tinggi 13,56% dari kredit bank penyalur di Jawa Tengah yang sebesar Rp83,92 triliun. Secara tahunan kredit lokasi proyek tumbuh sebesar 12,01% (yoy), namun secara triwulanan hanya tumbuh sebesar 0,18% (qtq). Pertumbuhan tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhan kredit LBU yang secara tahunan tumbuh sebesar 13,95% (yoy) dan triwulanan tumbuh sebesar 0,58% (qtq).



3.2. Kredit UMKM Berdasar Lokasi Proyek

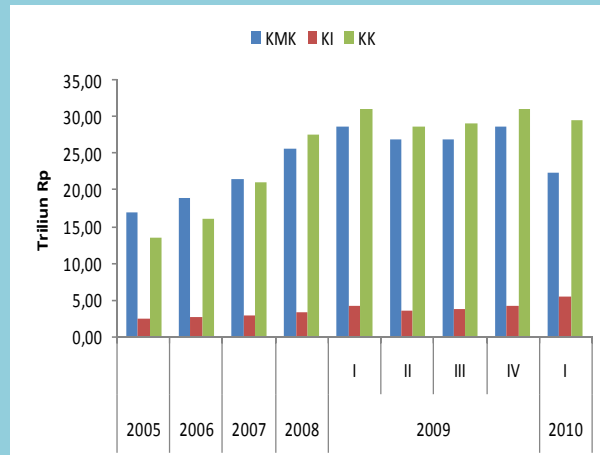
Jumlah penyaluran kredit kepada UMKM berdasarkan Lokasi Proyek di Jawa Tengah mengalami peningkatan tipis. Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I-2010 mengalami pertumbuhan sebesar 1,28% (yoy) dibandingkan triwulan I-2009 sehingga menjadi Rp57,32 triliun. Pertumbuhan ini terlihat sangat rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan IV-2009 yang sebesar 13,30% (yoy). Pertumbuhan kredit UMKM memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan kredit perbankan secara keseluruhan, mengingat

kontribusinya mencapai 60,60% dari total kredit bank umum di Jawa Tengah (**Grafik 3.10**). Dari jumlah tersebut, sebesar Rp29,54 triliun atau 51,53% merupakan kredit konsumsi, sisanya sebesar Rp29,54 triliun (39,03%) dan Rp5,40 triliun (9,44%) merupakan kredit modal kerja dan kredit investasi.



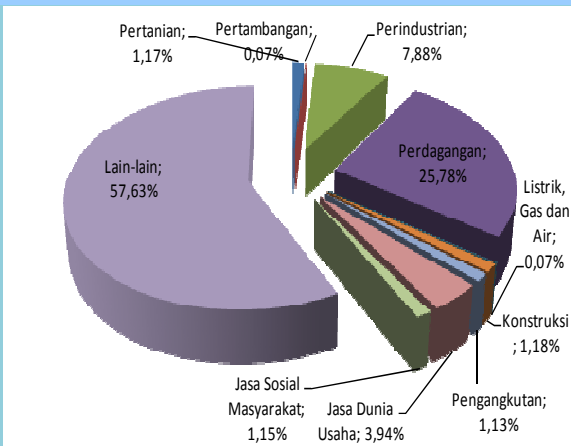
Sumber : LBU, Bank Indonesia

GRAFIK 3.9.
PERKEMBANGAN KREDIT UMKM DAN TOTAL KREDIT



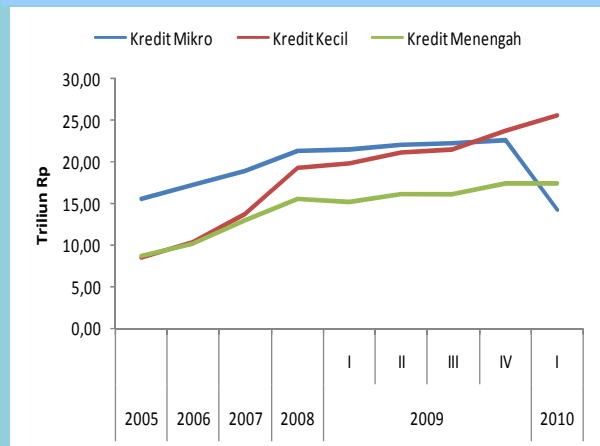
Sumber : LBU, Bank Indonesia

GRAFIK 3.10.
PERKEMBANGAN KREDIT UMKM MENURUT JENIS PENGGUNAAN



Sumber : LBU, Bank Indonesia

GRAFIK 3.11.
KOMPOSISI KREDIT UMKM BERDASARKAN SEKTOR EKONOMI TRIWULAN I-2010



Sumber : LBU, Bank Indonesia

GRAFIK 3.12.
PERKEMBANGAN KREDIT UMKM BERDASARKAN SKALA USAHA

Penyaluran kredit UMKM di Jawa Tengah didominasi oleh sektor lainnya (konsumtif), sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR), sektor industri, serta sektor jasa dunia usaha. Pada triwulan I-2009, porsi terbesar kredit UMKM disalurkan pada sektor lainnya (kredit konsumtif) tercatat sebesar Rp33,03 triliun atau 57,63% dari total kredit UMKM. Sementara itu kredit UMKM untuk sektor PHR, sektor industri, dan sektor jasa dunia usaha masing-masing sebesar Rp14,78 triliun (25,78%), Rp4,51 triliun (7,88%) dan Rp2,26 triliun (3,94%) (Gambar 3.14).

Kredit Skala Kecil (> Rp50 juta – Rp500 juta) mendominasi penyaluran kredit UMKM lokasi proyek di Jawa Tengah (Gambar 3.15). Pada triwulan I-2010, pangsa kredit

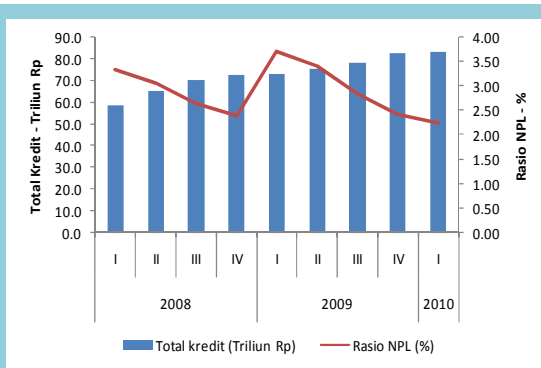
untuk skala kecil masih mendominasi pemberian kredit kepada UMKM di Jawa Tengah dengan pangsa 44,80% dari total penyaluran kredit UMKM. Sedangkan kredit skala usaha mikro (s.d. Rp5 juta) dan menengah (Rp500 juta – Rp5 miliar) masing-masing sebesar Rp. 14,20 triliun (24,77%) dan Rp17,44 triliun (30,34%). Secara tahunan, kredit kecil dan kredit menengah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar 29,53% (yoy) dan 14,17% (yoy). Namun kondisi ini berbeda dengan kredit mikro yang mengalami kontraksi pertumbuhan yang cukup dalam, yaitu sebesar -33,94% (yoy).

Dalam upaya pengembangan sektor riil dan UMKM, KBI Semarang telah melakukan kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengembangkan perekonomian Jawa Tengah. Untuk mengimplementasikan kesepakatan tersebut, KBI Semarang bekerjasama Pemerintah Kabupaten Kudus, Bank Jateng, Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, serta GTZ RED membangun Desa Produktif Klaster Bordir dan Konveksi di Padurenan Kudus melalui pendekatan *Diamond Cluster* (**lebih lengkap lihat Boks**). Selain itu, melalui Program Fasilitasi Percepatan Pemberdayaan Ekonomi Daerah (FPPED), KBI Semarang telah membantu menciptakan *multiplier effect* bagi peternak sapi di Kabupaten Semarang. Salah satu program yang dilakukan dalam pelatihan mengenai diversifikasi produk susu kepada peternak sapi penerima Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dari Bank BRI dan Bank Jateng (**lebih lengkap lihat Boks**).

3.3. Risiko Kredit

Risiko kredit bank umum di Jawa Tengah mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Pada triwulan I-2010 ini risiko kredit bank umum yang salah satunya diukur dari rasio *Non Performing Loans (NPLs)* menyentuh level terendah sejak triwulan I-2009 yaitu sebesar 2,24%. NPL mulai mengalami penurunan sejak triwulan II-2009 dan terus berlanjut sampai triwulan ini. Selain itu, NPL bank umum di Jawa Tengah masih berada pada level aman di bawah 5% sesuai himbauan Bank Indonesia. Pada triwulan I-2009, NPLs bank umum mengalami lonjakan dari 2,39% pada triwulan IV-2008, menjadi 3,70%. Namun demikian, lonjakan NPL tersebut dapat di atasi oleh kalangan perbankan dan terus dijaga melalui penagihan, perbaikan kualitas pinjaman, dan penjualan jaminan sehingga angka NPL dapat ditekan dan secara berangsur-angsur turun. (**Grafik 3.13**).

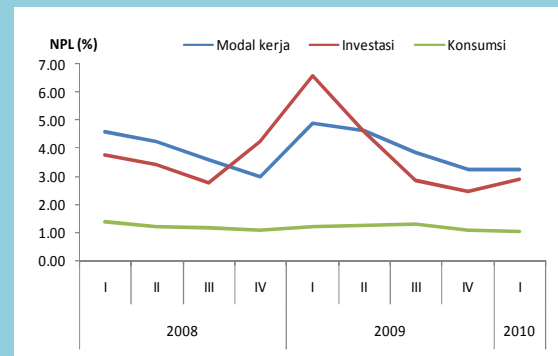
Pada triwulan I-2010, kredit modal kerja menyumbang kredit non lancar terbesar. Apabila dilihat dari jenis penggunaan, kredit modal kerja memiliki NPLs tertinggi, diikuti kredit investasi dan kredit konsumsi. NPLs kredit modal kerja bank umum di Jawa Tengah pada triwulan I-2010 sebesar 3,22%, diikuti oleh kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing dengan NPLs sebesar 2,88% dan 1,02% (**Grafik 3.14**).



Sumber : LBU, Bank Indonesia

GRAFIK 3.13.

PERKEMBANGAN KREDIT BANK UMUM DAN RASIO NPLS



Sumber : LBU, Bank Indonesia

GRAFIK 3.14.

PERKEMBANGAN RASIO NPLS KREDIT BERDASARKAN JENIS PENGGUNAAN

TABEL 3.2.
RASIO NPLs PER SEKTOR EKONOMI (PERSEN)

Sektor Ekonomi	TW I-08	TW II-08	TW III-08	TW IV-08	TW I-09	TW II-09	TW III-09	TW IV-09	TW I-10*
Pertanian	3.06	3.67	2.96	2.53	2.59	2.67	2.37	2.10	2.23
Pertambangan	0.72	1.03	0.65	0.56	19.82	0.74	0.64	0.60	0.55
Industri	5.70	5.03	3.72	3.26	7.91	7.27	4.19	3.82	3.51
Listrik, Gas, & Air	5.45	3.54	5.64	0.34	0.24	0.08	0.05	0.23	0.11
Konstruksi	6.09	5.12	3.42	1.79	2.94	2.82	2.82	2.39	3.29
PHR	4.11	3.94	3.69	2.69	3.36	3.70	3.72	3.08	3.35
Pengangkutan	3.80	3.61	3.26	2.53	3.02	2.80	2.91	1.67	1.92
Jasa dunia usaha	3.13	2.31	2.31	7.21	7.40	2.66	2.65	1.97	1.96
Jasa sosial masy.	2.55	1.99	1.91	1.10	1.19	1.02	1.06	0.90	2.67
Lainnya	1.39	1.22	1.16	1.09	1.27	1.32	1.39	1.15	1.17
Total NPLs Kredit	3.34	3.06	2.64	2.39	3.70	3.41	2.83	2.41	2.24

Sumber : LBU, Bank Indonesia

Secara sektoral, NPLs terbesar didominasi oleh sektor industri yang nilainya sebesar 3,51%, diikuti oleh sektor PHR sebesar 3,35% dan sektor konstruksi sebesar 3,29% (**Tabel 3.2.**). Pada triwulan I-2010, sektor industri sudah mulai mengalami perbaikan performa kredit, setelah mengalami lonjakan NPLs di triwulan I-2009 akibat terkena dampak krisis keuangan global. Selain itu, upaya dunia perbankan dalam menekan laju NPLs melalui mekanisme *reschedulling*, *reconditioning*, dan *restructuring* juga menjadi kunci keberhasilan rendahnya NPLs perbankan di Jawa Tengah.

3.4. Perkembangan Bank Umum Yang Berkantor Pusat di Jawa Tengah

Kinerja bank umum yang berkantor pusat di Jawa Tengah pada triwulan I-2010 tumbuh cukup baik. Total aset bank umum tersebut tercatat sebesar Rp17,21 triliun atau tumbuh sebesar 15,83% (yoy), dan secara triwulanan aset mengalami pertumbuhan sebesar 14,28% (qtq). Bank yang berkantor pusat di Jawa Tengah menguasai 14,60% dari total aset seluruh bank umum di Jawa Tengah.

Secara tahunan DPK yang berhasil dihimpun pada triwulan I-2010 tercatat sebesar Rp14,54 triliun, atau meningkat sebesar 13,61% (yoy) dibanding dengan triwulan I-2009. Pertumbuhan

terbesar dicapai oleh tabungan yaitu sebesar 33,51%, sedangkan deposito dan giro masing-masing tumbuh sebesar 16,25% (yoy) dan 0,24% (yoy). Peningkatan pertumbuhan DPK pada triwulan I-2010 di antaranya disebabkan oleh keberhasilan promosi dan pemasaran dari produk simpanan di bank yang berkantor pusat di Jawa Tengah. Adanya undian berhadiah, *cash back*, dan hadiah langsung, menjadi daya tarik tersendiri bagi deposan untuk menempatkan dananya di bank tersebut. Secara triwulanan, DPK juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 20,74% (qtq). Peningkatan DPK terbesar disumbang oleh deposito dan giro yang masing-masing tumbuh sebesar 39,71% (qtq) dan 36,97% (qtq). Pertumbuhan yang tinggi dari deposito dan giro disebabkan oleh adanya penempatan dana pemerintah daerah yaitu dana APBD, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU). Sementara itu, tabungan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -13,62% (qtq). Bank yang berkantor pusat di Jawa Tengah menguasai 16,06% dari total DPK seluruh bank umum di Jawa Tengah.

TABEL 3.3.
PERKEMBANGAN BANK UMUM
YANG BERKANTOR PUSAT DI JAWA TENGAH (RP Miliar)

INDIKATOR USAHA	2008				2009				2010	Pert. Tw I (%)	
	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I	yoy	qtq
Aset	12.997	12.908	14.183	13.534	14.863	14.898	15.746	15.064	17.215	15,83%	14,28%
<i>Share thd BU Jateng (%)</i>	14,86%	14,05%	14,18%	13,02%	14,13%	13,81%	13,92%	12,91%	14,60%	-	-
DPK	11.089	10.683	11.089	9.599	12.805	12.958	13.588	12.048	14.547	13,61%	20,74%
Giro	4.478	3.706	3.643	3.334	4.976	4.640	4.276	3.641	4.988	0,24%	36,97%
Tabungan	2.339	2.607	2.773	3.340	2.652	2.878	3.140	4.098	3.540	33,51%	-13,62%
Deposito	4.272	4.370	4.674	2.925	5.177	5.439	6.172	4.308	6.019	16,25%	39,71%
<i>Share thd BU Jateng (%)</i>	15,86%	14,49%	14,57%	11,90%	15,16%	14,98%	15,5%	13,2%	16,06%	-	-
Kredit	8.175	9.216	9.791	9.871	9.985	10.411	10.842	10.862	11.011	10,28%	1,37%
<i>Share thd BU Jateng (%)</i>	13,98%	14,09%	13,85%	13,54%	13,66%	13,77%	13,82%	13,12%	13,22%	-	-
LDR	73,72%	86,26%	88,29%	102,84%	77,98%	80,34%	79,79%	90,16%	75,70%	-	-
NPL	0,50%	0,53%	0,47%	0,26%	0,25%	0,36%	0,48%	0,29%	0,30%	-	-

Sumber : LBU, Bank Indonesia

Kredit tumbuh cukup baik walaupun masih di bawah pertumbuhan keseluruhan bank umum di Jawa Tengah. Bank berkantor pusat di Jawa Tengah mempunyai porsi sebesar 13,22% dari keseluruhan kredit bank umum yang disalurkan di Jawa Tengah. Secara tahunan kredit yang disalurkan oleh bank umum yang berkantor pusat di Jawa Tengah mengalami pertumbuhan sebesar 10,28% (yoy).

Non Performing Loans (NPLs) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) cukup baik. Pada triwulan I-2010, kinerja penyaluran kredit bank umum yang berkantor pusat di Jawa Tengah sangat baik. Hal tersebut diindikasikan oleh rendahnya rasio NPLs yang sebesar 0,30%. NPLs tersebut meningkat tipis jika dibandingkan triwulan I-2010 yang sebesar 0,25%. LDR bank yang berkantor pusat di Jawa Tengah pada triwulan I-2010 adalah sebesar 75,70%, mengalami penurunan yang cukup besar dari triwulan IV-2009 yang sebesar 90,16%. Fenomena penurunan LDR di triwulan I ini merupakan siklus tahunan dari bank yang berkantor pusat di Jawa Tengah. Hal tersebut dikarenakan pada triwulan I, akselerasi penghimpunan dana tidak diimbangi dengan penyaluran kredit, sehingga mengakibatkan turunnya LDR.

TABEL 3.4.
PERKEMBANGAN KREDIT JENIS PENGGUNAAN BANK BERKANTOR PUSAT
DI JAWA TENGAH (RP Miliar)

KREDIT	Bank KP di Jateng			Bank di Jawa Tengah	Growth Bank KP Jateng		Share Bank KP di Jateng thd keseluruhan Bank di Jateng
	I-2009	IV-2009	I-2010	I-2010	yoy	qtq	
Kredit Jenis Penggunaan	9.985	10.862	11.011	83.298	10,28%	1,37%	13,22%
- Kredit Modal Kerja	1.017	871	238	39.216	-76,57%	-72,65%	0,61%
- Kredit Investasi	164	231	828	8.544	404,34%	259,38%	9,70%
- Kredit Konsumsi	8.804	9.761	9.945	35.538	12,96%	1,88%	27,98%

Sumber: LBU, Bank Indonesia

3.5. Perkembangan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Jawa Tengah

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), yang di antaranya terdiri dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Pegadaian, Perusahaan Pembiayaan, *Leasing*, Modal Ventura, dan lain-lain, mempunyai peran yang semakin meningkat dan telah menjadi alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat di Jawa Tengah. Berdasarkan hasil FGD Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Jawa Tengah Triwulan I-2010, diketahui bahwa jumlah LKBB di Jawa Tengah cukup banyak, sangat beragam jenisnya, dan tersebar di berbagai lokasi di Jawa Tengah. LKBB, khususnya koperasi, memiliki karakteristik spesifik yang membedakan dengan perbankan, di antaranya adalah adanya aspek ikatan emosional yang lebih erat karena adanya pendekatan secara personal dari pegawai LKBB serta prosedur pembiayaan yang tergolong mudah dan lebih sederhana.

Dengan kelebihan tersebut, jumlah masyarakat yang menggunakan jasa LKBB sebagai alternatif sumber pembiayaan semakin meningkat. Dan dengan peningkatan tersebut, menyebabkan peran LKBB sebagai alternatif pembiayaan di wilayah Jawa Tengah semakin meningkat pula. Berdasarkan hasil *tracking* perkembangan LKBB di wilayah Jawa Tengah yang dilakukan oleh Bank Indonesia Semarang, ditemukan bahwa porsi pembiayaan LKBB mencapai Rp14,03 triliun atau sekitar 15,48% dari total pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan Jawa Tengah.

Salah satu LKBB terbesar adalah koperasi. Menurut data Dinas Koperasi dan Pelayanan UMKM dapat diketahui bahwa di Jawa Tengah terdapat 16.870 unit Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) dengan jumlah anggota sebanyak 4.013.092 orang. Dengan penyaluran pembiayaan mencapai Rp11,17 triliun, koperasi mempunyai porsi pembiayaan sebesar 10,66% di Jawa Tengah. Dengan penguasaan pembiayaan yang cukup besar tersebut, dapat dikatakan bahwa koperasi memiliki peran yang cukup signifikan dalam penyaluran pembiayaan bagi masyarakat di Jawa Tengah. Selain itu, meskipun tingkat suku bunga yang dikenakan cukup tinggi (rata-rata 2%-3% per bulan), namun tingkat kredit non lancar koperasi relatif kecil.

Demikian pula halnya dengan pegadaian dan lembaga *leasing*/pembiayaan, yang menyalurkan pembiayaan mencapai Rp1,41 triliun dan Rp1,44 triliun, dengan porsi pembiayaan di Jawa Tengah masing-masing sebesar 1,35% dan 1,38%. Pegadaian dan lembaga *leasing* menjadi alternatif yang cukup menarik bagi masyarakat karena proses yang cepat dan kantor cabang yang tersebar di seluruh daerah.

TABEL 3.5.
PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN YANG TERCATAT
DI WILAYAH JAWA TENGAH

Sumber Pembiayaan	Lokasi Penyalur	
	Milyar Rp	%
Perbankan	90.722	86,60%
Perusahaan Pembiayaan	1.448	1,38%
Koperasi	11.172	10,66%
Pegadaian	1.419	1,35%
Total	104.761	100,00%

Sumber : berbagai sumber (diolah)

Dari data tersebut terlihat bahwa LKBB mempunyai peranan yang cukup besar dalam sistem keuangan di wilayah Jawa Tengah, dan tentunya juga mempunyai peran signifikan dalam mempengaruhi stabilitas sistem keuangan regional. Sehingga tantangan bagi para pemangku kepentingan adalah memperkuat sistem dan mekanisme pengawasan terhadap LKBB tersebut, sehingga operasional LKBB dapat berjalan dengan baik sehingga mendukung terjaganya stabilitas sistem keuangan regional.

Selain pembiayaan dari perbankan dan LKBB, terdapat pula sumber pembiayaan lain bagi perusahaan/institusi usaha, yaitu melalui pasar modal. Namun menurut informasi dari Pusat Informasi Pasar Modal (PIPM) Jawa Tengah, yang merupakan kepanjangan tangan dari Bursa Efek Indonesia (BEI) , di Jawa Tengah baru terdapat satu perusahaan yang *go public* di BEI yaitu PT. APAC Inti Corpora, sehingga jumlah pembiayaan yang tercatat melalui pasar modal tersebut belum terlalu signifikan. Sementara itu, terdapat pula 40 perusahaan efek/perusahaan sekuritas/perusahaan pialang yang berada di Semarang, Solo, Pekalongan, dan Tegal dengan rata-rata perputaran uang dari transaksi yang dilakukan sebesar Rp500 miliar – Rp1 triliun per bulan.

3.6. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

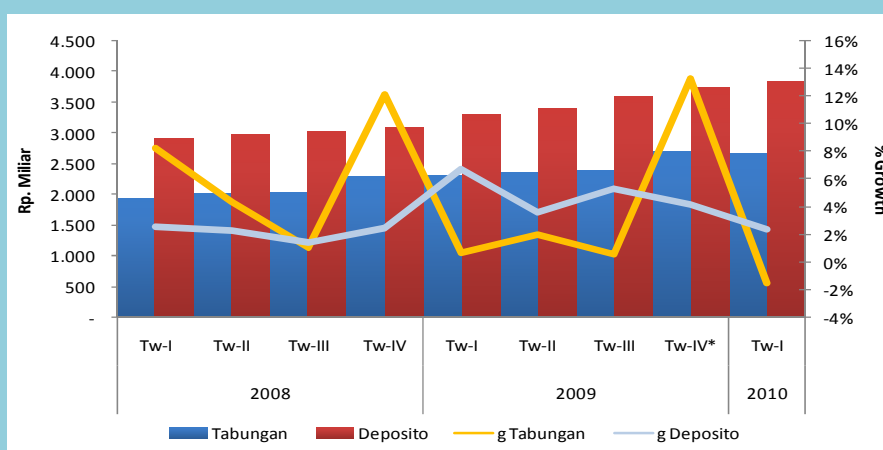
Kinerja BPR di Jawa Tengah pada triwulan I-2010 secara umum menunjukkan adanya perlambatan. Hal tersebut tercermin dari perkembangan indikator-indikator utama kinerja perbankan yaitu total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun, dan penyaluran kredit.(Tabel 3.6.). Penurunan kinerja tersebut lebih dikarenakan siklus tahunan, dimana pada awal tahun, BPR seperti halnya bank umum cenderung *wait and see* sehingga tingkat kredit yang disalurkan masih sedikit.

TABEL 3.6.
PERKEMBANGAN INDIKATOR BPR DI JAWA TENGAH (Rp. MILIAR)

Indikator Usaha	2008				2009				2010
	Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV	Tw-I	Tw-II	Tw-III	Tw-IV	Tw-I*
Aset	6.860	7.200	7.395	7.790	7.996	8.207	8.551	9.188	9.137
DPK	4.857	5.007	5.070	5.395	5.620	5.786	5.982	6.449	6.496
- Tabungan	1.947	2.032	2.054	2.304	2.320	2.366	2.380	2.697	2.657
- Deposito	2.910	2.975	3.017	3.091	3.300	3.420	3.602	3.751	3.840
Kredit	5.520	5.938	6.374	6.424	6.736	7.060	7.275	7.400	7.424
LDR (%)	113,64	118,60	125,64	117,66	119,86	122,02	121,61	114,74	114,27
NPLs (%)	11,46	10,40	9,78	9,26	9,30	8,75	9,27	8,38	8,86

Sumber : LBPR Bank Indonesia, *) Feb 2010

Secara tahunan (yoy), pertumbuhan BPR pada triwulan I-2010 mengalami perlambatan dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV-2009. DPK dan kredit yang disalurkan tumbuh 15,59% dan 10,21%, melambat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan IV-2009 yang masing-masing sebesar 19,54% dan 15,19%. Siklus usaha perbankan di awal tahun yang lebih bersifat menunggu menyebabkan perlambatan kinerja BPR tersebut.

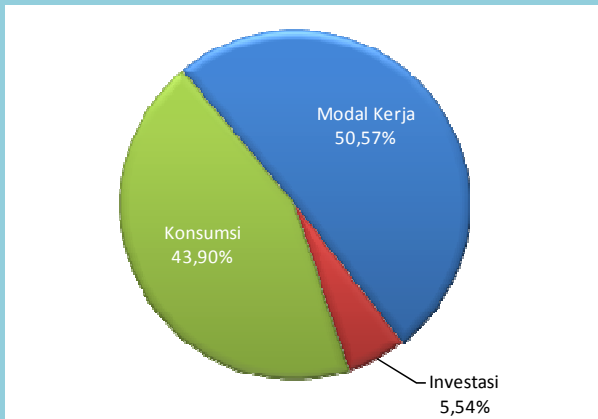


Sumber : LBPR, diolah

GRAFIK 3.15.
PERKEMBANGAN PRODUK BPR DI JAWA TENGAH TRIWULAN I-2010

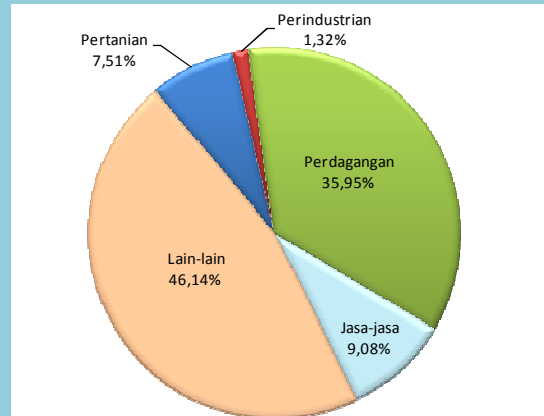
Deposito mengalami pertumbuhan yang positif yaitu sebesar 2,36% (qtq), sedikit melambat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (4,15%). Sebanyak 60% DPK BPR (Rp3.840 miliar) adalah deposito, sedangkan sisanya adalah tabungan (**Grafik 3.15.**). Sementara itu 50,57% dari total kredit, disalurkan untuk kredit modal kerja, 43,90% untuk kredit konsumsi, sedangkan sisanya (5,54%) untuk kredit investasi (**Grafik 3.16.**). Salah satu hal yang cukup menggembirakan adalah meningkatnya penyaluran kredit investasi sebesar 0,89% (qtq) menjadi Rp411 miliar. Penyaluran kredit investasi diyakini akan memiliki dampak turunan yang lebih baik dibandingkan kredit lainnya.

Berdasarkan sektor ekonomi, penyaluran kredit pada triwulan I-2010 didominasi oleh sektor Perdagangan dan sektor Lain-lain dengan porsi masing-masing sebesar 35,95% dan 46,14%. Dibandingkan dengan triwulan IV-2009, pertumbuhan kredit sektor Perdagangan pada triwulan ini mengalami kenaikan sebesar 0,56% (qtq) menjadi Rp. 2.669 miliar, sedangkan kredit sektor Lain-lain mengalami penurunan sebesar -0,35% (qtq).



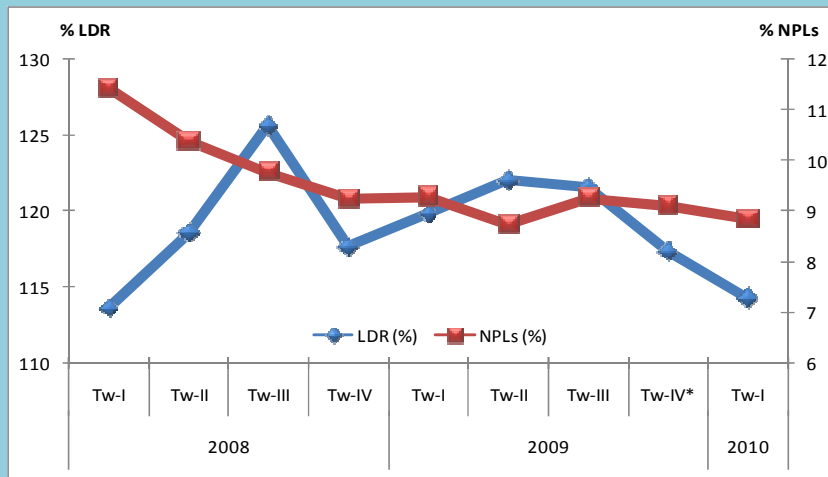
Sumber : LBPR, diolah

GRAFIK 3.16.
PERKEMBANGAN PRODUK BPR DI JAWA
TENGAH TRIWULAN I-2010



GRAFIK 3.17.
KREDIT BPR BERDASARKAN SEKTOR
JAWA TENGAH TRIWULAN I-2010

Menurunnya DPK dan kredit yang diberikan berpengaruh terhadap kemampuan intermediasi BPR. Hal ini tercermin dari penurunan tingkat LDR, yaitu 117,38% pada triwulan IV-2009 menjadi 114,27% pada triwulan I-2010 (**Grafik 3.17.**). Sementara itu, kualitas kredit BPR mengalami penurunan, tercermin dari naiknya NPLs BPR dari 8,38% pada triwulan IV-2009 menjadi 8,86% pada triwulan I-2010.



Sumber : LBPR, diolah

GRAFIK 3.18.
PERKEMBANGAN LDR dan NPLs BPR JAWA TENGAH TRIWULAN I-2010

3.7. Perkembangan Perbankan (Bank Umum & BPR) di 35 Kab/Kota di Jawa Tengah

Aktivitas perbankan (bank umum dan BPR) di Jawa Tengah masih terpusat di kota Semarang dan kota Surakarta. Total aset perbankan di kota Semarang dan kota Surakarta masing-masing memiliki porsi sebesar 28,56% dan 13,94% dari total aset perbankan di Jawa

Tengah (**Tabel 3.7.**). Kondisi ini disebabkan kedua daerah tersebut merupakan poros perekonomian Jawa Tengah dan terdapat beberapa kantor pusat bank dan kantor regional bank di wilayah ini.

Secara umum kinerja perbankan di 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masih dalam kondisi baik. Hal ini tercermin dari tingkat LDR yang relatif tinggi dan tingkat NPLs yang berada di bawah 5%. Salah satu daerah yang memiliki tingkat NPLs terbesar pada triwulan I-2010 adalah kabupaten Pekalongan (6,75%). Dimana di kabupaten Pekalongan tidak terdapat bank umum yang beroperasi di daerah tersebut dan hanya terdapat satu unit BPR sehingga segala kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut terhadap simpanan dan pembiayaan/kredit tergantung dari BPR. Kondisi ini diperkirakan menjadi pemicu tingginya NPLs di wilayah kabupaten Pekalongan.

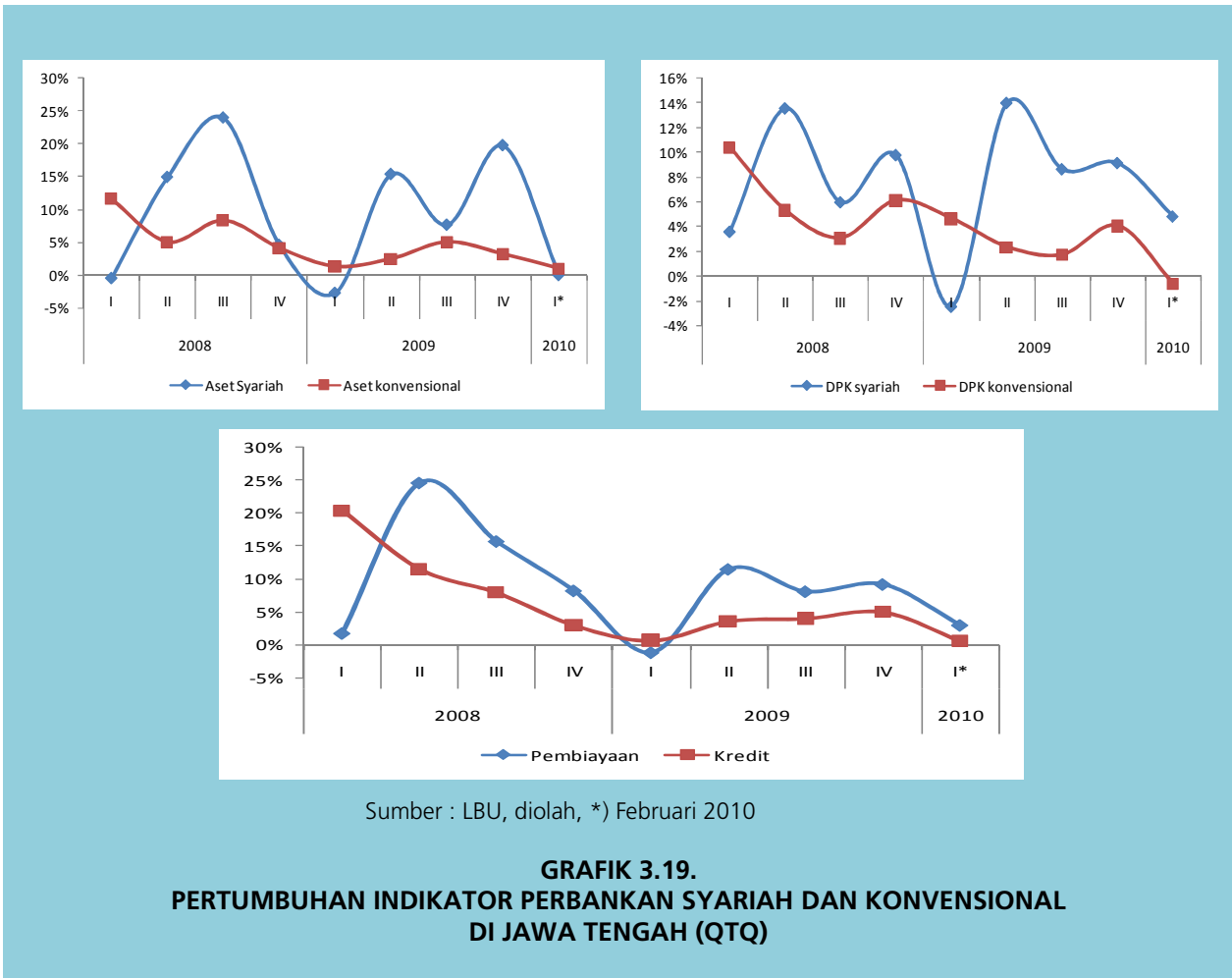
TABEL 3.7.
INDIKATOR PERBANKAN DI 35 KABUPATEN/KOTA
DI JAWA TENGAH (RP MILIAR)

Kab/Kota	Indikator Umum Kinerja Perbankan (Miliar Rp)					Pangsa di Jawa Tengah		
	Aset	DPK	Kredit	LDR	NPL	Aset	DPK	Kredit
Eks. Karisidenan Semarang								
1 Kab. Semarang	1.127	851	1.041	122,28%	3,65%	0,65%	0,64%	0,83%
2 Kab. Kendal	1.157	982	1.037	105,66%	2,95%	0,67%	0,74%	0,82%
3 Kab. Demak	866	690	811	117,55%	3,96%	0,50%	0,52%	0,64%
4 Kab. Grobogan	1.672	1.146	1.402	122,35%	2,76%	0,97%	0,87%	1,11%
5 Kota Semarang	49.190	36.702	29.479	80,32%	2,96%	28,56%	27,76%	23,41%
6 Kota Salatiga	1.116	984	735	74,64%	1,47%	0,65%	0,74%	0,58%
Jumlah	55.127	41.355	34.504	83,43%	2,97%	32,00%	31,28%	27,40%
Eks. Karisidenan Pekalongan								
1 Kab. Tegal	535	429	445	103,89%	3,66%	0,31%	0,32%	0,35%
2 Kab. Brebes	1.359	936	1.223	130,61%	1,09%	0,79%	0,71%	0,97%
3 Kab. Pemalang	956	705	893	126,66%	1,81%	0,56%	0,53%	0,71%
4 Kab. Batang	751	474	698	147,26%	1,71%	0,44%	0,36%	0,55%
5 Kab Pekalongan	98	72	80	109,88%	6,75%	0,06%	0,05%	0,06%
6 Kota Pekalongan	3.568	3.018	2.410	79,85%	1,61%	2,07%	2,28%	1,91%
7 Kota Tegal	4.278	3.336	3.131	93,87%	2,09%	2,48%	2,52%	2,49%
Jumlah	11.544	8.971	8.880	98,99%	1,89%	6,70%	6,78%	7,05%
Eks. Karisidenan Pati								
1 Kab. Pati	8.096	4.755	6.507	136,86%	0,94%	4,70%	3,60%	5,17%
2 Kab. Kudus	1.045	909	928	102,10%	9,43%	0,61%	0,69%	0,74%
3 Kab. Jepara	848	558	788	141,11%	3,94%	0,49%	0,42%	0,63%
4 Kab. Rembang	1.351	967	1.160	119,99%	1,05%	0,78%	0,73%	0,92%
5 Kab. Blora	12.166	7.974	10.134	127,09%	0,15%	7,06%	6,03%	8,05%
Jumlah	23.506	15.163	19.517	128,72%	1,06%	13,65%	11,47%	15,50%
Eks. Karisidenan Banyumas								
1 Kab. Banyumas	3.288	2.968	2.065	69,56%	5,15%	1,91%	2,25%	1,64%
2 Kab. Cilacap	967	686	903	131,70%	4,19%	0,56%	0,52%	0,72%
3 Kab. Purbalingga	920	691	836	121,07%	1,53%	0,53%	0,52%	0,66%
4 Kab. Banjarnegara	11.070	8.722	8.128	93,18%	0,42%	6,43%	6,60%	6,45%
Jumlah	16.245	13.068	11.933	91,31%	1,60%	9,43%	9,88%	9,48%
Eks. Karisidenan Kedu								
1 Kab. Magelang	1.370	1.077	1.060	98,45%	2,68%	0,80%	0,81%	0,84%
2 Kab. Temanggung	860	646	765	118,45%	3,00%	0,50%	0,49%	0,61%
3 Kab. Wonosobo	1.098	958	970	101,18%	2,06%	0,64%	0,72%	0,77%
4 Kab. Purworejo	1.325	1.172	1.056	90,17%	2,37%	0,77%	0,89%	0,84%
5 Kab. Kebumen	4.673	4.053	2.953	72,84%	0,87%	2,71%	3,07%	2,34%
6 Kota Magelang	7.994	6.960	5.813	83,51%	1,15%	4,64%	5,26%	4,62%
Jumlah	17.320	14.866	12.616	84,86%	1,50%	10,05%	11,24%	10,02%
Eks. Karisidenan Surakarta								
1 Kab. Klaten	1.097	855	1.037	121,28%	3,84%	0,64%	0,65%	0,82%
2 Kab. Boyolali	1.401	841	1.354	160,97%	2,82%	0,81%	0,64%	1,08%
3 Kab. Sragen	1.279	1.016	1.175	115,58%	2,36%	0,74%	0,77%	0,93%
4 Kab. Sukoharjo	1.183	859	1.083	126,06%	4,31%	0,69%	0,65%	0,86%
5 Kab. Karanganyar	1.371	932	1.263	135,47%	2,76%	0,80%	0,71%	1,00%
6 Kab. Wonogiri	18.175	14.910	13.507	90,59%	0,13%	10,55%	11,28%	10,72%
7 Kota Surakarta	24.009	19.379	19.069	98,40%	2,85%	13,94%	14,66%	15,14%
Jumlah	48.514	38.793	38.488	99,21%	1,95%	28,16%	29,34%	30,56%
Jumlah Jawa Tengah	172.256	132.215	125.938	95,25%	2,24%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber : Bank Indonesia, diolah

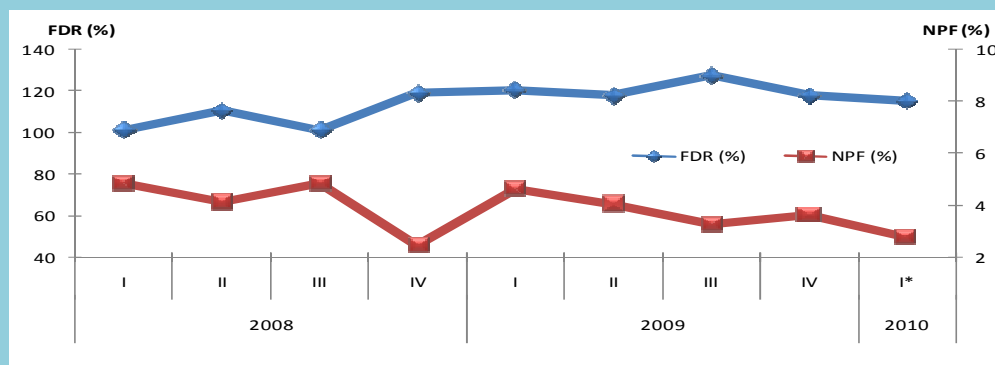
3.8. Perkembangan Perbankan Syariah

Perkembangan Bank umum syariah dan BPR syariah di Jawa Tengah pada triwulan I-2010 menunjukkan perlambatan yang tercermin pada beberapa indikator utama kinerja. Namun demikian, secara umum tingkat pertumbuhan perbankan syariah baik tahunan (yoy) maupun kuartalan (qtq) masih lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bank konvensional. Kondisi ini tidak terlepas dari semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap sistem perbankan syariah. Selain itu, penambahan jumlah kantor perbankan syariah menjadi faktor utama tumbuhnya perbankan syariah.



Aset perbankan syariah pada triwulan ini tercatat sebesar Rp3,49 triliun, sedikit menurun jika dibandingkan triwulan IV-2009. Di sisi lain, DPK perbankan syariah pada triwulan I-2010 mencapai Rp2,35 triliun, mengalami peningkatan sebesar 4,82% (qtq). Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah pada triwulan laporan mengalami pertumbuhan sebesar 3% (qtq) sehingga menjadi Rp. 2,60 triliun, namun relatif melambat dibanding tingkat pertumbuhan triwulan IV-2009. Perlambatan pertumbuhan di awal tahun tersebut diperkirakan karena siklus tahunan.

Financing to Deposit Ratio (FDR) perbankan syariah relatif tinggi, mencapai 115,31%. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi yang dilakukan perbankan syariah di Jawa Tengah masih berjalan dengan sangat baik. Sementara itu, kualitas kredit perbankan syariah pada triwulan I-2010 semakin baik dari triwulan sebelumnya, tercermin dari menurunnya tingkat *Non Performing Financing* (NPF) perbankan syariah dari 3,01% pada triwulan IV-2009 menjadi 2,74%.



Sumber : LBU, diolah *) data Februari 2010

GRAFIK 3.20.
KINERJA BANK SYARIAH DI JAWA TENGAH TRIWULAN I-2010

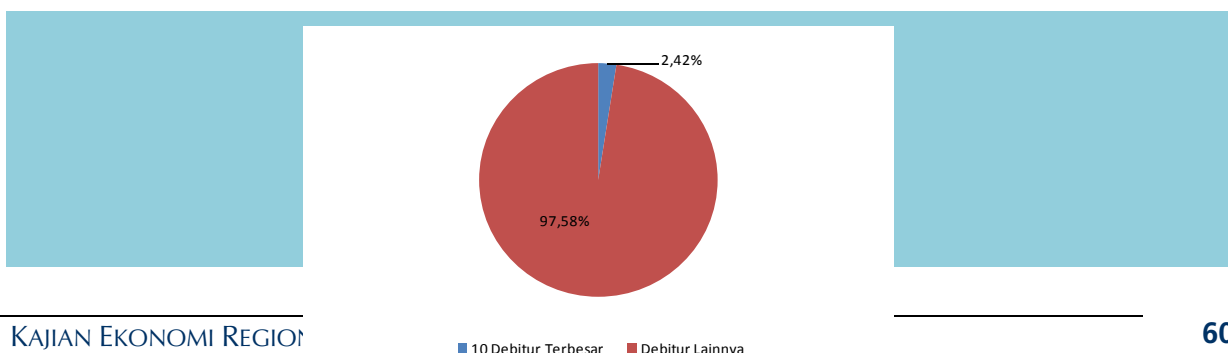
TABEL 3.8.
PERKEMBANGAN INDIKATOR BANK UMUM & BPR SYARIAH DI JAWA TENGAH
(RP. MILIAR)

INDIKATOR	I-2008	II-2008	III-2008	IV-2008	I-2009	II-2009	III-2009	IV-2009	I-2010*
Total Perbankan Syariah (BU Syariah & BPR Syariah)									
a. Aset	1.624	1.866	2.312	2.417	2.350	2.710	2.916	3.491	3.489
b. DPK	1.288	1.462	1.550	1.701	1.660	1.892	2.055	2.243	2.351
- Giro Wadiah	179	187	198	150	154	166	166	154	167
- Tab. Wadiah & Mudharabah	646	681	751	856	846	933	1.112	1.054	1.157
- Deposito Mudharabah	463	595	601	695	660	793	778	1.035	1.028
c. Pembiayaan	1.301	1.620	1.873	2.027	2.003	2.232	2.412	2.633	2.711
d. FDR (%)	100,99%	110,76%	120,87%	119,12%	120,66%	117,98%	117,37%	117,39%	115,31%
e. NPF Nominal	62,94	68,53	49,00	49,00	93,00	70,00	76,64	79,25	74,40
f. NPF (%)	4,84%	4,23%	2,62%	2,42%	4,64%	3,14%	3,18%	3,01%	2,74%
Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah									
a. Aset	1.563	1.787	2.225	2.318	2.244	2.590	2.788	3.328	3.324
b. DPK	1.247	1.415	1.495	1.637	1.588	1.810	1.804	2.132	2.238
- Giro Wadiah	179	187	198	150	154	166	166	154	167
- Tab. Wadiah & Mudharabah	625	654	721	820	807	891	1.064	990	1.093
- Deposito Mudharabah	443	574	576	666	627	753	739	989	979
c. Pembiayaan	1.259	1.566	1.808	1.958	1.925	2.143	2.314	2.526	2.602
d. FDR (%)	101,04	110,67	120,96	119,63	121,22	118,41	128,30	118,48	129,01%
e. NPF Nominal	59,59	65,37	46,00	44,00	88,00	65,00	68,92	72,17	66,53
f. NPF (%)	4,73	4,17	2,56	2,30	4,59	3,97	3,13	3,43	2,56
BPR Syariah									
a. Aset	61	78	87	100	106	120	128	163	165
b. DPK	41	48	55	65	72	82	86	111	113
- Tab. Wadiah & Mudharabah	21	26	30	36	39	42	47	65	64
- Deposito Mudharabah	20	21	25	28	33	40	39	46	49
c. Pembiayaan	42	54	65	69	78	89	98	107	109
d. FDR (%)	101,77%	113,22%	118,49%	106,19%	108,33%	108,54%	114,37%	96,44%	96,93%
e. NPF Nominal	3,35	3,16	3,00	5,00	5,00	5,00	7,72	7,08	7,88
f. NPF (%)	8,02%	5,88%	4,60%	7,30%	6,41%	5,62%	7,85%	6,61%	7,20%

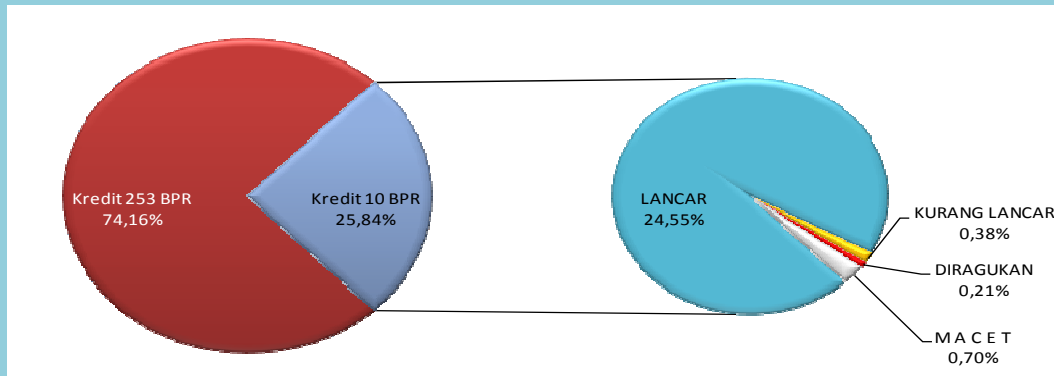
Sumber : LBU, Bank Indonesia, *)Februari 2010

3.6. Stabilitas Sistem Keuangan di Jawa Tengah

Pendekatan analisis resiko yang berpotensi untuk menimbulkan gangguan pada stabilitas sistem keuangan (SSK) di Jawa Tengah dilakukan dengan melihat performa kredit 10 debitur terbesar pada dua bank umum umum yang berkantor pusat di Jawa Tengah dan performa 10 BPR yang mempunyai aset terbesar di Jawa Tengah. Porsi kredit dari 10 debitur terbesar di bank yang berkantor pusat di Jawa Tengah pada triwulan I-2010 sangat kecil, yaitu sebesar Rp266,99 Miliar atau 2,24% dari total kredit yang disalurkan oleh dua bank berkantor pusat di Jawa Tengah yaitu Rp11,01 Triliun. Selain itu, kolektibilitas kredit 10 debitur tersebut tergolong lancar, sehingga potensi gangguan stabilitas sistem keuangan bank umum yang berkantor pusat di Jawa Tengah yang disebabkan oleh 10 debitur terbesarnya sangat rendah.



GRAFIK 3.21.
PORSI KREDIT 10 DEBITUR TERBESAR BANK UMUM DI JAWA TENGAH TRIWULAN I-2010



GRAFIK 3.22.
PORSI KREDIT 10 BPR TERBESAR DI JAWA TENGAH TRIWULAN I-2010

Sementara itu, porsi aset 10 BPR terbesar di Jawa Tengah mencapai 19,96% dari Rp. 9,14 triliun total aset BPR Jawa Tengah atau sebesar Rp. 2,28 triliun. Penyaluran kredit BPR pada kelompok ini memiliki porsi sebesar 25,84% dari total kredit BPR di Jawa Tengah atau mencapai Rp. 1,92 triliun. Walaupun tingkat penyaluran kredit cukup besar, namun tingkat NPLs-nya berada dalam level yang aman, yaitu sebesar 4,96%. Dengan demikian, potensi resiko kredit sistem perbankan (BU dan BPR) di Jawa Tengah yang dapat mengancam kestabilan sistem keuangan baik secara regional maupun nasional relatif kecil dan masih terkendali.



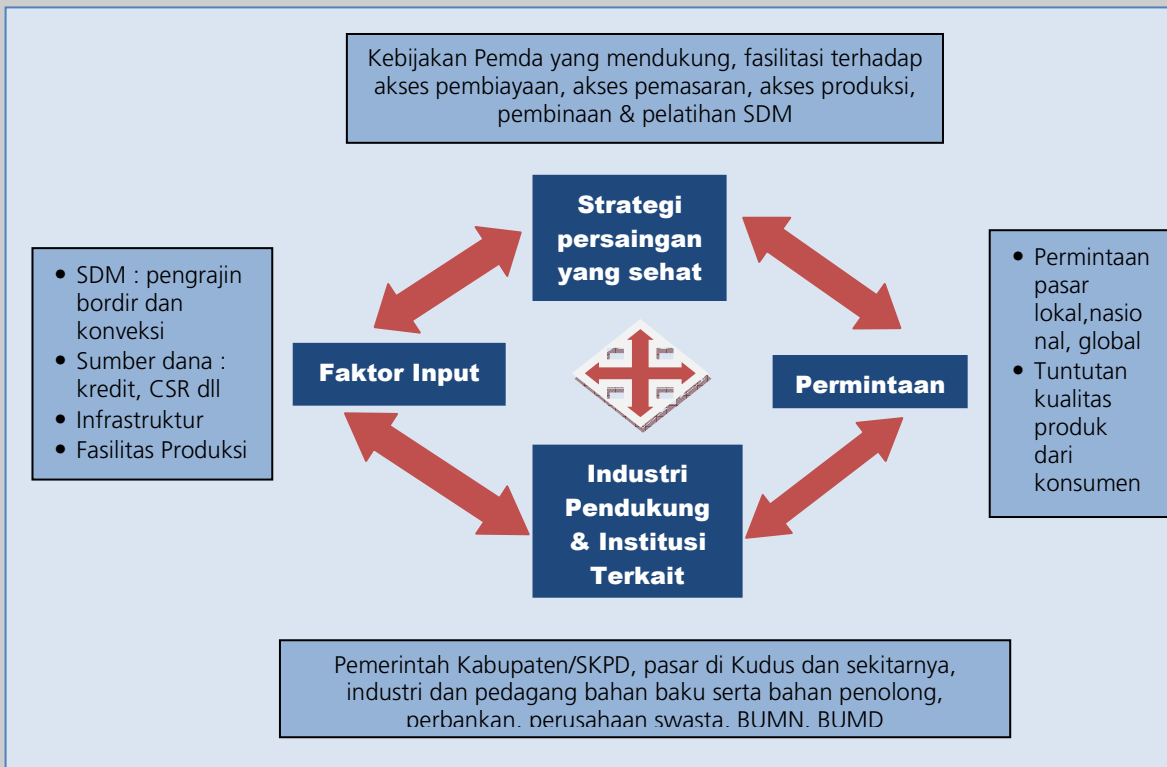
BOKS III

LESSON LEARNT IMPLEMENTASI *DIAMOND CLUSTER* DALAM PENGEMBANGAN KLASTER BORDIR DAN KONVEKSI DI PADURENAN KUDUS

1. PROGRESS IMPLEMENTASI *DIAMOND CLUSTER*

Dalam rangka implementasi program pengembangan sektor riil dan UMKM KBI Semarang telah melakukan kesepakatan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk turut serta mengembangkan perekonomian Jawa Tengah. Salah satu implementasi yang dilakukan adalah membangun Desa Produktif Klaster Bordir dan Konveksi di Padurenan Kudus melalui pendekatan *Diamond Cluster*, kerjasama antara KBI Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Kudus, Bank Jateng, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan GTZ RED.

Dalam mengimplementasikan pendekatan *Diamond Cluster* (Michael Porter, 1998), dipergunakan pula *tools value chain* untuk mengidentifikasi potensi dan kendala dalam klaster sebagai arah untuk menghidupkan *diamond* dalam klaster bordir dan konveksi di Padurenan Kudus. Adapun matriks *Diamond model* oleh Michael Porter adalah sebagai berikut :



Adapun fasilitasi yang dilakukan tim fasilitator beserta hasilnya adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Fasilitasi dan Pencapaian

NO.	KOMPONEN	FASILITASI YANG TELAH DILAKUKAN	PENCAPAIAN
1.	Input : - Bahan baku - SDM : - Sumber dana : - Infrastruktur dan fasilitas produksi	- Mendorong klaster untuk melakukan joint supply dalam wadah CM yang dikelola KSU Padurenan Jaya - Pelatihan bagi UMKM (konveksi dan bordir), studi banding sistem operasionalisasi koperasi - Akses pendanaan investasi dan modal kerja dari Bank Jateng, - Mendorong Pemkab dan Pemprov untuk membangun infrastruktur desa produktif klaster bordir dan konveksi di Padurenan. - bantuan mesin jahit <i>high speed</i> dari Pemkab Kudus, bantuan <i>mannequin</i> dari Depnakertrans RI	- Terbangun <i>joint supply</i> bahan pembantu dalam klaster melalui wadah CM yang dikelola KSU Padurenan Jaya melalui dana dari Bank Jateng, sehingga anggota klaster memperoleh bahan pembantu dengan lebih mudah dan harga bersaing - Peningkatan ketrampilan dan kompetensi UMKM untuk peningkatan kualitas produk.
2.	Kondisi Permintaan	- Market Survey dari GTZ dan Bank Jateng, - fasilitasi dalam pameran di level regional dan nasional (pameran dan peragaan busana desainer Ramli)	Teridentifikasi produk yang <i>demandnya</i> tinggi serta pasar yang perlu dikembangkan
3.	Industri pendukung dan institusi terkait	Dukungan dari tim fasilitator Desa Produktif klaster bordir dan konveksi Padurenan yang terdiri dari SKPD, perbankan dan GTZ RED	Tercapai koordinasi di antara stakeholders yang terlibat dalam tim fasilitasi sesuai Tupoksi masing-masing
4.	Strategi persaingan yang sehat	- Kebijakan Pemda untuk mendukung pelaksanaan program desa produktif klaster bordir dan konveksi Padurenan Kudus, - Fasilitasi implementasi cluster management dalam wadah KSU Padurenan Jaya.	Meningkatnya modal sosial dalam klaster melalui operasionalisasi KSU Padurenan Jaya sebagai embrio <i>Cluster Management</i>

2. **LESSON LEARNT** IMPLEMENTASI **DIAMOND CLUSTER**

Dengan mengadopsi pendekatan *Diamond Cluster* yang digunakan Porter (1998) dan penggunaan *value chain* dalam mengidentifikasi *bottleneck*, upaya fasilitasi dilakukan untuk menghidupkan komponen dalam *Diamond Cluster* yaitu komponen input, kondisi permintaan, industri pendukung dan terkait serta strategi persaingan yang sehat dalam mencapai peningkatan daya saing klaster. Dalam perjalanan intervensi tim terdapat fasilitasi dari GTZ RED yang akan diimplementasikan dalam mengefektifkan klaster yaitu penggunaan model Manajemen Klaster (*Cluster Management./CM*). Manajemen Klaster adalah pengembangan dan implementasi suatu struktur, proses, piranti dan kapabilitas organisasional yang sesuai, agar klaster tersebut menjadi suatu klaster yang efektif. Tujuan utama klaster manajemen adalah untuk memaksimalkan manfaat ekonomi anggota klaster serta daya saing mereka melalui: (i) peningkatan kekuatan inovasi dengan menggabungkan kompetensi dan sumber daya, (ii) meningkatkan produktivitas melalui penyediaan akses

yang lebih baik kepada faktor produksi dan diseminasi teknologi-teknologi produksi dan piranti-piranti manajemen terkini, serta (iii) memfasilitasi komersialisasi melalui pemasaran dan distribusi bersama.

Dalam kluster bordir dan konfeksi Padurenan, implementasi manajemen kluster ini akan diwujudkan dalam bentuk aktivitas dari CM tersebut di dalam wadah Koperasi Serba Usaha Padurenan Jaya yang telah diresmikan pada tanggal 9 Agustus 2009. Berdasarkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) telah dilakukan progress review kegiatan selama 2009 untuk menyusun *business plan* KSU Padurenan Jaya yang terintegrasi dengan aktivitas embrio CM ke depan. Dalam *business plan* KSU terdapat tiga kegiatan yang disepakati untuk dilaksanakan, yaitu simpan pinjam dalam kerangka koperasi, *joint supply* bahan pembantu, dan *joint marketing* sebagai aktivitas dalam kerangka koperasi dan CM. Melalui kesepakatan inilah yang akan menjadi visi bersama anggota kluster dalam melaksanakan aktivitas ke depan.

Di samping itu pencapaian kualitatif yang juga perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan aktivitas ke depan adalah sebagai berikut : 1) dari sisi produk : terciptanya bordir berkualitas tinggi yang diaplikasikan dalam rancangan busana desainer Ramli, munculnya jenis-jenis produk baru seperti *handycraft* dan lukisan bordir hasil pelatihan inovasi bordir; 2) dari sisi aktivitas kluster (modal sosial) adalah beroperasinya *embrio cluster management (CM) dalam wadah* KSU Padurenan Jaya beserta aktivitas CM berupa *joint supply* bahan pembantu dalam kluster.

Berdasarkan implementasi intervensi untuk melakukan *upgrading* di Padurenan, *lesson learnt* yang diperoleh tim fasilitator pengembangan desa produktif kluster bordir dan konveksi di Padurenan, Kudus adalah sebagai berikut :

1. Dari sisi metodologi : pendekatan *Diamond Cluster* dapat dipergunakan untuk melakukan pemetaan kondisi kluster yang sudah ada berdasarkan komponen dalam *Diamond Cluster*, yang selanjutnya diperlukan penggunaan metode lain dalam hal ini *value chain* untuk mengidentifikasi potensi dan kendala dalam kluster
2. Dari sisi UMKM : (a) peningkatan *awareness* konsumen di level regional dan nasional mengenai produk Padurenan harus diimbangi dengan peningkatan kualitas produk dan produktifitas faktor-faktor produksi; (b) masih diperlukan peningkatan modal sosial dalam kluster sehingga UMKM harus bersedia untuk saling bekerjasama dan berkompetisi secara *fair* dalam kluster, (c) peningkatan pemahaman mengenai pemasaran (kebutuhan pasar, tren pasar, kompetitor) dan bahan baku serta bahan pembantu
3. Bagi Tim Fasilitator : masih diperlukan upaya koordinasi yang lebih intensif dalam tim dan upaya lanjutan untuk membangun kemitraan dengan pihak-pihak lain yang dapat meningkatkan akselerasi peningkatan daya saing dalam kluster.

Tabel 2
Komponen dalam Diamond Cluster

NO.	KOMPONEN	FAKTOR-FAKTOR
1.	Input	Bahan baku, SDM, sumber dana, infrastruktur, fasilitas produksi.
2.	Kondisi Permintaan	Pasar lokal, nasional dan global serta tuntutan kualitas produk dari konsumen
3.	Industri pendukung dan institusi terkait	Pemerintah Kabupaten/SKPD, pasar di Kudus dan sekitarnya, industri dan pedagang bahan baku serta bahan penolong, perbankan, perusahaan swasta, BUMN, BUMD
4.	Strategi persaingan yang sehat	Kebijakan Pemda yang mendukung, fasilitasi terhadap akses pembiayaan, akses pemasaran, akses produksi, pembinaan dan pelatihan SDM



Bab 4

Keuangan Daerah

Realisasi pendapatan pemerintah provinsi Jawa Tengah pada triwulan I-2010 tercatat sejumlah Rp 1,5 triliun atau sebesar 27,27% dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya, jauh lebih tinggi dibanding realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp. 729 miliar (21,79%). Realisasi total belanja daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I-2010 tercatat sebesar 8,44% atau Rp 477 miliar, lebih tinggi dari realisasi belanja triwulan I-2009 yang tercatat sebesar Rp. 328 miliar (6,17%).⁸

4.1. Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah total penerimaan dana yang diperoleh oleh daerah pada suatu periode waktu tertentu. Besarnya nilai pendapatan daerah merupakan ukuran besarnya kemampuan fiskal suatu daerah. Semakin besar pendapatan maka semakin besar pula kekuatan fiskal daerah. Untuk itu suatu daerah hendaknya dapat memaksimalkan setiap potensi penerimaan pendapatan daerahnya, sehingga dapat memberikan ruang gerak kebijakan fiskal yang lebih luas.

Realisasi pendapatan pemerintah provinsi Jawa Tengah pada triwulan I-2010 tercatat sejumlah Rp 1,5 triliun atau sebesar 27,27% dari anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Realisasi tersebut telah melampaui target triwulanan sebesar 25%. Berdasarkan komponennya (Tabel 4.1), realisasi PAD tercatat sebesar Rp 1 triliun atau 27,28% dari target yang terdiri dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp 874 miliar (Realisasi 29,22%), retribusi daerah Rp 26,8 miliar (22,01%) serta realisasi dana perimbangan tahun 2009 sebesar Rp 461 miliar atau 26,23%. Realisasi pendapatan triwulan I-2010 ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya baik dari segi jumlah maupun persentasenya. Realisasi pendapatan triwulan I-2009 tercatat sebesar Rp 729 miliar atau 21,79% dari target APBD 2009.

⁸ Keuangan daerah dari sektor pemerintah yang disampaikan dalam laporan kajian ini hanya mencakup realisasi anggaran pemerintah daerah tingkat provinsi Jawa Tengah, sedangkan keuangan daerah dari realisasi anggaran 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah belum dapat tersajikan dalam laporan karena masalah keterbatasan data realisasi yang diperoleh.

TABEL 4.1
REALISASI PENDAPATAN DAERAH APBD TRIWULAN I-2010 (RP JUTA)

NO	URAIAN	APBD 2009	APBD 2010	REALISASI			
				TW I-09	% APBD-09	TW I-10	% APBD-10
A	PENDAPATAN						
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3,636,424.56	3,729,061.65	792,527.21	21.79	1,017,341.87	27.28
	- Pajak Daerah	2,954,766.26	2,994,000.00	733,087.05	24.81	874,853.98	29.22
	- Retribusi Daerah	137,255.03	122,037.79	25,429.98	18.53	26,855.46	22.01
	- Hasil Pengelolaan Kekay. Daerah Yg Dipisahkan	147,109.55	164,780.77	9.57	0.01	2,074.80	1.26
	- Lain-Lain PAD Yang Sah	397,293.72	448,243.09	34,045.61	8.57	113,557.63	25.33
2	DANA PERIMBANGAN	1,583,628.64	1,757,663.52	424,106.77	26.78	461,121.95	26.23
	- Dana Bagi Hsl Pjk/Bukan Pjk	530,136.77	551,136.77	47,192.57	8.90	60,204.33	10.92
	- Dana Alokasi Umum	1,053,491.87	1,168,787.76	376,914.20	35.78	389,595.92	33.33
	- Dana Alokasi Dana Khusus		37,739.00			11,321.70	30.00
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		24,490.16			24,590.16	100.41
	-Hibah						
	-Dana Peny. dan Otonomi Khusus						
	-Dana Insentif Daerah		24,490.16			24,590.16	100.41
	JUMLAH PENDAPATAN	5,220,053.20	5,511,215.33	1,216,633.98	23.31	1,503,053.98	27.27

Sumber : Biro Keuangan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

TABEL 4.2
REALISASI BELANJA DAERAH APBD TRIWULAN I-2010 (RP JUTA)

NO	URAIAN	APBD 2009	APBD 2010	REALISASI			
				TW I-09	% APBD-09	TW I-10	% APBD-10
B	BELANJA						
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3,294,564.45	3,536,530.67	194,592.12	5.91	255,710.50	7.23
	- Belanja Pegawai	1,096,375.72	1,177,100.16	158,350.09	14.44	208,618.57	17.72
	- Belanja Bunga						
	- Belanja Subsidi						
	- Belanja Hibah	87,140.17	53,543.77	15,400.67	17.67	11,223.98	20.96
	- Belanja Bantuan Sosial	424,096.43	234,377.01	6,455.19	1.52	2,602.50	1.11
	- Belanja Bagi Hasil Kpd Kab/Kota	1,133,780.78	1,121,525.23	1,609.66	0.14	257.99	0.02
	- Blnj Bant.Keuang. kpd Kab/Kota	528,171.35	914,984.50	11,455.00	2.17	31,400.14	3.43
	- Belanja Tidak Terduga	25,000.00	35,000.00	1,321.50	5.29	1,607.32	4.59
2	BELANJA LANGSUNG	2,026,649.80	2,128,785.01	133,494.30	6.59	222,181.35	10.44
	- Belanja Pegawai	231,057.62	224,897.22	23,254.55	10.06	29,949.51	13.32
	- Belanja Barang dan Jasa	1,278,095.80	1,433,478.88	97,812.57	7.65	186,476.81	13.01
	- Belanja Modal	517,496.37	470,408.91	12,427.18	2.40	5,755.03	1.22
	JUMLAH BELANJA	5,321,214.25	5,665,315.68	328,086.42	6.17	477,891.85	8.44
	SURPLUS/DEFISIT	(529,165.30)	(324,922.63)	4,939,083.09		5,218,134.79	

Sumber : Biro Keuangan, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

4.2. Realisasi Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan salah satu instrumen fiskal daerah yang paling signifikan di samping pajak dan retribusi daerah. Besarnya belanja daerah ini akan mencerminkan peranan pemerintah daerah terhadap perekonomian daerah. Sebagai instrumen fiskal, besarnya belanja daerah ini juga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Realisasi belanja daerah yang besar merupakan indikasi peran fiskal daerah yang ekspansif, yang diharapkan dapat

berpengaruh positif dalam peningkatan output daerah, selain investasi daerah dan ekspor daerah.

Realisasi total belanja daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada triwulan I-2010 tercatat sebesar 8,44% atau Rp 477 miliar. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, realisasi penyerapan belanja pemerintah provinsi triwulan I-2010 juga masih relatif kecil karena belum mencapai 25% dari total anggaran yang direncanakan. Namun bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya masih sedikit lebih baik karena pada triwulan I-2009 hanya terealisasi sebesar Rp. 328 miliar atau 6,17%.

1. Belanja Tidak Langsung :

Realisasi Belanja Tidak Langsung (BTL) triwulan ini tercatat senilai Rp 255 miliar atau sebesar 7,23%. Angka rasio realisasi belanja tidak langsung terbesar adalah realisasi belanja hibah yaitu sebesar 20,96%. Berikutnya adalah pos belanja pegawai sebesar 17,72% yang sebagian besar dipergunakan untuk pembayaran gaji. Sementara belanja bantuan keuangan kepada Kab/Kota/Desa dan bagi hasil kepada Kab/Kota/Desa masih tergolong sangat kecil yaitu sebesar 3,43% dan 0,02%. Rasio realisasi belanja tidak langsung triwulan ini juga masih tergolong sedikit lebih baik dibanding realisasi triwulan yang sama tahun sebelumnya yang hanya tercatat sebesar 5,91%.

2. Belanja Langsung :

Realisasi Belanja Langsung triwulan ini tercatat sebesar 10,44% atau senilai Rp222 miliar (**tabel 4.2**). Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa masing-masing terealisasi sebesar 13,32% dan 13,01%. Realisasi belanja modal yang diharapkan menjadi salah satu sumber pendorong investasi daerah justru tercatat sangat kecil yaitu hanya sebesar 1,22%. Secara umum, realisasi belanja langsung triwulan ini juga masih relatif lebih baik dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,59%, namun untuk realisasi belanja modal triwulan ini masih lebih rendah bila dibandingkan triwulan I-2009 yang tercatat sebesar 2,40%.



Halaman ini sengaja dikosongkan

Bab 5

Perkembangan Sistem Pembayaran

Perkembangan Sistem Pembayaran sampai dengan triwulan I-2010 masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi ekonominya. Secara umum aliran uang masuk (inflow) ke KBI di wilayah Jawa Tengah, maupun aliran keluar (outflow) menunjukkan penurunan dibanding triwulan sebelumnya. Sementara itu pada transaksi keuangan non tunai, nilai dan volume transaksi pembayaran melalui Bank Indonesia, yaitu Kliring dan RTGS, untuk wilayah Jawa Tengah pada triwulan I-2010 ini juga mengalami penurunan. Jumlah uang tidak layak edar di Jawa Tengah yang dimusnahkan pada triwulan I-2010 ini tercatat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara temuan uang palsu rata-rata per bulan di Jawa Tengah, terdapat tren penurunan dibandingkan dengan tahun 2009.

Sistem Pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan kegiatan pemindahan dana dari satu pihak kepada pihak lain yang melibatkan berbagai komponen sistem pembayaran, antara lain alat pembayaran, kliring, dan *Real Time Gross Settlement* (RTGS). Sebagai representasi Bank Indonesia di daerah, Kantor Bank Indonesia (KBI) Semarang mempunyai tugas menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non tunai di Jawa Tengah. Dalam rangka mendukung kelancaran aktivitas perekonomian Jawa Tengah, KBI Semarang senantiasa mengupayakan kelancaran sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal di wilayah kerjanya.

5.1. Perkembangan Transaksi Pembayaran Tunai

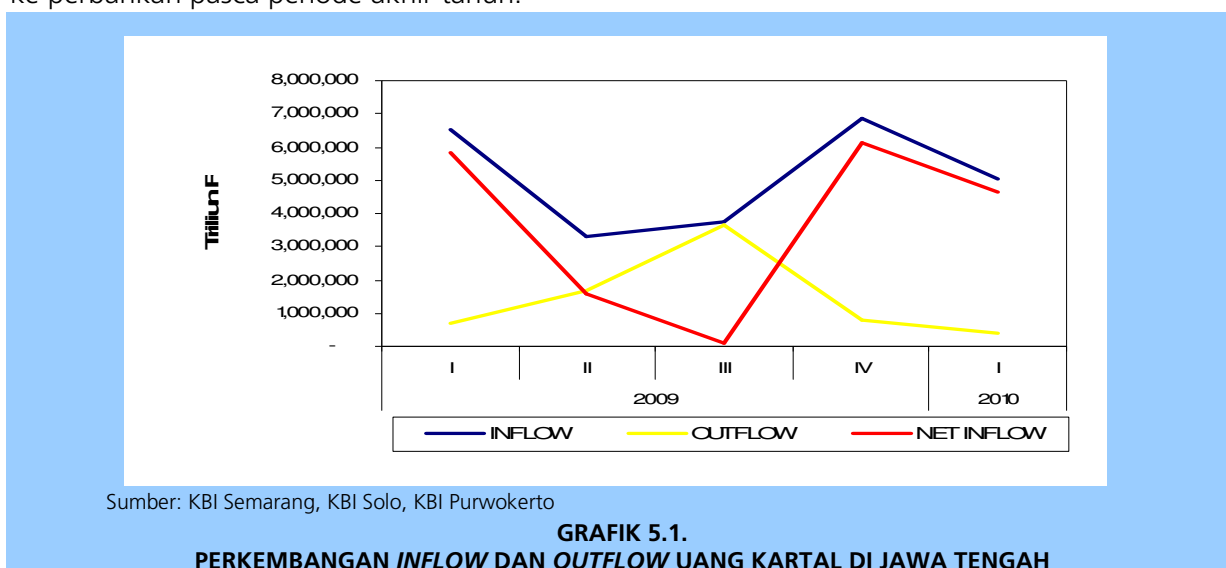
5.1.1. Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (Inflow/Outflow)

Perkembangan aliran uang kartal pada triwulan I-2010 di wilayah Jawa Tengah (KBI Semarang, KBI Solo, dan KBI Purwokerto) mengalami *net inflow*, yaitu jumlah aliran uang masuk ke Bank Indonesia (*inflow*) lebih besar dibandingkan jumlah aliran uang yang keluar ke masyarakat (*outflow*). Pada triwulan I-2010, *inflow* yang terjadi di KBI wilayah Jawa Tengah mengalami penurunan sebesar -26,73% dibandingkan periode triwulan yang lalu (qtq) menjadi Rp5,04 triliun, sedangkan apabila dibandingkan posisi yang sama tahun lalu (yoy) mengalami penurunan sebesar -22,88%.

Sementara itu, *outflow* yang terjadi pada KBI di wilayah Jawa Tengah pada triwulan I-2010 tercatat sebesar Rp372 miliar, mengalami penurunan sebesar -52,12% (qtq) dibandingkan triwulan IV-2009, dan mengalami penurunan sebesar -46,98% bila dibandingkan dengan

outflow pada triwulan I-2009 (yoy). Nilai *inflow* yang lebih besar dibandingkan *outflow* menyebabkan terjadi *net inflow* sebesar Rp4,67 triliun atau mengalami kontraksi sebesar -19,98% (yoy). Kontraksi yang cukup besar ini disebabkan terjadinya pergeseran pola *period inflow outflow* yang telah mencapai puncaknya pada triwulan IV-2009. Hari Raya Idul Fitri pada triwulan III-2009 merupakan salah satu penyebab pergeseran siklus ini.

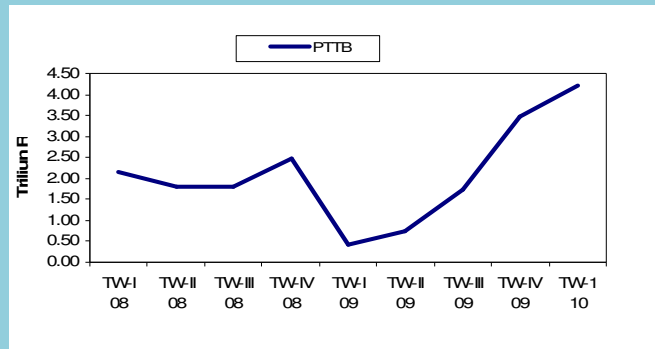
Pada triwulan I-2010, seluruh KBI di wilayah Jawa Tengah (KBI Semarang, KBI Solo, dan KBI Purwokerto) mengalami *net inflow* masing-masing sebesar Rp2,88 triliun, Rp1,26 triliun, dan Rp522 miliar. Kondisi ini disebabkan faktor musiman yaitu mengalirnya kembali dana masyarakat ke perbankan pasca periode akhir tahun.



5.1.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar / Penyediaan Tanda Tidak Berharga (PTTB) Uang Kartal

Dalam transaksi tunai, KBI Semarang berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar (*clean money policy*). Secara berkala BI melaksanakan pemusnahan terhadap uang yang sudah tidak layak edar (UTLE) melalui kegiatan yang diberi nama Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB). Proses pemusnahan tersebut dilakukan melalui suatu prosedur dan pengawasan pelaksanaan pemusnahan uang yang ketat serta menetapkan standar tingkat kelusuhan uang yang dapat dimusnahkan.

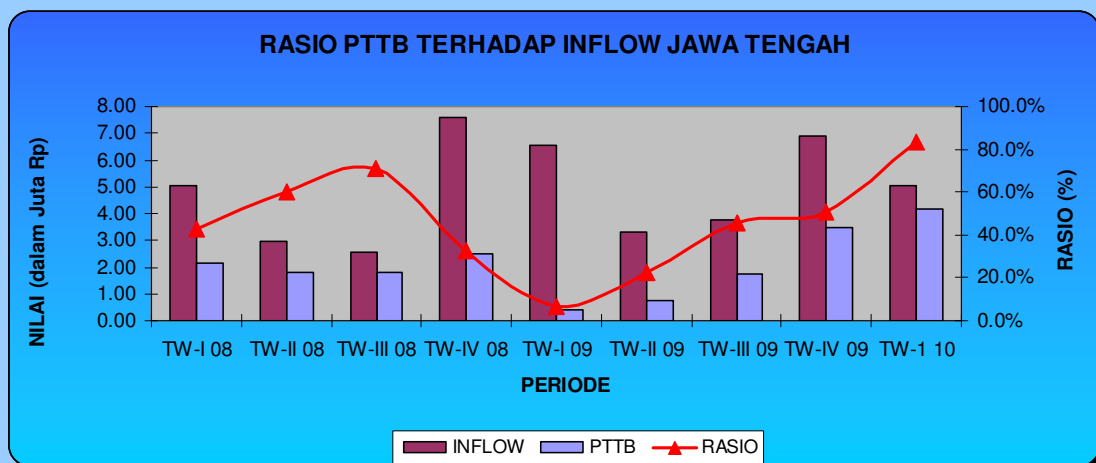
Jumlah uang tidak layak edar di Jawa Tengah yang dimusnahkan pada triwulan I-2010 ini tercatat sebesar Rp4,2 triliun, mengalami peningkatan sebesar 918% (yoy) dibandingkan jumlah PTTB pada triwulan I-2009 yang sebesar Rp412 miliar. Sementara itu apabila dibandingkan dengan PTTB pada triwulan sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 21,25% (qtq). Budaya dan perilaku masyarakat yang kurang baik dalam memperlakukan uang kertas seperti melipat, men-staples, meremas dan mencoret-coret akan mempercepat kelusuhan uang kertas. Selain itu, karena faktor iklim tropis yang lembab juga akan mempercepat tingkat kelusuhan uang kertas.



Sumber: KBI Semarang, KBI Solo, KBI Purwokerto

GRAFIK 5.2.
PERKEMBANGAN PTTB DI JAWA TENGAH

Sementara itu, rasio PTTB terhadap *cash inflow* di Jawa Tengah pada triwulan I-2010 tercatat sebesar 83,4%, mengalami kenaikan dibandingkan rasio pada triwulan IV-2009 yang sebesar 50,4%. Kenaikan rasio PTTB terhadap *cash inflow* dan kenaikan PTTB yang cukup signifikan ini dipengaruhi oleh peningkatan jumlah *inflow* pada triwulan IV-2009.



Sumber: KBI Semarang, KBI Solo, KBI Purwokerto

GRAFIK 5.3.
RASIO CASH INFLOW TERHADAP PTTB JAWA TENGAH

5.1.3. Uang Palsu

Pada triwulan I-2010, jumlah uang palsu yang ditemukan dan dilaporkan ke KBI di Jawa Tengah (KBI Semarang, KBI Solo, dan KBI Purwokerto) adalah sebanyak 1.903 lembar. Nominal pecahan uang palsu yang paling banyak ditemukan adalah pecahan Rp50.000,00 dengan porsi sebesar 42,93% dari seluruh jumlah uang palsu yang ditemukan, diikuti oleh pecahan Rp100.000,00 dengan porsi 35,63% dari seluruh jumlah uang palsu yang ditemukan.

Dari rata-rata per bulan temuan uang palsu di Jawa Tengah, pada tahun 2010 terdapat tren penurunan jumlah uang palsu yang ditemukan dibandingkan dengan tahun 2009. Upaya Bank Indonesia untuk terus menggalakkan publikasi dan sosialisasi terhadap ciri-ciri keaslian uang Rupiah kepada masyarakat, serta terus melakukan koordinasi dan langkah pencegahan dengan

kalangan perbankan dan kepolisian berangsur-angsur dapat mengurangi maraknya peredaran uang palsu di masyarakat.

5.2. Transaksi Keuangan secara Non Tunai

Seiring dengan berkembangnya perekonomian, kebutuhan masyarakat akan kecepatan, kehandalan, dan keamanan dalam bertransaksi semakin meningkat. Bank Indonesia secara terus menerus melakukan penyempurnaan dan pengembangan terhadap sistem yang telah ada. Dalam transaksi non tunai, KBI Semarang selalu berusaha menjaga kelancaran sistem pembayaran yang efektif melalui penyelenggaraan kliring dan Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS).

5.2.1. Transaksi Kliring⁹

Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring, dan perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Pada triwulan I-2010, transaksi sistem pembayaran non tunai melalui kliring di wilayah Jawa Tengah, yang dilaksanakan melalui KBI Semarang, KBI Solo, dan KBI Purwokerto, secara volume maupun nominal mengalami penurunan dibanding dengan triwulan sebelumnya, kecuali KBI Tegal yang mengalami kenaikan baik secara nominal maupun volume transaksi kliring. Transaksi kliring di Jawa Tengah secara nominal mengalami penurunan sebesar -5,51% (qtq) dibandingkan triwulan IV-2009, yaitu dari Rp21,87 triliun menjadi Rp20,67 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, mengalami kenaikan sebesar 13,77% (yoy) yaitu dari Rp18,16 triliun menjadi Rp20,67 triliun.

Secara volume, lembar warkat yang dikliringkan, juga mengalami penurunan sebesar -1,32% (qtq) dari 776.831 warkat pada triwulan IV-2009 menjadi 766.606 warkat pada triwulan I-2010. Sedangkan secara tahunan mengalami kenaikan sebesar 13,88% (yoy) dari 673.141 warkat menjadi 766.831 warkat. Sama halnya dengan perkembangan pengedaran uang tunai, perlambatan nilai transaksi kliring ini disebabkan karena faktor musiman.

TABEL 5.1.
PERKEMBANGAN TRANSAKSI KLIRING LOKAL DI JAWA TENGAH

Wilayah	2009				2010	Growth Tw I-10	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	qtq	yoy
Jawa Tengah							
Nominal (Triliun Rp)	18.16	16.18	20.42	21.87	20.67	-5.51%	13.77%
Volume	673,141	744,887	747,497	776,831	766,606	-1.32%	13.88%
Semarang							
Nominal (Triliun Rp)	9.62	7.94	11.47	12.60	11.47	-8.96%	19.21%
Volume	388,526	459,543	449,751	471,408	459,094	-2.61%	18.16%
Solo							
Nominal (Triliun Rp)	6.47	6.59	6.68	7.04	6.96	-1.10%	7.52%
Volume	187,939	210,348	209,711	211,997	207,857	-1.95%	10.60%
Purwokerto							
Nominal (Triliun Rp)	1.28	1.33	1.45	1.51	1.44	-4.54%	12.17%
Volume	56,022	57,900	46,002	60,771	61,255	0.80%	9.34%
Tegal							
Nominal (Triliun Rp)	0.78	0.32	0.82	0.72	0.79	9.72%	1.12%
Volume	40,654	17,096	42,033	32,655	38,400	17.59%	-5.54%

Sumber: KBI Semarang, KBI Solo, KBI Purwokerto dan website BI

⁹ Kliring adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar peserta kliring, dan perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

Kualitas kliring di wilayah Jawa Tengah pada triwulan I-2010 ini relatif baik. Hal ini ditunjukkan dari persentase tolakan kliring terhadap total kliring, dimana persentase secara nominal dan volume cek dan BG yang ditolak masing-masing sebesar 1,26% dan 1,40%.

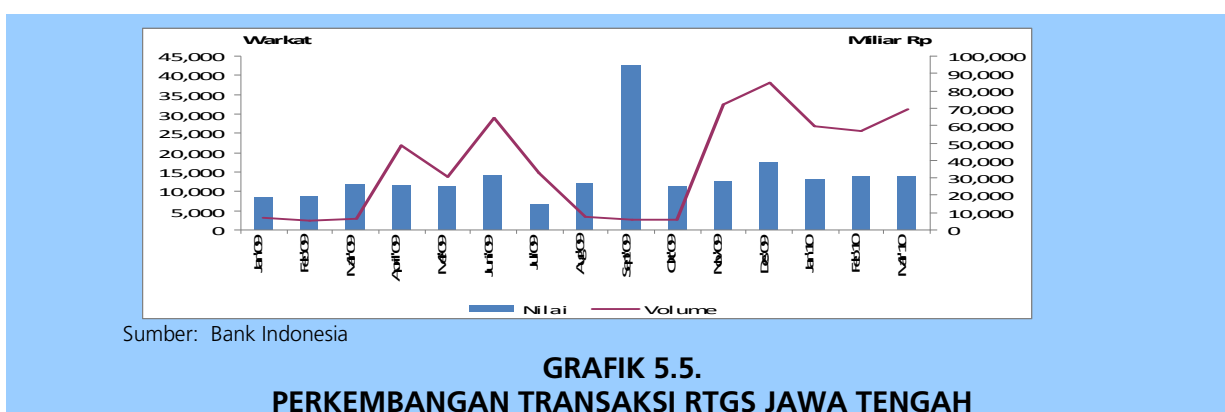
TABEL 5.2.
TOLAKAN KLIRING

No	Wilayah	Cek/BG Kosong Tw I-10		Kliring Tw I-10		Persentase	
		Vol (lembar)	Nominal (triliun)	Vol (lembar)	Nominal (triliun)	Vol (%)	Nominal (%)
1	PURWOKERTO	603	0.02	61,255	1.44	0.98%	1.17%
2	SEMARANG	6,341	0.17	459,094	11.47	1.38%	1.47%
3	SOLO	2,977	0.06	207,857	6.96	1.43%	0.86%
4	TEGAL	837	0.01	38,400	0.79	2.18%	1.86%
TOTAL		10,758	0.26	766,606	20.67	1.40%	1.26%

5.2.2. Transaksi RTGS¹⁰

Penerapan Sistem BI-RTGS di Indonesia dimulai sejak tanggal 17 November 2000, dan kehadiran sistem ini sebagai sarana *settlement* (penyelesaian akhir transaksi pembayaran) sangat penting, mengingat transaksi pembayaran perbankan bernilai besar merupakan mayoritas dari total transaksi pembayaran di Indonesia. Selain itu, dengan mekanisme sistem ini, resiko gagal bayar dapat diminimalisir karena penyelesaian transaksi dilakukan per individual transaksi.

Pada triwulan I-2010, transaksi non tunai melalui BI-RTGS secara tahunan mengalami peningkatan, namun secara triwulanan nilai transaksinya menurun. Rata-rata volume transaksi RTGS per bulan meningkat sebesar 14,01% (qtq) dari rata-rata per bulan pada triwulan IV-2009, yaitu dari sebanyak 24.466 transaksi menjadi 27.893 transaksi pada triwulan I-2010. Sementara itu, nominal transaksi secara triwulanan menurun sebesar -2,01% (qtq) dari Rp30,57 triliun menjadi Rp29,96 triliun. Secara tahunan, total nominal dan volume transaksi RTGS pada triwulan I-2010 meningkat masing-masing sebesar 40,65% (yoy) dan 872,72% (yoy).



¹⁰ Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang Rupiah, yang penyelesaian transaksi dilakukan secara seketika (*real time*).

Halaman ini sengaja dikosongkan

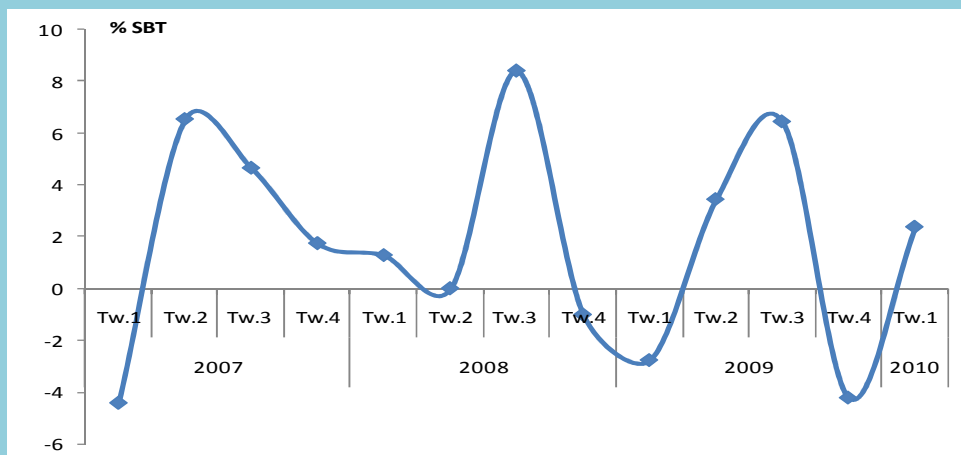
Bab 6

Kesejahteraan Masyarakat

Secara umum, perkembangan kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah pada triwulan I-2010 menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan triwulan IV-2009. Tercermin dari tingkat penggunaan tenaga kerja yang secara umum mengalami peningkatan walaupun terdapat penurunan di beberapa sektor dan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP).

6.1 Ketenagakerjaan

Perkembangan ketenagakerjaan di Jawa Tengah pada triwulan I-2010 menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) yang dilakukan Bank Indonesia Semarang, dimana Saldo Bersih Tertimbang (SBT)¹¹ realisasi penggunaan tenaga kerja pada triwulan I-2010 sebesar 2,36%, meningkat signifikan jika dibandingkan triwulan IV-2009 sebesar -4,23% (**Grafik 6.1**).



Sumber : SKDU KBI Semarang

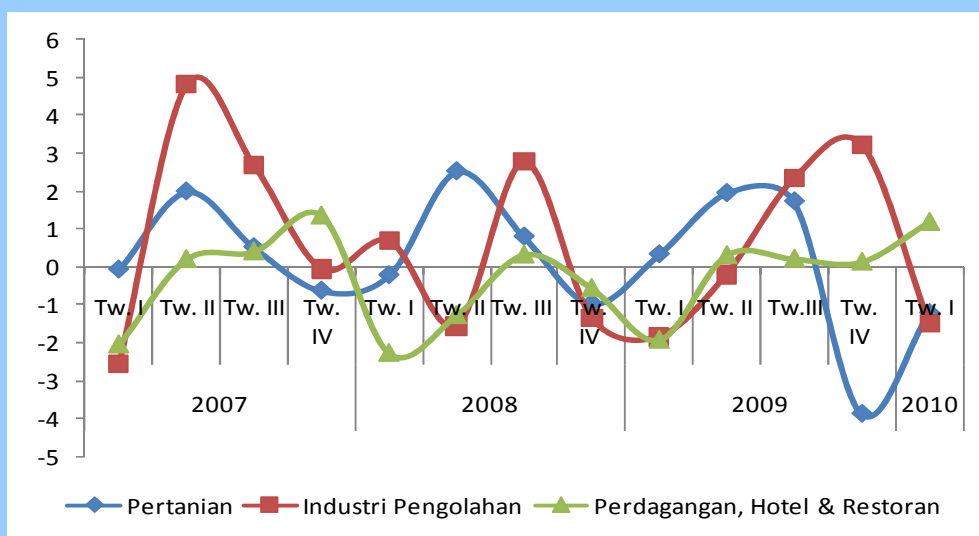
GRAFIK 6.1.
PENGUNAAN TENAGA KERJA DI JAWA TENGAH

Berdasarkan tiga sektor ekonomi utama di Jawa Tengah, peningkatan realisasi penggunaan tenaga kerja tersebut dipicu oleh peningkatan penggunaan tenaga kerja di sektor PHR dan sektor pertanian, walaupun penggunaan tenaga kerja di sektor pertanian masih berada di level negatif dari -3,89% pada triwulan IV-2009 menjadi -0,28% pada triwulan ini (**Grafik 6.2**). Peningkatan penggunaan tenaga kerja di sektor pertanian tersebut diperkirakan karena mulai terjadinya panen di beberapa wilayah.

¹¹ SBT merupakan salah satu metode yang digunakan dalam SKDU dengan memperhitungkan selisih antara jumlah jawaban "Positif" dengan jawaban "Negatif" dari tiap sektor. Selisih tersebut kemudian dikalikan bobot tiap sektor. SBT mencerminkan perkembangan usaha di saat ini dan di masa mendatang dari tiap sektor.

Sementara itu, pada triwulan ini sektor PHR tumbuh cukup pesat. Pertumbuhan ini terutama dipicu oleh kegiatan Pemilukada sehingga menyebabkan kebutuhan tenaga kerja meningkat. Hal tersebut tercermin dari meningkatnya realisasi penggunaan tenaga kerja di sektor PHR sebesar 0,11% (qtq) menjadi 0,24% di triwulan I-2010. Kondisi ini berpengaruh pada penurunan penggunaan tenaga kerja di beberapa sektor-sektor ekonomi.

Di sisi lain, Realisasi penggunaan tenaga kerja di sektor Industri Pengolahan pada triwulan I-2010 mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan triwulan IV-2009. Dimana pada triwulan IV-2009 realisasi penggunaan tenaga kerja sektor Industri Pengolahan sebesar 3,22% turun menjadi -0,36% pada triwulan I-2010. Penurunan realisasi tenaga kerja tersebut diperkirakan karena penerapan sistem kontrak bagi pekerja di sejumlah perusahaan.



Sumber : SKDU KBI Semarang

GRAFIK 6.2.
PENGUNAAN TENAGA KERJA SEKTOR EKONOMI UTAMA JAWA TENGAH

6.2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) di provinsi Jawa Tengah pada triwulan I-2009 mengalami kenaikan sebesar 0,20% jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dimana nilai indeks NTP pada triwulan I-2010 tercatat sebesar 100,23 sedangkan NTP pada triwulan IV-2009 sebesar 100,03. Besarnya nilai indeks NTP tersebut mengindikasikan bahwa indeks harga hasil produksi pertanian lebih tinggi jika dibandingkan dengan kenaikan indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga maupun untuk keperluan produksi pertanian.

Berdasarkan sub sektor, Indeks Diterima Petani (IT) beberapa komoditas yang mengalami kenaikan jika dibandingkan triwulan sebelumnya (qtq) adalah komoditas padi palawija (2,29%), hortikultura (1,54%), peternakan (0,25%) dan perikanan (2,64%). Beberapa faktor yang menyebabkan kenaikan komoditas-komoditas tersebut adalah (1) kenaikan harga ikan yang berkisar 4%-6%, (2) kenaikan harga cabe rawit yang mencapai 17,7% (*month to month*-mtm), (3) kenaikan harga komoditas peternakan seperti kerbau, kambing, dan telur. Satu-satunya

komoditas yang mengalami penurunan adalah komoditas perkebunan sebesar -1,15% (qtq). Penurunan indeks komoditas perkebunan tersebut dipicu oleh penurunan harga produk perkebunan seperti Nilam, Cengkeh dan Jagung pipilan.

TABEL 6.3
NILAI TUKAR PETANI DI JAWA TENGAH

Kelompok/ Sub Kelompok	2008	2009				2010	Growth	
	Tw IV	Tw I	Tw II	Tw III	Tw IV	Tw I*	qtq	yoy
A Nilai Tukar Petani	102,70	98,00	98,04	99,69	100,03	100,23	0,20%	2,28%
B Indeks yang Diterima Petani (It)	118,02	113,99	114,73	118,58	119,63	121,58	1,63%	6,66%
1 Padi Palawija	114,33	104,82	107,16	110,89	113,02	115,61	2,29%	10,29%
2 Hortikultura	108,43	115,58	111,99	117,67	116,82	118,62	1,54%	2,63%
3 Perkebunan Rakyat	141,91	140,63	142,15	145,49	144,69	143,03	-1,15%	1,71%
4 Peternakan	134,96	135,71	134,28	136,17	136,85	137,19	0,25%	1,09%
5 Perikanan	121,65	124,62	126,07	130,14	129,26	132,67	2,64%	6,46%
C Indeks yang Dibayar Petani (Ib)	114,91	116,32	117,03	118,95	119,59	121,30	1,43%	4,28%
1 Konsumsi Rumah Tangga (KRT)	115,59	117,13	117,68	119,95	120,40	122,310	1,59%	4,42%
a. Bahan Makanan	116,41	118,73	118,02	120,84	120,40	122,950	2,12%	3,55%
b. Makanan Jadi	113,65	117,16	119,07	121,32	122,490	125,060	2,10%	6,74%
c. Perumahan	120,19	119,52	122,12	123,67	126,080	127,050	0,77%	6,30%
d. Sandang	112,31	113,80	113,64	116,04	116,770	117,140	0,32%	2,93%
e. Kesehatan	111,10	112,46	113,39	114,52	114,730	115,40	0,58%	2,61%
f. Pendidikan, Rekreasi & Olah raga	112,07	114,22	116,11	118,39	119,130	119,240	0,09%	4,40%
g. Transportasi dan Komunikasi	115,31	108,83	110,08	110,5	111,10	110,920	-0,16%	1,92%
Biaya Produksi dan Penambahan Barang	112,59	113,65	114,87	115,71	116,85	117,85	0,86%	3,70%
Modal (BPPBM)								
a. Bibit	109,11	111,43	113,13	113,17	114,88	115,26	0,33%	3,44%
b. Obat-obatan & Pupuk	114,37	113,61	115,23	116,39	117,4	117,38	-0,02%	3,32%
c. Sewa Lahan, Pajak & Lainnya	115,00	121,87	122,81	123,71	125,25	128,25	2,40%	5,24%
d. Transportasi	118,74	115,34	115,71	116,58	118,01	118,51	0,42%	2,75%
e. Penambahan Barang Modal	112,73	115,57	117,76	118,82	119,99	121,57	1,32%	5,19%
f. Upah Buruh Tani	108,93	110,85	111,48	112,15	113,07	114,36	1,14%	3,17%

Sumber : BPS,

Indeks yang Dibayar Petani (IB) secara umum mengalami kenaikan sebesar 1,43% (qtq) menjadi 121,30. Kenaikan utamanya dipicu oleh kenaikan indeks Konsumsi Rumah Tangga tersebut dikarenakan adanya peningkatan harga beberapa komoditas bahan makanan (2,12%-qtq) dan makanan jadi (2,10%-qtq) yang dikonsumsi, seperti gula. Selain itu, biaya sewa lahan dan pajak (2,40%-qtq) menjadi pendorong peningkatan biaya produksi dan penambahan barang modal (BPPBM).

Terkait dengan IB, perlu diwaspadai dampak kenaikan harga eceran tertinggi (HET) pupuk sebesar 33,3% pada akhir triwulan ini. Kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah dan beras sebesar 10% merupakan kompensasi bagi petani dari kenaikan HET pupuk. Namun diperlukan kepastian bahwa seluruh petani telah memperoleh harga gabah dan beras minimal sesuai HPP yang ditetapkan pemerintah.



Halaman ini sengaja dikosongkan

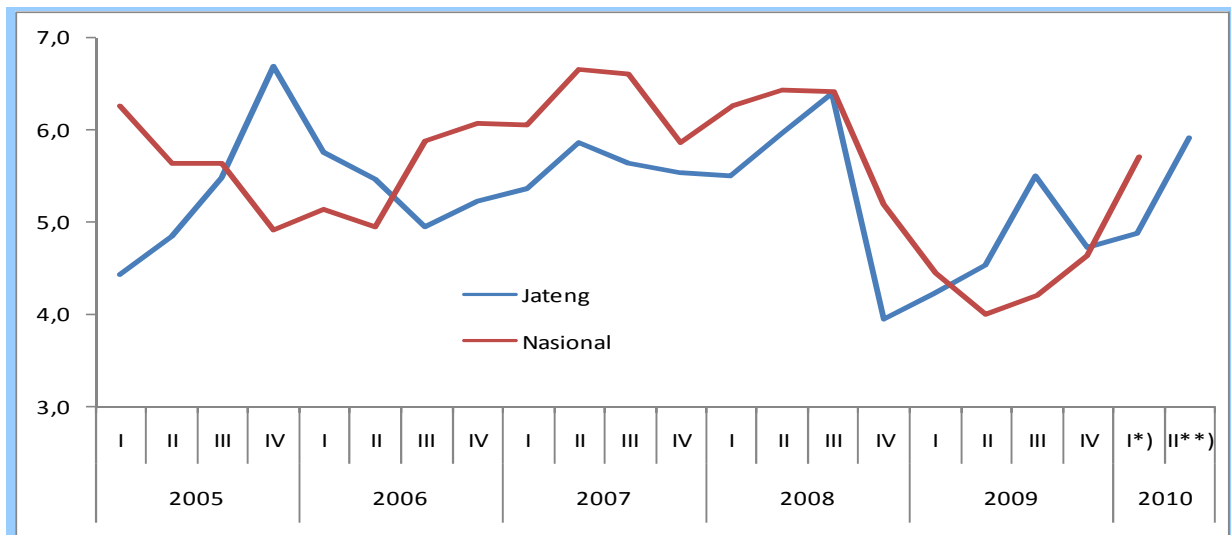
Bab 7

Prospek Perekonomian

Seiring dengan membaiknya beberapa indikator ekonomi Jawa Tengah, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II-2010 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I-2009, yaitu dalam kisaran 5,55%-6,25% (yoy). Peningkatan pertumbuhan tersebut secara sektoral akan didorong oleh peningkatan sektor pertanian, sementara dari sisi penggunaan konsumsi rumah tangga diperkirakan masih akan tetap menjadi penopang pertumbuhan. Sementara itu, tekanan inflasi Jawa Tengah triwulan II-2010 diperkirakan akan mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya, dan laju inflasi diproyeksikan akan berada dalam kisaran 3,75%-4,25% (yoy).

7.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II-2010 diperkirakan akan mengalami peningkatan dibandingkan triwulan I-2009, yaitu dalam kisaran 5,55%-6,25% (yoy). Peningkatan pertumbuhan tersebut secara sektoral akan didorong oleh peningkatan sektor pertanian, sementara dari sisi penggunaan konsumsi rumah tangga diperkirakan masih akan tetap menjadi penopang pertumbuhan.

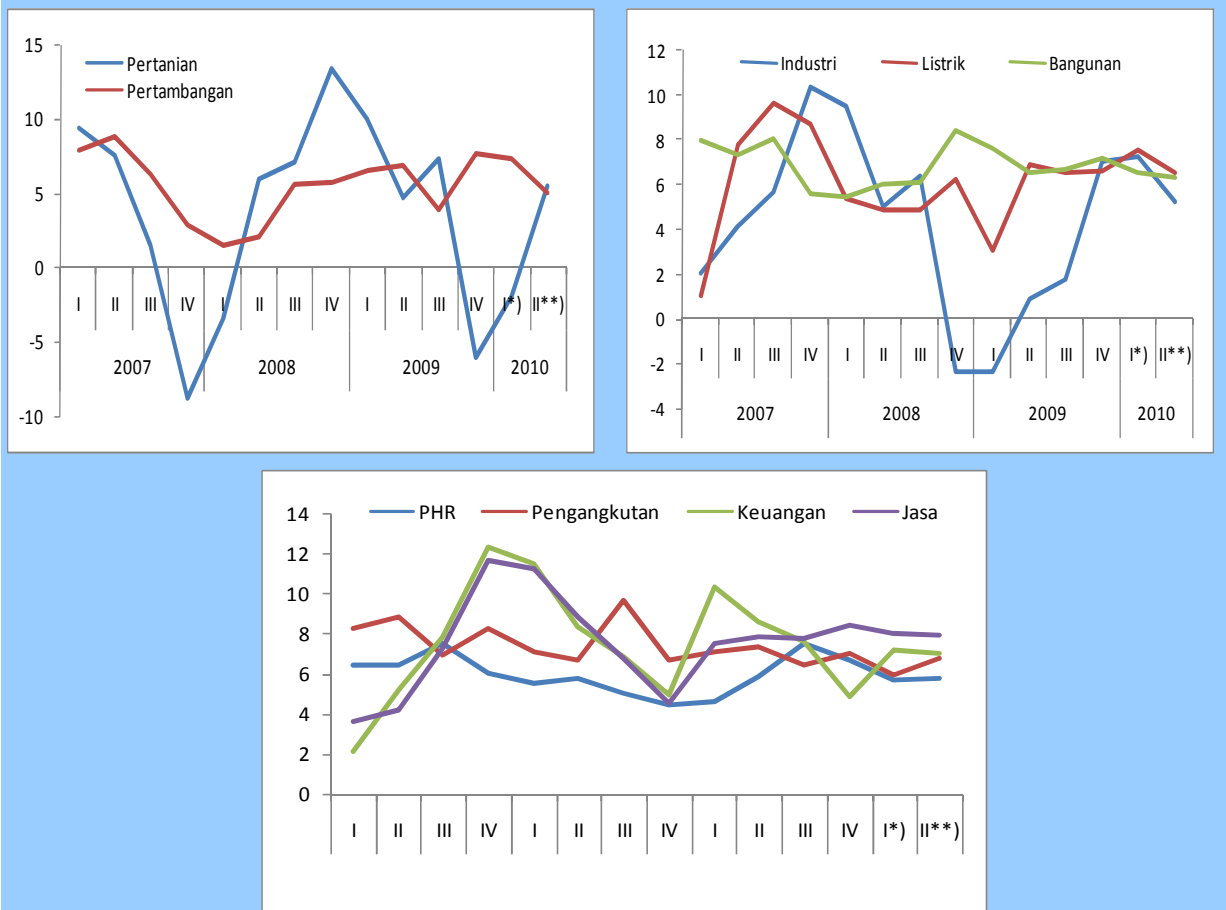


Sumber : BPS dan Bank Indonesia, diolah

* Angka triwulan I dan II 2010 merupakan angka proyeksi Bank Indonesia

GRAFIK 7.1.
PERKIRAAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN JAWA TENGAH

Dari sisi sektoral, sektor pertanian diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,1%-5,8% (yoy), meningkat cukup signifikan dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I-2010. Peningkatan sektor pertanian tersebut seiring dengan mulai masuknya masa panen raya di awal triwulan tersebut. Berdasarkan informasi dari dinas/ instansi terkait, diperkirakan hasil panen pada triwulan II-2010 cukup baik, sehingga memberikan kontribusi cukup signifikan pada pertumbuhan. Selain itu terdapat pula faktor *base effect*, dimana angka PDRB sektor pertanian di triwulan II-2009 relatif lebih kecil karena panen raya telah terjadi pada triwulan sebelumnya.



Sumber : BPS
* Angka triwulan I dan II 2010 merupakan angka proyeksi Bank Indonesia

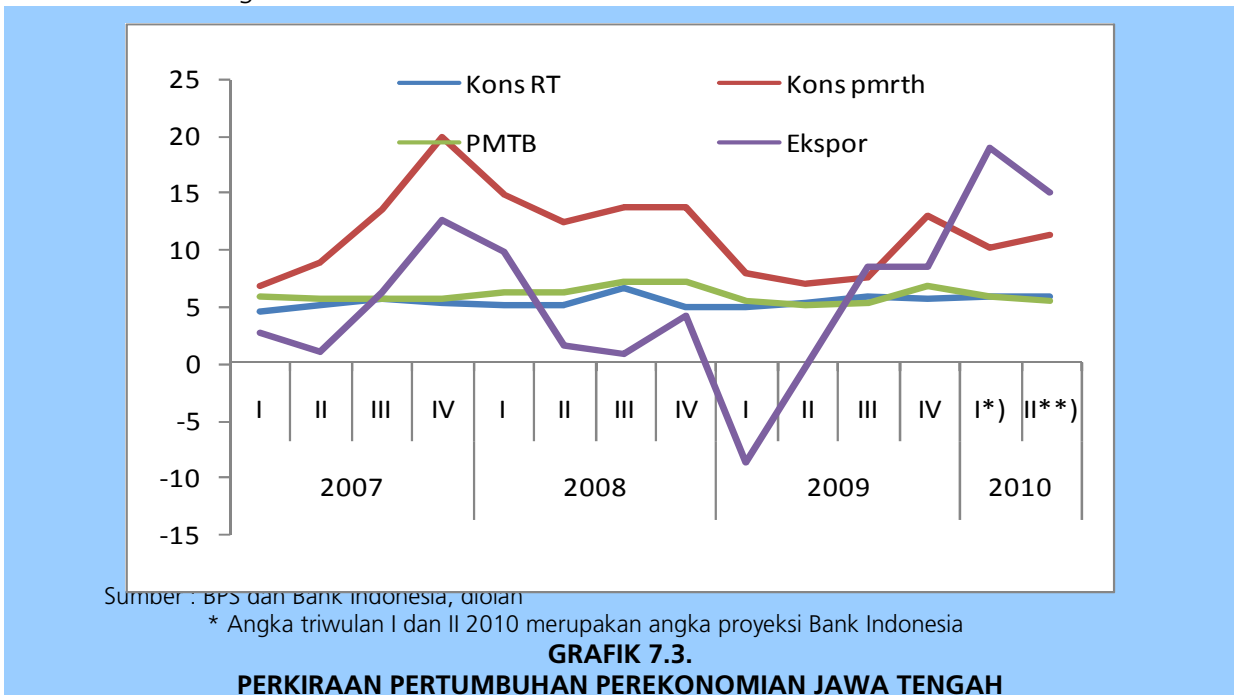
GRAFIK 7.2.

PERKIRAAN PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN SISI SEKTORAL JAWA TENGAH

Sementara itu sektor industri diperkirakan masih tetap tumbuh positif di kisaran 4,9%-5,6% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan I-2010. Beberapa indikator seperti impor barang modal, perkembangan cukai rokok serta penjualan listrik untuk industri menunjukkan adanya tren peningkatan. Demikian pula halnya dengan *prompt indicator* investasi juga menunjukkan adanya tren pertumbuhan positif. Kondisi tersebut diperkirakan akan mendorong perkembangan sektor industri di triwulan mendatang. Sementara itu, perlambatan pertumbuhan sektor industri pada triwulan II-2010 dibandingkan triwulan I-2010 lebih disebabkan oleh pertumbuhan yang cukup tinggi di triwulan I-2010 karena faktor *base effect*.

Beberapa sektor lain yang diperkirakan tetap tumbuh positif pada triwulan II-2010 adalah sektor listrik, gas dan air, sektor bangunan, sektor jasa, dan sektor angkutan dan komunikasi,

serta sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Sektor listrik, gas dan air diperkirakan masih tumbuh cukup tinggi karena didorong oleh peningkatan jumlah pelanggan listrik di wilayah Jawa Tengah. Sementara itu pertumbuhan sektor bangunan dan sektor jasa didorong oleh peningkatan realisasi proyek-proyek pemerintah di wilayah Jawa Tengah. Pertumbuhan sektor angkutan dan komunikasi serta sektor PHR didorong oleh pelaksanaan Pemilukada di beberapa daerah Tingkat II di Jawa Tengah, serta musim liburan dan persiapan tahun ajaran baru. Kondisi ekonomi yang cukup kondusif, seperti nilai tukar rupiah yang stabil, inflasi yang rendah serta suku bunga pinjaman yang mulai menurun nampaknya merupakan faktor positif yang menjaga daya beli masyarakat. Kondisi tersebut diperkirakan akan turut mendorong pertumbuhan sektor PHR dan sektor angkutan dan komunikasi.



Di sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga (RT) diperkirakan masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan II-2010. Konsumsi RT diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 5,5%-6% (yoy) di triwulan II-2010, relatif sama dibandingkan triwulan I-2010. Optimisme masyarakat terhadap kondisi perekonomian diperkirakan akan tetap mendorong pertumbuhan konsumsi RT. Optimisme tersebut didukung oleh kondisi makro ekonomi dalam negeri yang cukup positif, serta proyeksi dari berbagai lembaga yang mempunyai ekspektasi positif terhadap kondisi perekonomian ke depan.

Sementara itu konsumsi pemerintah pada triwulan II-2010 diperkirakan tumbuh dalam kisaran 10,8%-11,5% (yoy). Pertumbuhan ini terutama didorong oleh mulai terealisirnya belanja pemerintah dalam porsi yang lebih besar di triwulan mendatang, serta adanya porsi anggaran untuk penyelenggaraan Pemilukada dalam periode tersebut. Investasi diperkirakan tumbuh relatif stabil, dalam kisaran 5,15%-5,85%, seiring dengan semakin kondusifnya situasi keamanan maupun prospek ekonomi regional yang positif. Sementara itu ekspor diperkirakan tetap tumbuh signifikan, dalam kisaran 14,7%-15,4%, walaupun sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan

pada triwulan I-2010. Perlambatan tersebut karena pertumbuhan ekspor di triwulan I-2010 tumbuh cukup tinggi akibat kontraksi yang cukup dalam pada periode triwulan I-2009.

7.2. Inflasi

Tekanan inflasi Jawa Tengah di triwulan II-2010 diperkirakan akan mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya, dan laju inflasi diproyeksikan akan berada dalam kisaran 3,75%–4,25% (yoy). Perkiraan optimis akan berada dalam angka kisaran 3,75% - 4,25%, sedangkan perkiraan pesimis berada dalam kisaran 4,0% - 4,25%. Tekanan inflasi triwulan II-2010 diperkirakan akan sedikit meningkat sejalan dengan naiknya tekanan dari sisi permintaan pada masa liburan pada Juni-Juli, kenaikan harga pupuk yang mulai berdampak karena mulai masuknya masa tanam pada bulan Juni, dan adanya tekanan harga dari beberapa komoditas internasional (*imported inflation*).

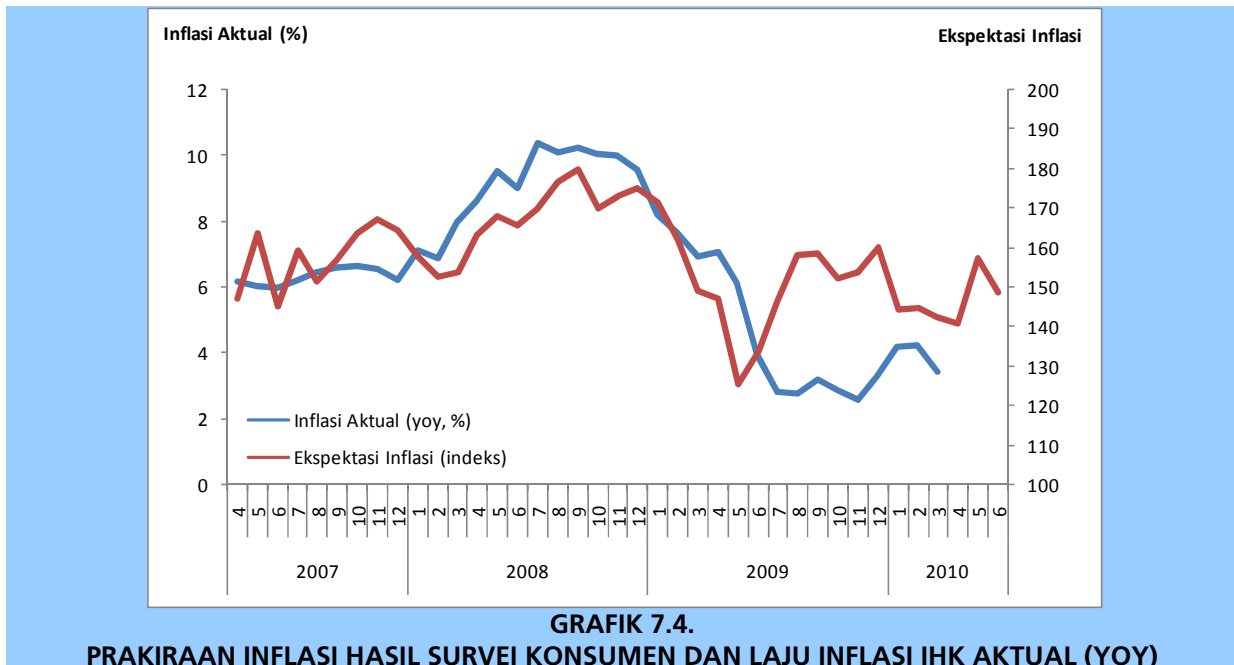
Tekanan dari *imported inflation* perlu diantisipasi karena beberapa komoditas internasional diperkirakan mengalami kecenderungan meningkat pada triwulan II-2010, antara lain *crude palm oil* (CPO), besi baja (logam), karet dan berbagai komoditas pangan (gandum, kedelai, lada). Sementara itu, tekanan harga komoditas *administered prices* diperkirakan akan berasal dari kenaikan harga pupuk yang ditetapkan 33,3% mulai April 2010. Dampak ini akan terasa ketika mulai masa tanam pada bulan Juni. Adapun tekanan harga komoditas *volatile foods* pada awal triwulan II-2010 diperkirakan akan agak menurun karena adanya masa panen raya sampai dengan Mei 2010. Sementara itu, sumbangan inflasi dari faktor moneter diperkirakan relatif minim sejalan dengan perkembangan kurs rupiah yang diperkirakan masih cukup stabil.

Faktor potensial yang diperkirakan dapat menjadi pemicu tekanan inflasi triwulan II-2010 adalah berkurangnya pasokan bahan kebutuhan pokok karena faktor musiman, seperti gula pasir, bawang merah, cabe merah dan sayuran. Di samping itu, tekanan inflasi dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) berupa masuknya masa liburan panjang pada bulan Juni-Juli 2009 diperkirakan juga dapat meningkatkan harga beberapa komoditas. Selain itu, kecenderungan harga minyak dunia yang diperkirakan masih cenderung meningkat pada triwulan II-2010, dikhawatirkan dapat berdampak pada kenaikan harga beberapa komoditas.

Masuknya masa tanam pada bulan Juni-Juli perlu diiringi dengan distribusi pupuk yang lancar agar tidak memicu kenaikan biaya produksi produk pertanian, khususnya beras. Kelancaran distribusi pupuk tersebut juga diharapkan dapat meminimalkan dampak kenaikan harga pupuk bersubsidi sebesar 33,3% per April 2010. Selain itu, pasokan komoditas bahan makanan juga perlu dijaga pada masa tanam agar harga komoditas ini tetap stabil karena sumbangannya terhadap inflasi cukup signifikan.

Tekanan inflasi dari ekspektasi masyarakat diperkirakan mengalami peningkatan pada triwulan mendatang. Di tengah aktivitas ekonomi yang mulai meningkat pada tahun 2010, laju inflasi diperkirakan akan cenderung naik pada triwulan mendatang. Dengan ekspektasi masyarakat yang juga positif, laju inflasi triwulan mendatang diperkirakan akan mengalami peningkatan namun masih dalam rentang prediksi awal tahun.

Terdapat beberapa faktor positif yang diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap inflasi triwulan mendatang. Beberapa faktor positif tersebut antara lain berupa: (a) ketersediaan stok barang kebutuhan pokok yang masih mencukupi, setelah adanya masa panen pada Maret-Mei, (b) kurs rupiah yang stabil, dan (c) ekspektasi masyarakat terhadap perkembangan harga yang cukup positif hingga enam bulan ke depan.

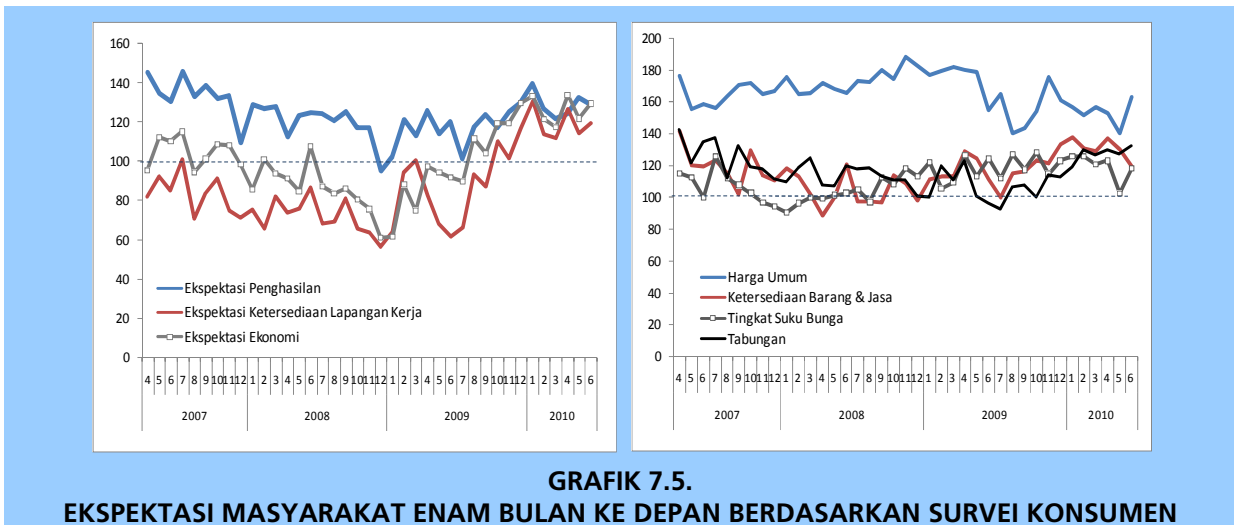


Berdasarkan Hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan KBI Semarang, responden mengekspektasikan bahwa harga di tingkat pedagang pada triwulan II-2010 mendatang diperkirakan sedikit meningkat dibandingkan dengan triwulan laporan. Hal tersebut sejalan dengan hasil Survei Konsumen (SK) yang sebagian besar mengekspektasikan terjadinya peningkatan harga barang dan jasa (lihat Grafik 7.1.).

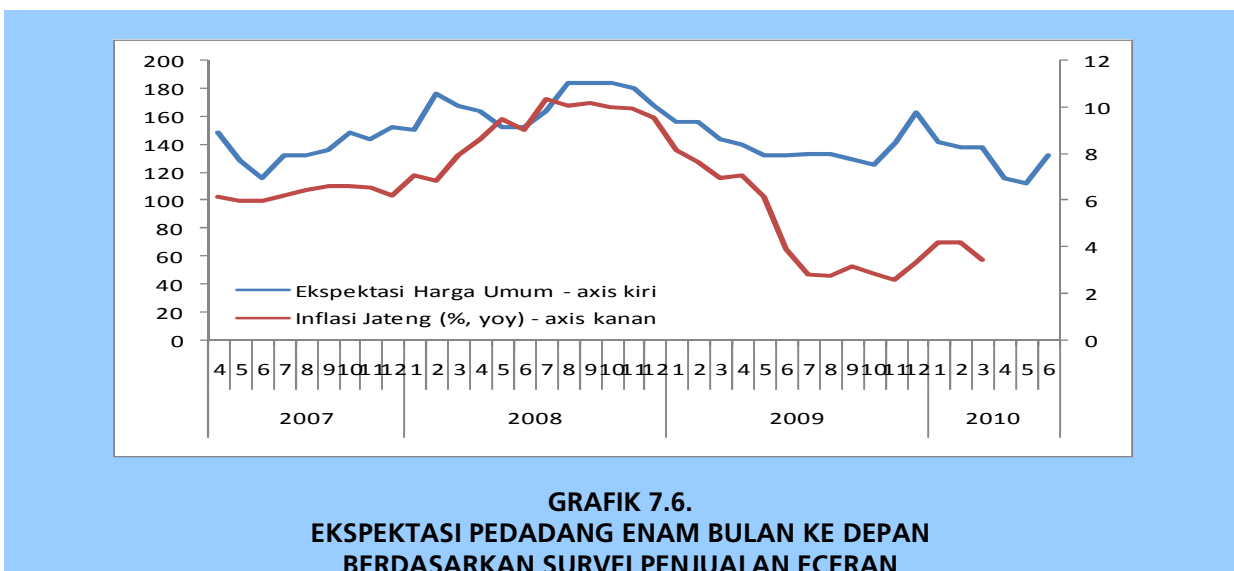
Berdasarkan Survei Konsumen yang dilakukan oleh KBI Semarang, ekspektasi masyarakat kota Semarang dalam tiga bulan ke depan menunjukkan peningkatan optimisme dalam hal ekspektasi penghasilan, ekspektasi ekonomi, dan ekspektasi ketersediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan penghasilan dalam level yang semakin optimis, sehingga menjadi sinyal positif bagi perekonomian dalam triwulan mendatang.
- b. Ekspektasi masyarakat terhadap ketersediaan lapangan kerja menunjukkan optimisme sampai dengan triwulan mendatang, setelah berada dalam level pesimis hingga triwulan III-2009. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa ketersediaan lapangan kerja akan semakin meningkat, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian.
- c. Ekspektasi masyarakat terhadap harga secara umum sangat positif, yaitu bahwa dalam tiga bulan ke depan masyarakat memandang harga akan cukup stabil terlihat dari ekspektasi harga yang berada di atas level 140.

Ekspektasi masyarakat terhadap tingkat suku bunga dan tabungan juga optimis pada tiga bulan ke depan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya terhadap kemampuannya dalam menambah tabungan yang dimilikinya, karena adanya peningkatan penghasilan.



Berdasarkan Survei Penjualan Eceran (SPE) yang dilakukan oleh KBI Semarang, mayoritas responden memperkirakan harga secara umum pada tiga bulan mendatang akan meningkat. Secara *net balance*, indeks ekspektasi harga pada Maret 2010 untuk tiga bulan mendatang rata-rata berada di atas level 132, sedikit turun dari Desember 2009 yang berada dalam level 137. Hal itu menunjukkan ekspektasi responden terhadap kenaikan harga secara umum semakin menurun, atau responden melihat ke depan bahwa inflasi akan relatif lebih tinggi dari triwulan laporan (lihat Grafik 7.3).



Berdasarkan hasil estimasi dan berbagai survei tersebut di atas yang menghitung ekspektasi masyarakat, pedagang dan perkiraan perkembangan harga ke depan, maka KBI Semarang memperkirakan laju inflasi Jawa Tengah triwulan II-2010 diperkirakan akan berada dalam kisaran 3,75%-4,25% (yoy), sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 7.1.

Tabel 7.1.
ESTIMASI LAJU INFLASI JAWA TENGAH
MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA (yoy, PERSEN)

NO	KELOMPOK BARANG & JASA	II-2009	III-2009	IV-2009	I-2010	II-2010*)
1	Bahan Makanan	3,92	4,63	3,75	3,16	3 – 4
2	Mkn Jadi, Minuman, Rokok & Temb,	9,49	7,25	7,53	7,81	7 – 8
3	Perumh,, Air, Listrik, Gas & Bhn Bakar	7,38	4,29	3,49	2,18	2 – 3
4	Sandang	6,38	5,94	5,70	2,54	4 – 5
5	Kesehatan	6,05	5,37	3,40	1,70	2 – 3
6	Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga	3,69	3,30	2,45	2,48	3 – 4
7	Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan	-7,36	-6,90	-3,40	1,69	2 – 3
UMUM		3,95	3,20	3,32	3,46	3,75 – 4,25

Sumber: BPS, diolah

Keterangan: *) merupakan estimasi KBI Semarang



Halaman ini sengaja dikosongkan

Daftar Istilah

Administered Price

Harga barang/jasa yang diatur oleh pemerintah, misalnya harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik.

Base Effect

Efek kenaikan/penurunan nilai pertumbuhan yang cukup tinggi sebagai akibat dari nilai level variabel yang dijadikan dasar perhitungan/perbandingan mempunyai nilai yang cukup rendah/tinggi.

BEC

Merupakan pengklasifikasian kode barang dengan 3 digit angka, yang dikelompokkan berdasarkan kegunaan utama barang berdasarkan daya angkut komoditi tersebut.

Barang Modal (*Capital*)

Barang-barang yang digunakan untuk keperluan investasi.

Bahan baku (*Raw Material*)

Barang-barang mentah atau setengah jadi yang akan diproses kembali oleh sektor industri

BI Rate

Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya.

BI-RTGS

Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*, yang merupakan suatu penyelesaian kewajiban bayar-membayar (*settlement*) yang dilakukan secara *on-line* atau seketika untuk setiap instruksi transfer dana.

Dana Pihak Ketiga (DPK)

adalah simpanan pihak ketiga bukan bank yang terdiri dari giro, tabungan dan simpanan berjangka.

Ekspor dan Impor

Dalam konteks PDRB adalah mencakup perdagangan barang dan jasa antar negara dan antar provinsi

Financing to Deposit Ratio (FDR) atau Loan to Deposit Ratio (LDR)

rasio pembiayaan atau kredit terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank, baik dalam rupiah dan valas. Terminologi FDR untuk bank syariah, sedangkan LDR untuk bank konvensional.

fit for circulation

merupakan kebijakan untuk menyediakan uang layak edar.

Inflasi IHK

kenaikan harga barang dan jasa dalam satu periode, yang diukur dengan perubahan indeks harga konsumen (IHK), yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas.

Inflasi inti

inflasi IHK setelah mengeluarkan komponen *volatile foods* dan *administered prices*.

Inflow

adalah uang yang diedarkan aliran masuk uang kartal ke Bank Indonesia.

Kredit

adalah penyediaan uang atau tagihan yang sejenis, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk :

- (1) pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *note purchase agreement (NPA)*.
- (2) pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Konsumsi (Consumption)

Kategori barang-barang jadi yang digunakan langsung untuk konsumsi baik habis pakai maupun tidak.

Kontraksi Pertumbuhan

Kondisi dimana pertumbuhan output/PDRB bernilai negatif

Net Inflow

Uang yang diedarkan *inflow* lebih besar dari *outflow*.

Saldo Bersih Tertimbang (SBT)

Merupakan salah satu metode yang digunakan dalam SKDU dengan memperhitungkan selisih antara jumlah jawaban "Positif" dengan jawaban "Negatif" dari tiap sektor. Selisih tersebut kemudian dikalikan bobot tiap sektor. SBT mencerminkan perkembangan usaha di saat ini dan di masa mendatang dari tiap sektor.

LAMPIRAN
Indikator Perekonomian dan Perbankan Jawa Tengah

INDIKATOR PEREKONOMIAN DAN PERBANKAN JAWA TENGAH

No.	INDIKATOR	I-08	II-08	III-08	IV-08	I-09	II-09	III-09	IV-09	I-10*
I. Ekonomi Makro										
1	Pertumbuhan PDRB (yoy, %)	5,49	5,96	6,39	3,94	4,21	4,53	5,54	4,57	4,75 - 5,25
	Sektoral									
	a. Pertanian	-3,43	5,89	7,09	13,36	9,74	4,74	9,25	-6,00	(-2,2) - (-1,7)
	b. Pertambangan & Penggalian	1,46	2,03	5,54	5,70	4,96	5,40	3,86	7,65	7,0 - 7,5
	c. Industri Pengolahan	9,51	5,03	6,39	-2,37	-2,38	1,09	1,73	7,02	7,0 - 7,5
	d. Listrik, Gas & Air Bersih	5,35	4,83	4,86	4,04	2,60	6,39	5,43	6,57	7,0 - 7,5
	e. Konstruksi	5,45	6,04	6,08	8,44	7,61	6,58	6,66	6,30	6,3 - 6,8
	f. Perdagangan, Hotel & Restoran	5,46	5,76	4,95	4,26	4,57	5,82	5,95	6,22	5,5 - 6,0
	g. Pengangkutan & Komunikasi	7,10	6,67	9,65	6,67	7,11	7,35	6,41	6,99	5,8 - 6,3
	h. Keu., Persewaan & Jasa Persh.	11,49	8,32	6,77	4,96	10,01	8,80	7,28	4,80	6,8 - 7,3
	i. Jasa-Jasa	11,20	8,80	6,69	4,46	7,47	7,72	7,74	8,42	7,75 - 8,25
	Sisi Penggunaan									
	a. Konsumsi Rumah Tangga	5,13	5,11	6,51	4,95	4,92	5,25	5,84	5,65	5,5 - 6,0
	b. Konsumsi LNP	2,65	2,12	6,77	10,27	11,89	10,53	6,28	1,61	7,7 - 8,2
	c. Konsumsi Pemerintah	14,71	9,32	8,88	8,23	7,86	6,85	7,45	15,64	12,5 - 13,0
	d. Investasi (PMTB)	6,18	6,14	7,16	7,24	5,34	5,00	5,20	6,88	6,3 - 6,8
	e. Ekspor	2,6	5,75	1,52	2,31	-10,17	-0,70	8,44	18,43	18,7 - 19,2
	f. Impor	16,06	-8,58	-12,51	13,03	-12,90	6,47	17,85	19,70	15,0 - 15,5
2	Inflasi (yoy, %)	7,95	9,01	10,21	9,55	6,94	3,95	3,20	3,32	3,46
	a. Bahan Makanan	13,36	17,33	16,71	12,91	7,76	3,92	4,64	3,75	3,16
	b. Makanan Jadi	10,69	9,74	13,17	12,9	9,22	9,49	7,25	7,53	7,81
	c. Perumahan	5,34	9,73	12,77	13,46	12,17	7,38	4,29	3,49	2,18
	d. Sandang	9,69	9,13	8,78	7,06	7,08	6,38	5,94	5,70	2,54
	e. Kesehatan	5,5	6,4	6,13	7,68	6,97	6,05	5,37	3,40	1,70
	f. Pendidikan	7,31	8,54	4,44	4,93	4,99	3,69	3,30	2,45	2,48
	g. Transpor	1,18	11,2	11,92	7,14	1,92	-7,36	-6,90	-3,40	1,69

II. Kinerja Perbankan (Rp. Miliar)										
1.	Total Asset - Total	94.342	99.100	107.486	111.812	113.259	116.051	121.918	125.595	127.072
	a. Total Asset - Bank Umum	87.417	91.822	99.993	103.922	105.161	107.844	113.088	116.642	117.935
	b. Total Asset - BPR	6.925	7.278	7.493	7.889	8.097	8.207	8.830	8.953	9.137
2.	DPK - Total	74.783	78.761	81.240	86.140	90.139	92.260	93.852	97.499	97.066
	a. DPK - Bank Umum	69.886	73.706	76.113	80.681	84.453	86.474	87.657	91.213	90.570
	b. DPK - BPR	4.897	5.054	5.127	5.459	5.686	5.786	6.195	6.287	6.496
3.	Deposito - Total	28.073	29.571	32.910	33.740	36.975	37.221	37.048	36.423	38.081
	a. Deposito - Bank Umum	25.143	26.574	29.868	30.621	33.646	33.801	33.379	32.697	34.241
	b. Deposito - BPR	2.930	2.997	3.042	3.119	3.330	3.420	3.669	3.726	3.840
4.	Giro - Total	12.772	12.971	11.789	12.296	14.035	14.358	14.474	14.017	14.536
5.	Tabungan - Total	33.938	36.219	36.542	40.104	39.129	40.681	42.330	47.058	44.449
	a. Tabungan - Bank Umum	31.971	34.161	34.457	37.763	36.773	38.315	39.804	44.498	41.793
	b. Tabungan - BPR	1.967	2.058	2.085	2.340	2.356	2.366	2.526	2.560	2.657
6.	Kredit - Total	64.040	71.397	77.110	79.331	79.835	82.670	85.961	90.194	90.722
	a. Kredit - Bank Umum	58.475	65.406	70.668	72.907	73.099	75.610	78.452	82.814	83.298
	b. Kredit - BPR	5.565	5.991	6.442	6.424	6.736	7.060	7.508	7.380	7.424

Ket : *) Data Perbankan menggunakan data bulan Februari
sumber : KBI Semarang dan BPS Provinsi Jateng

INDIKATOR PEREKONOMIAN DAN PERBANKAN JAWA TENGAH

No.	INDIKATOR	I-08	II-08	III-08	IV-08	I-09	II-09	III-09	IV-09	I-10*
7.	Kredit Menurut Jenis Penggunaan									
	a. Kredit BU & BPR - Total	64.040	71.397	77.110	79.331	79.835	82.670	85.961	90.194	90.722
	- Kredit Modal Kerja	35.474	39.650	43.573	44.968	45.133	46.419	48.142	50.546	42.969
	- Kredit Investasi	4.833	5.337	5.589	5.925	5.881	6.171	6.727	7.098	8.956
	- Kredit Konsumsi	23.733	26.410	27.949	28.438	28.821	30.079	31.093	32.549	38.797
	b. Persentase thd Total Kredit (%)									
	- Kredit Modal Kerja	55,39	55,53	56,51	56,68	56,53	56,15	75,17	56,04	47,64
	- Kredit Investasi	7,55	7,48	7,25	7,47	7,37	7,47	10,50	7,87	9,93
	- Kredit Konsumsi	37,06	36,99	36,25	35,85	36,10	36,38	36,17	36,09	43,02
	c. Kredit Bank Umum	58.475	65.406	70.668	72.907	73.099	75.610	78.452	82.814	83.298
	- Kredit Modal Kerja	32.745	36.732	40.337	41.826	41.825	42.883	44.352	46.839	39.216
	- Kredit Investasi	4.517	4.987	5.234	5.543	5.475	5.766	6.321	6.694	8.544
	- Kredit Konsumsi	21.213	23.687	25.098	25.539	25.799	26.961	27.780	29.281	35.538
	d. Kredit BPR	5.565	5.991	6.442	6.424	6.736	7.060	7.508	7.380	7.424
	- Kredit Modal Kerja	2.728	2.918	3.236	3.142	3.308	3.536	3.790	3.707	3.754
	- Kredit Investasi	317	350	355	382	405	406	406	404	411
	- Kredit Konsumsi	2.520	2.723	2.851	2.899	3.022	3.118	3.313	3.268	3.259
8.	Kredit Menurut Sektor Ekonomi									
	a. Kredit BU & BPR - Total	64.040	71.397	77.110	79.331	79.835	82.670	85.961	90.194	90.722
	- Sektor Pertanian	2.437	2.547	2.548	2.655	2.671	2.753	2.688	2.819	1.525
	- Sektor Pertambangan	73	65	103	100	101	89	110	105	109
	- Sektor Industri	11.157	12.569	14.717	15.633	15.550	15.002	15.809	16.802	15.954
	- Sektor Air, Listrik & Gas	12	13	10	10	17	50	61	63	61
	- Sektor Konstruksi	852	1.205	1.343	1.110	1.132	1.282	1.355	1.296	1.002
	- Sektor Perdagangan	21.237	23.282	24.473	25.352	25.666	27.481	28.764	30.414	23.131
	- Sektor Transportasi	621	685	727	845	845	926	910	955	988
	- Sektor Jasa Dunia Usaha	2.810	3.243	3.733	3.704	3.583	3.515	3.712	3.647	3.780
	- Sektor Jasa Sosial Masy.	606	679	681	743	719	745	737	809	909
	- Lain-lain	24.234	27.109	28.776	29.179	29.552	30.825	31.816	33.283	43.263
	b. Kredit Bank Umum	58.475	65.406	70.668	72.907	73.099	75.610	78.452	82.814	83.298
	- Sektor Pertanian	1.996	2.067	2.096	2.156	2.144	2.200	2.167	2.290	968
	- Sektor Pertambangan	73	65	103	100	101	89	110	105	109
	- Sektor Industri	11.070	12.479	14.610	15.540	15.453	14.904	15.708	16.702	15.856
	- Sektor Air, Listrik & Gas	12	13	10	10	17	50	61	63	61
	- Sektor Konstruksi	852	1.205	1.343	1.110	1.132	1.282	1.355	1.296	1.002
	- Sektor Perdagangan	19.345	21.254	22.200	23.145	23.344	24.986	26.019	27.764	20.462
	- Sektor Transportasi	621	685	727	845	845	926	910	955	988
	- Sektor Jasa Dunia Usaha	2.300	2.688	3.100	3.103	2.954	2.859	3.050	2.977	3.106
	- Sektor Jasa Sosial Masy.	606	679	681	743	719	745	737	809	909
	- Lain-lain	21.599	24.270	25.797	26.157	26.391	27.568	28.336	29.853	39.838
	c. Kredit BPR	5.565	5.991	6.442	6.424	6.736	7.060	7.508	7.380	7.424
	- Sektor Pertanian	441	479	452	500	527	553	521	529	557
	- Sektor Industri	87	89	106	93	97	98	102	100	98
	- Sektor Perdagangan	1.892	2.028	2.273	2.207	2.322	2.496	2.745	2.650	2.669
	- Sektor Jasa Dunia Usaha	510	555	632	601	628	656	662	670	674
	- Lain-lain	2.635	2.839	2.979	3.023	3.161	3.257	3.479	3.431	3.425

Ket : *) Data Perbankan menggunakan data bulan Februari
sumber : KBI Semarang dan BPS Provinsi Jateng

INDIKATOR PEREKONOMIAN DAN PERBANKAN JAWA TENGAH

No.	INDIKATOR	I-2008	II-2008	III-08	IV-08	I-09	II-09	III-09	IV-09	I-10*
9.	LDR - Perbankan (%)	85,63	90,65	94,92	92,10	88,57	89,61	91,59	92,51	93,46
	a. LDR - Bank Umum (%)	83,67	88,74	92,85	90,37	86,56	87,44	89,50	90,79	91,97
	b. LDR - BPR (%)	113,64	118,52	125,64	117,66	118,46	122,01	121,20	117,38	114,27
10.	NPL - Perbankan (%)	4,13	2,80	3,24	2,95	4,13	4,13	3,40	2,98	-0,42
	a. NPL - Bank Umum (%)	3,34	3,06	2,64	2,39	3,70	3,41	2,83	2,41	2,24
	b. NPL - BPR (%)	12,54	10,36	2,84	2,64	4,27	8,76	9,31	9,13	8,86
11. Perbankan Syariah										
A. Total Perbankan Syariah (BU Syariah & BPR Syariah)										
	a. Aset	1.624	1.908	2.362	2.474	2.416	2.782	2.998	3.575	4.651
	Share thd Perbankan Jateng (%)	1,72	1,92	2,20	2,21	2,13	2,40	2,46	2,85	3,66
	b. DPK	1.288	1.495	1.585	1.742	1.707	1.942	1.946	2.301	3.154
	Share thd Perbankan Jateng (%)	1,72	1,90	1,95	2,02	1,89	2,10	2,07	2,36	3,25
	c. Pembiayaan	1.304	1.657	1.917	2.075	2.060	2.294	2.481	2.704	3.392
	Share thd Perbankan Jateng (%)	2,04	2,32	2,49	2,62	2,58	2,78	2,89	3,00	3,74
	d. FDR (%)	101,24	110,80	101,24	119,12	120,69	118,16	127,47	117,52	107,54
	e. NPF (%)	4,83	4,12	4,83	2,37	4,64	4,03	3,27	3,61	3,27
B. Bank Umum Syariah & Unit Usaha Syariah										
	a. Aset	1.563	1.787	2.225	2.318	2.244	2.590	2.788	3.328	4.402
	b. DPK	1.247	1.415	1.495	1.637	1.588	1.810	1.804	2.132	2.984
	- Giro Wadiah	179	187	198	150	154	166	166	154	167
	- Tab. Wadiah & Mudharabah	625	654	721	820	807	891	1.064	990	1.460
	- Deposito Mudharabah	443	574	576	666	627	753	739	989	1.357
	c. Pembiayaan	1.259	1.566	1.808	1.958	1.925	2.143	2.314	2.526	3.212
	d. FDR (%)	101,04	110,67	120,96	119,63	121,22	118,41	128,30	118,48	107,66
	e. NPF (%)	4,73	4,17	2,56	2,30	4,59	3,97	3,13	3,43	3,05
C. BPR Syariah										
	a. Aset	98	120	137	156	172	192	210	247	250
	b. DPK	69	80	91	105	119	132	143	169	170
	- Tab. Wadiah & Mudharabah	38	45	48	58	65	68	77	94	93
	- Deposito Mudharabah	31	35	43	47	55	64	66	75	77
	c. Pembiayaan	72	92	109	117	136	151	167	178	180
	d. FDR (%)	104,00	114,28	120,66	111,19	113,55	114,71	116,95	105,38	105,61
	e. NPF (%)	8,02	5,88	4,90	6,18	6,41	5,95	6,46	7,79	6,61

Ket : *) Data Perbankan menggunakan data bulan Februari
sumber : KBI Semarang dan BPS Provinsi Jateng